Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si
Hani Siti Hanifah, S.E., M.Si

Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi

Penerbit :
CV KIMFA MANDIRI

Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi

Penulis :
Dr. Hj. Mulyaningsih, M.Si
Hani Siti Hanifah, S.E., M.Si

ISBN : 978-623-94236-4-3

Editor :
Nina Kania M.Si

Penyunting :
Desi Destrianingsih, SE
Gugun Setia Nugraha

Desain Sampul dan Tata Letak :
Devsev Desain

Penerbit :
CV KIMFA MANDIRI

Redaksi:
Jl. Ciapus RT 001 RW 006 Desa Ciapus
Kec. Banjaran Kab. Bandung 40377
No Telepon: 022-85945637 - 085314983618 - 081220816826

Email : kimfamandiriks@gmail.com

KATA PENGANTAR

Masa pandemi merupakan masa yang tersulit bagi Birokrat untuk menyampaikan berbagai program, meskipun demikian Birokrat harus memiliki skill yang sangat dibutuhkan berkomunikasi dengan publik sehingga masyarakat adaptif dan baik dalam mengatasi dampak pandemi. Barangkali tidak ada yang mengatakan nyaman di masa pandemi bagi semua termasuk Birokrat sebagai agen pemerintah dalam mengelola (*managing*) dan memimpin (*leading)*,namun penggunaan model komunikasi cukup menimbulkan masalah tersendiri selain di pandemi juga digital.

Pelaksanaaan tugas Birokrat dalam pelayanan publik sementara dijalankan dengan berbagai strategi dengan mengolah, membuat, Kolaborasi dan implementasikan komunikasi digital pada masyarakat program, dan kebijakan. Jika pola komunikasi digital birokrat merupakan proses mempengaruhi dan mengajak masyarakat agar dapat menjalankan dengan baik sesuai dengan tujuan dan prosedur yang ada di masa pandemi untuk dapat

segera terjadi penurunan pandemi sehingga Indonesia bisa tangguh dan pulih kembali untuk mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, untuk menjalankan tugas-tugas Birokrat secara baik, diperlukan pola komunikasi digital yang tepat pula. Bagaimanakah dengan pola komunikasi di era digital masa pandemi merupakan sebuah keniscayaan yang akan dan terus dihadapi oleh semua khususya Birokrat.

Bandung, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I Konsep Komunikasi Birokrasi **1**
A. Konsep Birokrasi **3**
B. Konsep dan pengertian Perilaku Birokrasi **11**
C. Konsep Komunikasi **15**
D. Konsep Model Komunikasi **20**

BAB II Pendekatan Model Komunikasi Birokrat **35**
A. Pengertian Model Komunikasi Birokrat **37**
B. Pendekatan Model Komunikasi Digital **54**
C. Pendekatan Model Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal ... **64**
D. Pendekatan Model Komunikasi Masa Pandemi **76**

BAB III Landasan Model Komunikasi Birokrat 89
A. Masalah Komunikasi Birokrat.....91
B. Model Komunikasi Digital Birokrat.....111
C. Trasformasi Model Komunikasi Digital Birokrat 131
D. Implementasi Model Komunikasi Digital Birokrat 139

BAB IV Model Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi 147
A. Periode Masa Pembangunan sebelum pandemi.....159
B. Periode Pembangunan Masa Pandemi.....219
C. Periode Model Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi 250

Daftar Pustaka 296

BAB I

Konsep Komunikasi Birokrasi

A. Konsep Birokrasi

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu.

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Dikutip dari CNN, berikut beberapa hal yang wajib diketahui seputar perkembangan Coronavirus, yang biasa disebut virus Corona atau COVID-19, hingga mewabah dan jadi pandemi.Kondisi demikian membuat bukan saja Indonesia tetapi dunia mengalami pandemi secara global sehingga semua negara berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk dapat menyampaikan dan menangai persoalan-persoalan yang di hadapi serta dipahami oleh masyarakat secara luas baik internal negara yang bersangkutan maupun secara global sehingga tidak berdampak secara luar ke dalam berbagai sektor. Peran pemerintah sebagai kepanjangan masyarakat harus mampu menginformasikan hal tersebut pada masyarakat secarat cepat dan tepat . Fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintah bukan semata-mata melayani dirinya sendiri, tetapi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyrakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (**Rasyid, 1998:139**). Pentingnya peran pemerintah

dalam kondisi tersebut sangat diperlukan mengingat hanya pemerintah sebagai organisasi yang tepat untuk menyampaikannya sebagai bagian yang memiliki otoritas yang benar dalam organisasi nasional maupun dunia saat ini. Komunikasi yang dilakukan oleh negara sangat dinantikan dan perlu dengan tepat ,benar, akurat serta sangat soft, menyejukan dalam menyampaikannya pada masyarakat. Komunikasi organisasi pada saat ini benar-benar diuji dalam membantu menyampaikan pesan, program dan kebijakan pemerintah di masa pandemi saat ini.Komuniasi Organisasi yang dijalankan oleh birokrat memiliki berbagai pengertian dan makna. Arti dan Pentingnya Komunikas Organisasi. Pengertian tentang komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi, dengan demikian, terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Unit komunikasi organisasi adalah hubungan antara orang-orang dalam jabatan/ posisi dalam organisasi tersebut. Keberhasilan komunikasi dapat ditentukan oleh karakteristik komunikator, yakni kemampuan seseorang dalam menyampaikan isi pesan komunikasi. Karakteristik yang dimaksud adalah Kredibilitas (kepercayaan komunikan terhadap komunikator), Daya tarik yang dimiliki komunikator terhadap penyampaian pesan, Power (kewenangan yang dimiliki komunikator dan atau komunikan untuk memberikan penghargaan atau hukuman), Eksistensi Komunikasi (kemampuan mengemas dan menafsirkan pesan secara berkualitas, komprehensif, sistematis, dan logis), *Setiing* komunikasi yang kondusif, Mekanisme penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media yang sesuai.

Problema Komunikasi Pemerintahan di Era Global. Probelma komunikasi pemerintahan di era global deasa ini adalah, masih menggunakan pendekatan asal bapak senang, walaupun ditahui bahwa sentuhan ICT (*Information, Communication adn Technology)* sudah sedemikian dahsyatnya. Namun, pendekatan demikian tampak jelas pada posisi dan peran para pimpinan pemerintahan mulai dari jabatan menteri sampai sampai kepala daerah yang dilatarbelakangi oleh akar budaya *paternlistik* yang mengkristal, *terpersonafikasikan,* serta dianut oleh para elit politik yang berkuasa. Di sisi lain, era global memerlukan penanganan serius dan sangat hati-hati. Bila tidak, ia akan menjelema menjadi buah *simalakama* bagi sistem komunikasi pemerintahan, yang disebabkan oleh interaksi kultural melalui media massa sehingga mengungkit kesadaran global, yakni sebuah kesadaran bahwa dunia adalah satu. Peran birokrasi sangat memegang peran penting dalam hal ini. Menurut Hovland, Janis, dan Kelly. Max Weber menyampaikan bahwa Birokrasi adalah suatu aparat khusus khusus administrasi negara yang tergantung pada suatu pemisahan antara masyarakat ekonomi, serta administrasi negara. Namun tidak terlepas dari kekuasaan birokrasi. Analisis gambaran kekuasaan birokrasi tersebut dikuatkan dalam gambar kekuasaan ialah adanya pemisahan kekuasaan yang mencakup pembagian tugas dalam lingkup fungsi yang berbeda secara relative. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggung jawab terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Keputusan apapun memerlukan kompromi diantara badan-badan itu untuk bisa tercapai, Weber menunjukkan kompromi atas anggaran menganggap bahwa sistem seperti itu secara tidak stabil. Salah satu di antara otoritas itu dibatasi untuk memperoleh keunggulan. Penjelasan birokrasi yang disampaikan oleh Weber tidak pernah mendefinisikan

birokrasi secara jelas berdiri sendiri,tetapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi-proposisi dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Dari kesemuannya dapat menafsirkan pengertian birokrasi yang dimaksudkan oleh Weber, termasuk karakteristiknya yang khusus, dipandang sebagai bentuk birokrasi yang paling rasional.

Konsep umum birokrasi yang dikemukakan oleh Weber dibentuk melalui kesimpulan dari sejumlah besar bagian-bagian kiasan yang dibuatkannya untuk itu. Salah satu petunjuk bagi konsep umum Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi patrimonial, di samping jenis birokrasi lain, yaitu birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial diangkat berdasarkan kriteria subjektif karena ada hubungan emosional dengan pejabat yang mengangkat, sedangkan birokrasi rasional diangkat berdasarkan kriteria objektif, yakni syarat-syarat yang sudah ditetapkan lebih dahulu sebelum seseorang masuk menjadi pegawai pemerintah. Konsep tentang pejabat merupakan dasar bagi adanya birokrasi menurut Weber, hal ini terlihat dari seringnya Weber dalam berbagai kesempatan menggunakan *Beamtentum* (staf pegawai), sebagai suatu alternatif bagi pengertian birokrasi. Kolaborasi perilaku birokrasi dengan kultur atau budaya organisasi sangat membantu bagaimana organisasi bisa efektif, bahkan kearifan lokal mendorong bagaimana birokrat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang telah dilakukan penelitian dan kajian dari mulyaningsih (2010) Temuan Penelitian secara deskriftif pelaksanaan budaya organisasi dan perilaku birokrasi, memberikan andil yang kuat terhadap tercapainya efektivitas organisasi pada Dinas-dinas, Badan-badan, Kantor-kantor dan Sekretariat di Lingkungan Kabupaten Sumedang, yang menegaskan bahwa

perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dilandasi, didorong dan berkolaborasi dengan nilai-nilai, mitos dan kepercayaan yang dianut dari budaya organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari lingkungan para aparat berdasarkan visi, misi *sauyunan, sareundeuk saigel, sabobot sapihanean*, karakteristik identitas yang teguh akan etiket *kabaheulaan,* simbol *uniform solontong,* keikhlasan bersandarkan Islamik yang melibatkan mental dan emosional aparat, sarana dan prasarana, kondisi dari psikologi birokrat dalam sistem tugas-tugas dan arah yang ditetapkan, mengikutsertaan pengambilan keputusan percepatan pencapaian tujuan, kesepakatan struktur organisasi bekerja yang kompleks bukan pencapaian harapan semata sehingga mendorong dengan kuat tercapainya keluwesan beradaptasi, kepuasan, produktivitas, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya Kabupaten Sumedang sebagai daerah wisata belanja dan wisata jiarah, serta *Puser Budaya Pasundan hal ini* menunjukan bahwa budaya organisasi dan perilaku birokrasi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas organisasi. Penelitian ini menunjukan adanya penegasan dan memperkuat konsep kolaborasi budaya organisasi dan perilaku birokrasi terhadap efektifitas organisasi serta perlunya dilakukan penelitian lanjutan tentang belum optimalnya pengaruh budaya organisasi dan perilaku birokrasi terhadap efektivitas organisasi.

Berdasarkan persoalan diatas maka selanjutnya dikaji ulang dengan berbagai literatur, tempat dan kondisi era globalisasi,era digital dan seperti pandemi saat ini maka melahirkan berbagai model komunikasi birokrasi sebagai bagian trasforamsi nilai-nilai kearifan lokal yang berkolaborasi dengan budaya organisasi, perilaku birokrasi untuk mendukung bagaimana efektivital

organisasiatau pemerintah lebih efektif.

Sejak merebaknya Covid-19 di Wuhan pada awal tahun 2020, kehebohan mulai menyeruak secara berangsur yang bahkan menjangkau seluruh dunia. Kehebohan ini dipicu oleh banyaknya jumlah korban dalam waktu relatif singkat disertai kegamangan semua pihak menghadapi Covid-19. Berbagai negara kemudian mulai menerapkan Protokol Covid-19 sesuai dengan anjuran World Health Organization (WHO), mulai dari cuci tangan, tidak berkumpul/melakukan pertemuan, menjaga jarak, membatasi keluar rumah bahkan dilakukan langkah isolasi mulai isolasi mandiri perorangan, komunitas, bahkan seluruh kota (mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB sampai lock down). Akibat dari kondisi tersebut banyak kantor baik pemerintah maupun swasta yang kemudian menerapkan skema bekerja dari rumah (*Working from Home*/WFH). Skema WFH merupakan bagian dari konsep telecommuting (bekerja jarak jauh)2 , yang sebenarnya bukan hal baru dalam dunia kerja dan perencanaan kota, bahkan telah dikenal sejak tahun 1970-an sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan lalulintas dari perjalanan rumah-kantor pulang-pergi setiap hari. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diberlakukan dalam kondisi normal dan bukan karena adanya pandemi seperti sekarang ini. Sampai saat itu dan bahkan ditengarai dapat menjadi bagian dari tatanan baru (new normal) dari kehidupan keseharian di Indonesia sehingga penerapan telecommuting menjadi suatu keniscayaan. Mengantisipasi kondisi ini, bagaimana upaya memberikan gambaran tentang konsep telecommuting (bekerja jarak jauh) atau *working from home*/WFH (bekerja dari rumah) berikut pembelajarannya, disertai langkah yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Agar kemudian

penerapannya dalam jangka panjang dapat lebih optimal ketika semua dapat memahami, mengantisipasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap konsep ini.

Adanya kebijakan di era pandemi mendorong birokrasi untuk menciptakan dan menjalankan administrasi sesuai dengan kondisi pandemi. Perwujudan administrasi publik dalam praktek mengacu pada pandangan para pakar. Lynn dan Stein (2000) mengakui bahwa paradigma birokrasi secara rutin menjadi atribut literatur administrasi publik tradisional. Sementara itu, Jenei dan Witte (2000) menyatakan bahwa satu dari tiga bentuk reformasi birokrasi adalah penyesuaian organisasi dan perilaku birokrasi dengan kebijakan multi-nasional dan lingkungan administrasi publik. Pada bagian lain, Jenei dan Witte menyatakan bahwa teori umum birokrasi dapat diterapkan pada berbagai bentuk organisasi baik organisasi publik maupun organisasi bisnis. Jenei dan Witte melihat tiga areal penting reformasi birokrasi yang terkait dengan tiga tantangan umum yang mempengaruhi sistem birokrasi pada negara demokrasi yang akan tumbuh, yakni: (1) modernisasi birokrasi, (2) adaptasi birokrasi terhadap sistem demokrasi, dan (3) adaptasi organisasi dan perilaku birokrasi terhadap kebijakan multi- nasional dan lingkungan administrasi, termasuk administrasi publik. Berdasarkan pandangan para pakar tersebut tepat pemahaman Kasim (1993) bahwa administrasi atau birokrasi pemerintahan lebih sempit dari administrasi publik.

Perkembangan administrasi publik dalam wujud birokrasi (pemerintahan) pada awal abad ke-20 ditandai dengan tulisan Max Weber yang membedakan dua konsep birokrasi. Pertama, birokrasi patrimonial yang berfungsi berdasarkan nilai tradisional yang tidak memisahkan antara tugas, wewenang dan tanggung jawab resmi kedinasan dengan urusan pribadi pejabat

yang mengelola birokrasi. Kedua, birokrasi modern yang mempunyai ciri-ciri seperti spesialisasi, berdasarkan pada hukum dan pemisahan antara urusan pribadi pejabat dan urusan organisasi. Weber mengidentifikasi ciri birokrasi modern dalam bentuk yang ideal dan menyebut birokrasi tersebut sebagai birokrasi rasional dan berdasarkan hukum (baca Kasim, 1993). *Rational legal bureaucracy* menurut Weber memiliki ciri-ciri seperti: adanya pengaturan terhadap tugas pejabat (birokrat) agar bersifat impersonal, dalam arti kata, pejabat harus memberi perlakukan sama terhadap anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan tanpa membedakan status sosialnya; adanya kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat; penerimaan pegawai berdasarkan kriteria profesional; penempatan pegawai berdasarkan posisi dan hirarki; setiap pejabat hanya memegang satu jabatan utama; adanya jenjang karir dan kenaikan pangkat berdasarkan senioritas, sistem merit dan penilaian atasan langsung; adanya pembedaan antara kepentingan dinas dan sumber daya yang melekat padanya dengan kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan; serta para pejabat harus tunduk kepada sistem disiplin dan pengawasan yang berlaku. Latar belakang persoalan ini di Indonesia mengharuskan Birokrat mampu menempatkan posisinya dalam masyarakat dengan bergabagai keadaan sesuai dengan fungsi dan tugas serta kedudukannya serta dituntut luwes dalam menjalankannya dengan berbagai perubahan fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun dan dari sebuah persoalan ke persoalan lainnya. Adanya kondisi dari Globalisasi,Digital atau revolusi Industri 4.0, masa pandemi bahkan revolusi industri 5.0 yang akan dan sedang mengintai mengharuskan birokrat untuk terus mampu menyampaiakan sebuah program,kebijakan kepada masyarakat dengan tepat,cepet dan benar serta melibatkan kearifan

lokal sebagai bagian dari keberadaan nilai-nilai yang dianut sebuah masyrakat sebagai alat/tools bagaiman masyarakat dapat dengan mudah menerima dari program maupun kebijakan masyarakat secara nasional, regional bahkan internasional melalui komunikasi birokrat sehingga efektivitas organisasi dapat tercapai.

B. Konsep dan pengertian Perilaku Birokrasi

Birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administratif yang besar, dengan cara mengoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis atau teratur (Muhammad, 2018). Adapun perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya sedangkan perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi (Thoha, 2005).

Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Hal itu dalam suatu negara sangat penting dan menentukan dalam upaya penyelenggaraan Negara maupun penyelenggaraan Pemerintahaan. Birokrasi ibarat mesin paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahaan sehingga apabila tejadi kemacetan atau kerusakan maka dapat dibayangkan bahwa pemerintah itu sendiri akan berjalan secara pincang dan mogok atau bahkan berhenti dalam menyelenggarakan pemerintahaan. Kelambanan dalam pelayanan masyarakat, memiliki sistem manajemen yang buruk terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme serta permasalahan lainnya dalam tubuh birokrasi Indonesia. Risnawan Wawan (2018).

Pemerintahan Secara etimologis kata pemerintahan diambil dari kata pemerintah. Menurut **Pamudji (1985:22)** kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang mengandung makna menyuruh, melaksanakan, dan melalukan sesuatu pekerjaan.

Menurut **Herman C.F. Strong** (1960:6) menyatakan bahwa *Government is, therefore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloguially use it today, when... government, in the broader snese is charged with the maintenance of the peace and security of the state within an without.* Pemerintahan sebagai organisasi yang memiliki hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau kekuasaan tertinggi dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada sesuatu kementrian yang diberi tanggung jawab memelihara perdamaian dan keamanan negara.

Menurut H.A. Braasz dalam bukunya menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah *ilmu yang mempelajari tentang cara-cara bagaimana lembaga-lembaga dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik internal maupun eksternal, terhadap para warganya.* Pemerintah atau organisasi memiliki perilaku yang tepat dalam memebrikan pelayanan pada masyarakat. Perilaku birokrat dapat berkolaborasi dengan budaya organisasi merupakan suatu usaha yang baik dalam mengefektifkan organisasi.

Perilaku birokrasi Konsep perilaku semakin mendapat perhatian serius dari para ahli administrasi seiring dengan kesadaran akan pentingnya aspek manusia bagi suatu organisasi. Berkaitan dengan pandangan di atas, Zamroni (1992:154) mengemukakan sebuah pengertian tentang perilaku sebagai berikut:

Perilaku adalah fungsi sikap, perilaku erat kaitannya dengan niat, sedangkan niat akan ditentukan oleh sikap dan norma

subyektif. Niat seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh dua hal, *pertama* sesuatu yang datang dari dalam dirinya yaitu sikap; *kedua* sesuatu yang datang dari luar yakni persepsi tentang pendapat orang lain terhadap dirinya dalam kaitan dengan perilaku yang diperbincangkan.

Perilaku dipandang sebagai aktivitas yang hidup bagi kepentingan organisasi atau pemerintah. Kemudian pengertian perilaku birokrasi pemerintah menurut Ndraha dalam Alamsyah (2004:50), yaitu; **"Perilaku Birokrasi Pemerintah adalah menempatkan pegawai sebagai konsumen produk-produk pemerintah yang bekerja dengan penuh ketaatan, ketekunan kerja, pertanggungjawaban, kepuasan dan kedisiplinan**". Pendapat tersebut mencerminkan bahwa perilaku birokrasi merupakan produk kegiatan yang diinginkan rakyat untuk menuju pemerintah yang *good governance* tampak bahwa perilaku dapat berwujud perubahan baik kepada lembaga maupun berdampak pada kepentingan sosial masyarakat, sehingga memberi makna bagi perubahan secara keseluruhan. Thoha (1988:187) mengatakan bahwa **"jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi tersebut, akan timbulah perilaku birokrasi"**. Scott dalam Immanuel (2006: 65) bahwa:

Perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: persepsi, pembentukan pola laku dan komunikasi *(perseption, attitude formation and motvation).* Persepsi mendorong proses kategorisasi, kelakuan yang merupakan tanggapan awal *(predeposition*) untuk merespon dengan cara yang disukai atau tidak disukai orang lain dan merupakan proses internal dalam diri seseorang, sedangkan motivasi adalah penyebab yang mendorong individu untuk beraksi terhadap situasi tertentu.

Pandangan di atas, memberi penjelasan bahwa perilaku

individu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk perilaku yang ditunjukkan melalui komunikasi dengan orang di lingkungan kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut Siagian (1994: 91) mengatakan bahwa **"Dalam lingkungan pemerintahan, perilaku birokrasi yang diperani oleh aktor mendapat pengaruh lain, yaitu karakteristik masyarakat Konsumer produk-produk pemerintahan".** Perilaku birokrasi yang terukur dalam kompetensi birokrat tersebut sebagai hasil kaitan antara yang terdapat dalam perilaku individu sendiri dengan konteks sosial yang membentuk output tindakan birokrat tersebut yang memiliki makna atau *value.* Perilaku manusia yang merupakan interaksi dari tindakan birokrasi sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas organisasi. Beberapa pandangan tentang bagaimana perilaku memiliki karakteristik tentang komunikasi. Komunikasi harus dibangun oleh birokrasi sebagai bagian dari perilaku birokrasi atau pemerintahan. Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan mengenai komunikasi pemerintah. Pengantar Memasukin Paradigma Komunikasi Pemerintahan Tujuan mempelajari komunikasi pemerintahan adalah agar dapat memahami dan mengaplikasikan teori-teori komunikasi dan teori-teori pemerintahan sehingga memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam keseluruhan proses-proses penylenggaraan pemerintahan.

1. Komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu filsafat. Plato sebagai filosof menyatakan bahwa kebenaran sebagai realitas yang sesungguhnya, seharusnya pararel, dan mengikuti kenyataan. Artinya, ketika menafsirkan makna komunikasi dan pemerintahan itu secara benar dan tepat sebagai mana pengertian yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya maka tidak akan terjadi anomali dalam penyelenggaraan

pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan, kecerdasan, dan melindungi seluruh bangsa Indonesia.

2. Komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu politik
   Penetapan suatu kebijakan pemerintah akan dapat memberi inspirasi paradigma baru bahwa komunikasi pemerintahan dipandang sebagai pengembangan terapan dari ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu manajemen dan ilmu sosial serta psikologi terapan.
3. Komunikasi pemerintahan sebagai cabang ilmu administrasi negara
   Komunikasi pemerintahan erat sekali dengan ilmu kepemimpinan sebagai usaha menggerakan orang lain untuk tugas-tugas pemerintahan, maka kepemimpinan yang disepakati adalah kepemimpinan yang komunikatif dan memiliki *empativeness* serta *responsiveness* sebagai inti dari ilmu manajemen dan ilmu administrasi sehingga semakin mempererat keterkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut.

C. Konsep Komunikasi

Salah satu fungsi primer dalam administrasi adalah komunikasi.Nawawi (1994) Komunikasi awalnya merupakan sebuah bentuk kegiatan sehingga menjadi proses antar manusia dengan segala perbedaan,keunikannya dan berkembang dinamis dan cepat berubah sesuai dengan kondisi. Komunikasi pada akhirnya akan membentuk sebuah pola atau model yang dapat dijadikan acuan perilaku birokrasi dalam menjalankan tugasnya melayani kepentingan masyarakat sehingga organisasi lebih efektif

Komunikasi Menurut Hovlan (1973) bahwa ... *"Communication is the process by which an individual tranmits stimuli usually verbal symbols to modify the behaviour of other individuals.."* dengan demikian bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara terus menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain). Sementara itu, Kincaid, mengemukakan bahwa "komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi" (1977:7). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Siporin (1975:165), bahwa "komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi".

Pernyataan tersebut di atas mengindikasikan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan antar manusia mengenai isi pikiran dan perasaannya. Penyampaian isi pikiran dan atau perasaan oleh seseorang disebut "komunikator" dan isi pikiran atau perasaan yang disampaikan itu disebut sebagai "pesan", sedangkan yang menerima pesan disebut sebagai "komunikan".

Komunikasi memiliki proses. Proses komunikasi ada tiga, yaitu:

1. Komunikasi Vertikal adalah komunikasi di mana arus informasi dalam organisasi mengalir dari superior ke supervisor hingga ke subordinasi atau dari orang pada jejang hierarki paling tinggi ke jenjang paling bawah.
2. Komunikasi Horizontal adalah proses komunikasi yang menunjukkan arus informasi di antara orang-orang sejawat

(*peers)* pada tingkat hierarki yang sama dalam organisasi.

3. Komunikasi Diagonal adalah proses komunikasi di mana arus informasi mengalir di antara orang pada tingkat hierarki organisasi yang tidak sama, atau interaksi antar departemen.

Proses berpikir sebagai dasar komunikasi pemerintahan adalah diawali dengan proses berpikir secara logis, analitis, rasional dan komprehensif. Proses berpikir adalah suatu keharusan atau keniscayaan menjadi dasar komunikasi pemerintahan agar ide-ide, program dan rencana dapat berjalan efektif. Hal ini diakui oleh Kant yang menyatakan bahwa di samping pengalaman dan pengetahuan berdasarkan rangsangan ada juga pengetahuan a apriori, yaitu pengetahuan yang oleh Locke disebut sebagai intuisi. Komunikasi menjadi sangat penting bagi pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan utama pemerintahan yaitu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Untuk itu agar tujuan pemerintah tersebut dapat terwujud dengan baik maka diperlukan komunikasi yang efektif. Dan komunikasi pemerintahan yang efektif dapat dicapai ketika semua aparatur pemerintahan memiliki perhatian terhadap apa yang disebut dengan 4C, yaitu:

1. *Consistency*, yakni sikap konsisten yang mencerminkan keteguhan dan kepastian dalam mewujudkan tujuan.
2. *Claryteness*, yaitu sikap yang transparan atau keterbukaan dalam melaksanakan segala-galanya dengan penuh kesadaran dan ikhlas terkait dengan:
   a. tujuan Pemerintahan (di dalamnya ada program kerja);

b. cara yang ditetapkan dalam mencapai tujuan;
c. memahami dan mampu beradaptasi dengan suasana, atau moral kerja organisasi pemerintahan;
d. memahami perilaku dan keinginan aparatur, masyarakat dan privat;
e. mengetahui sikap, perilaku dan perasaan serta kultur bawahannya (termasuk masyarakat yang dipimpinnya).

3. *Correctness*, yaitu sikap yang jernih dan teliti. Memiliki kecermatan dan kesediaan untuk dikoreksi, bahkan siap untuk disalahkan atau mungkin dihujat khususnya terkait dengan permasalahan hubungan antara pekerjaan, kebutuhan dan harapan serta kesulitan yang dihadapi.
4. *Completeness*, yaitu sikap yang komprehensif, holistic dalam merumuskan dan menjelaskan tentang apa yang telah dicapai, yang belum tercapai dan yang gagal.

Kemudian lebih lanjut terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam komunikasi pemerintahan yang dianggap potensial demi kelancaran dan efektivitas komunikasi pemerintahan yaitu:

1. Komunikasi atasan dengan bawahan;
2. Komunikasi ke bawah;
3. Persepsi atasan mengenai komunikasi dengan bawahan;
4. Komunikasi ke atas;
5. Keandalan informasi.

Dengan berjalannya komunikasi yang efektif dan baik maka ide-ide, atau gagasan yang ada pada aparatur negara dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang berkaitan, dan jika komunikasi yang terjalin sudah baik maka

pelayanan yang diberikan pemerintah pada masyarakat pun akan baik juga.

Untuk membuat komunikasi berjalan baik maka harus ada upaya dari pemerintah bersama masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, antara lain yaitu:

1. Adanya kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pesan yang disampaikan merupakan pemecahan masalah yang sedang dihadapi.
3. Pemerintah merupakan sumber yang dipercaya dan masyarakat sebagai pemakai atau penerima layanan (*stakeholders)*, artinya pemerintah dianggap kelompok yang memiliki kredibilitas.
4. Adanya keterbukaan dan kebersamaan pada setiap level

Dalam ilmu administrasi bahwa komunikasi memiliki pengertian yaitu komunikatif/ berkomunikasi artinya pegawai sebaiknya dengan cepat memahami keinginan masyarakat. Selain itu, pegawai harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Komunikasi bisa dapat membuat masyarakat senang sehingga jika masyarakat mempunyai masalah tentang dokumen kependudukan, masyarakat tidak khawatir mengemukakannya kepada pegawai. Mampu berkomunikasi dengan baik juga akan membuat setiap permasalahan menjadi jelas sehingga tidak timbul salah paham.

Paradigma Komunikasi Pemerintahan adalah pemikiran-pemikiran komunikasi pemerintahan ke arah berjalannya fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, menyusun rencana, menyeleksi, memimpin, memotivasi, dan menciptakan

iklim komunikatif menuju tingkat kesejahteraan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

D. Konsep Model Komunikasi

Setiap orang membutuhkan informasi baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia (Henri Subagio dkk, 2009). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, dan memiliki, serta menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dasar dan pertimbangan itu pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Bentuk pemberian pelayanan publik, pemerintah harus dapat

menjadi pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Keterbukaan informasi publik memang merupakan hal yang sangat penting dalam penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala sesuatu tentang pemerintahan.

Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bias memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah.

1. Pelayanan Informasi kepada masyarakat oleh Sektor Publik mutlak diberikan dan disediakan organisasi publik/ pemerintah karena merupakan kewajiban yang telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F dan No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Dalam pelaksanaannya, organisasi publik sudah melaksanakan kewajibannya dalam pemberian informasi kepada publik, tetapi masih belum mengikuti Standar pelayanan operasional

dan masih banyak kelemahan-kelemahan;

3. Beberapa lembaga publik termasuk pemerintah daerah memanfaatkan *website* sebagai sarana untuk melaksanakan tugas pemberian informasi kepada masyarakat sekaligus sebagai sarana *Publik relation;*
4. Manajemen pelayanan informasi kepada publik perlu diterapkan agar tujuannya untuk memberi manfaat kepada masyarakat bias tercapai dengan efektif dan efisien, dan peran serta aktif masyarakat selaku pengguna sangat diperlukan agar tercipta *good governance* di dalam organisasi public

Proses berpikir sebagai dasar komunikasi pemerintahan. Pemerintah dikatakan berkomunikasi secara logis apabila:

1. Berpikir, mulai dari mengingat, memahami, menganalisis sampai pada pemuncakan masalah,
2. Mampu memberikan argumentasi lengkap dengan bukti dan tidak bertentangan dengan pendapat umum,
3. Memilih, memilah dan menetapkan opsi atau alternatif untuk pengambilan keputusan,
4. Menyusun rencana kegiatan apa yang akan dilakukan
5. Melaksanakan program yang telah diterapkan,
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur hasil kerja yang telah dicapai.

Berkomunikasi secara logis harus direncanakan dengan pertimbangan (meningkat) situasi, waktu, tempat dan khalayak pendengar. Untuk melakukan komunikasi secara logis, dapat

diawali dengan merangkai fakta yang dimiliki dengan penggunaan dan penyusunan kata-kata secara tepat dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang bekembang.

Proses berpikir sebagaimana dasar komunikasi pemerintahan merupakan suatu keniscayaan, agar ide-ide, program, dan rencana dapat berjalan efektif. Proses berpikir merupakan dasar komunikasi pemerintahan yang dapat memberi inspirasi pengembangan wawasan pengetahuan untuk menjembatani berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan ke arah pencapaian kepentingan masyarakat. Pemikiran yang tajam dan pengorganisasian yang tepat dalam bentuk ruang dan waktu akan melahirkan isi pikiran yang cemerlang. Dampak salah komunikasi (*miscommunication*) terhadap penyelnggaraan pemerintahan adalah pemerintahan tidak akan berjalan dengan lancar karena komunikasi tidak berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi semua lapisan masyarakat, tidak akan tercapai.

Fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintah bukan semata-mata melayani dirinya sendiri, tetapi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembabgkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Rasyid (1998:139) dan Spriegel berpendapat bahwa dengan mempertinggi frekuensi dan intensitas komunikasi akan dapat menghindari dan mengurangi ketidakharmonisan dalam berkomunikasi sehingga tujuan komunikasiyang pada dasarnya mempengaruhi persepsi penerima pesan untuk bertindak sesuai dengan harapan komunikator diharapkan dapat terwujud.

Pada akhirnya komunikasi pemerintahan yang efektif akan dapat dicapai ketika semua aparatur pemerintahan memiliki perhatian terhadap apa yang disebut dengan 4C, yaitu sebagai

berikut.

1. *Consistency*, yakni sikap konsisten yang mencermikan keteguhan dan kepastian dalam mewujudkan tujuan.
2. *Claryteness*, yaitu sikap yang transparan atau keterbukaan dalam melaksanakan segala-galanya dengan penuh kesadaran dan ikhlas
3. *Correctness*, yaitu sikap yang jernih dan teliti.
4. *Completeness*, yaitu sikap yang komprehensif, *holistic*, dalam merumuskan dan menjelaskan tentang apa yang telah dicapai, yang belum tercapai dan yang gagal.

Untuk bagaimana komunikasi dapat tepat dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat ,maka sebaiknya ada model komunikasi yang dibuat oleh pemerintah. Berbagai kondisi seperti adanya globalisasi,Asia Future Shock di abad 21, era digital dengan revolusi Industri 4.0, masa pandemi covid -19 serta akan menghadapi Revolusi industri 5.0 sudah barang tentu akan berbeda kebutuhan,kondisi dan berbeda pula model yang dipakai pemerintah dalam berkonumunikasi.

Model pendekatan komunikasi pemerintahan dapat diamati dari tiga komponen utama, yaitu:

A. Struktur
B. Prosedur
C. Kultur

Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara

satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Suatu model merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam "dunia nyata".atau Model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai symbol.brainly.co.id/tugas/33526830 Model Komunikasi merupakan sebuah model konseptual yang menjelaskan mengenai proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi tersebut dengan menggunakan berbagai simbol bisa melalui berbagai model komunikasi

Fungsi Model Komunikasi.

Menurut Gardon Wiseman & Barker, ada tiga fungsi model komunikasi:

1. Melukiskan proses komunikasi.
2. Menunjukkan hubungan visual.
3. Membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi.

Deutsch (1966) menyebutkan empat fungsi model:

1. Organizing functon: mengorganisasikan suatu hal dengan mengurutkan serta mengkaitkan satu bagian/sistem dengan bagian lain sehingga mendapat gambaran menyeluruh.
2. Explaining: membantu menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian sederhana.
3. To predict: sebuah model memungkinkan kita untuk memprediksi outcome, akibat, yang akan dicapai dari suatu peristiwa.
4. Heuristic: melalui model akan mengetahu hal secara

keseluruhan dari gambaran komponen pokok dari sebuah proses atau sistem

Apabila bicara tentang model komunikasi pemerintah tidak akan terlepas dari grand design komunikasi pemerintahan. Grand Design Komunikasi Pemerintahan dibuat bersandar pada beberapa dimensi. Adapun dimensi dari gran desain , yaitu :

1. Dimensi Filosofis

a. Berpikir filsafat adalah merenung dalam rangka mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, guna menemukan hakikatnya, dan menerbitkan serta mengatur semua pengetahuan secara sistematis.

b. Louis O. Kattsoff dalam bukunya yang berjudul *Elements of Philosophy*, mengemukakan bahwa "kegiatan filosofis merupakan perenungan terhadap suatu pemikiran yang meliputi segala sesuatu yang diragukan atau segala sesuatu yang belum diyakini kebenarannya". Dan kegiatan tersebut dikatakan sebagai aktivitas dalam dimensi filosofis.

c. Dimensi filosofis dapat dimaknai sebagai salah satu *grand design* komunikasi pemerintahan karena dengan dimensi filosofis berusaha menjelaskan tentang keberadaan manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi yang diberi akal berkemampuan menggali dan menemukan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan kehidupan yang lebih baik, adil, daman, dan sejahtera. Manusai yang dimaksud dalam dimensi ini adalah manusia aparatur pemerintah

sebagai pengawal jalan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan sekaligus menjalankan amanah sebagai pemberi pelayanan tanpa menarik keuntungan sepihak. Oleh sebab itu, komunikasi pemerintahan ditinjau dari dimensi filosofis menjadi suatu telaahan mendalam bagaimana fungsi-fungsi tersbeut (fungsi regulasi dan fungsi pelayanan) dapat berjalan sesuai tuntutan zaman dan kebutuhan *stakeholders*.

2. Dimensi Agama

a. Komunikasi pemerintah ditinjau dari dimensi agama mencakup pola-pola komunikasi religius tetapi tidak sama dengan komunikasi islam karena komunikasi religius meliputi semua agamasedangkan komunikasi agama adalah sistem koumnikasi umat beragama.

b. Gambaran makro dari pemahaman komunikasi pemerintah ditinjau dari dimensi agama dinyatakan sebagai proses penyampaian pesan antar manusia yang mendasarkan titik tolaknya dari ketentuan agama. Pengertian itu mengarah pada cara komunikasi pemerintahan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

c. Bentuk komunikasi vertikal ditinjau dari dimensi agama adalah komunikasi manusia kepada Maha pencipta yang dapat diamati melalui cara manusia beribadah sesuai agama yang dianutnya. Sedangkan komunikasi horizontal adalah bentuk komunikasi sesama manusia yang dapat diamati dari cara menyampaikan pesan, reaksi, persepsi, perubahan sikap yang muncul serta umpan balik yang terjadi.

Rancangan makro (*grand design*) komunikasi pemerintah, diawali dari kupasan dari dimensi filosofis kemudian masuk kepada dimensi agama. Ketika setiap aparatur pemerintah berkemampuan mengkomunikasikan secara jernih, jelas, tuntas dan bertanggung jawab setiap program kerja termasuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh lapisan masyarakat diyakini pesan melalui amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni;

1) Melindungi seluruh bangsa
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3) Mencerdaskan
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan, saat itu mulai menunjukkan titik terang.

3. Dimensi Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya pemerintah terbentuk menurut proses, fungsi dan siklus manajemen. Budaya pemerintahan yang diharapkan (*budaya output*) dibentuk dari budaya (*nilai dan vehicle*) *input* sebagai bahan baku, melalui proses budaya yang meliputi kontak nilai, seleksi nilai, pelembagaan nilai, aktualisasi (penanaman nilai dan pernyataan nilai melalui *vehicles*) budaya, kontrol budaya, perubahan budaya dan pewarisan budaya.

Taliziduhu Ndraha dalam teori budaya organisasi (1999) menyatakan bahwa "*budaya menunjukkan bagimana suatu nilai dinyatakan dengan menggunakan suatu cara atau alat berulang-*

ulang sebagai tanda perkalian, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dirasakan atau diamati" budaya pemerintahan menunjukkan bagaimana yang diperintah menilai dan bertindak terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlaku dan menyatakannya dengan menggunakan cara-cara atau simbol-simbol, berulang-ulang, sehingga nilai tersebut dapat diamati atau dirasakan juga oleh orang lain atau lingkungan.

4. Dimensi Politis

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, yakni negara dalam keadaan bergerak. Selain dari pada itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas. Sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara, di samping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekan, pendapat umum peranan partai politik dan keberadaan pemilihan umum.

Manfaat mempelajari dan membahas dimensi politik dalam komunikasi pemerintahan antara lain adalah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki keterkaitan erat dengan sisi kehidupan lainnya.

Pada kajian komunikasi pemerintahan dari dimensi politik, posisi pemerintah dipandang sebagai suatu sistem pembuatan keputusan yang didasarkan pada arus informasi. Hal demikian tampak ketika berusaha memahami beberapa konsep penting dari teori yang terkait yakni dari konsep yang ada kaitannya dengan (1) bangun (struktur) kerja; (2)

konsep yang memusatkan perhatian pada arus dan proses S.P. Varma,(1999:371).

Model komunikasi terdiri dari berbagai jenis model, tiga diantaranya yakni model komunikasi linear, model komunikasi interaksional, dan model komunikasi transaksional. Berikut penjelasan terkait ketiga model komunikasi tersebut,yaitu ;

a. Model Komunikasi Linear adalah model komunikasi yang terbilang sederhana yang menggambarkan model komunikasi dengan satu arah. Dalam model komunikasi ini, tidak ada umpan balik dari si penerima pesan karena penerima pesan bersifat pasif. Model komunikasi yang merujuk pada model ini diantaranya, model komunikasi Lasswell, Shannon and Weaver, Aristoteles, dan model komunikasi SMCR Berlo.
b. Model komunikasi Transaksional merupakan model komunikasi yang berlangsung dua arah yang menekankan pentingnya peranan dari pengirim dan penerima pesan. Model komunikasi ini tidak hanya bertukar pesan, melainkan juga untuk membangun sebuah hubungan. Model komunikasi Barnlund merupakan salah satu model komunikasi yang sesuai dengan model ini.
c. Model Komunikasi Interaksional adalah model komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Umumnya model ini digunakan dalam media seperti internet, ataupun media komunikasi modern saat ini. Model Osgood dan Schramm merupakan model komunikasi yang sesuai dengan model ini.

Beberapa model komunikasi tersebut di atas dapat dijelaskan dengan konsep

Materi tentang model komunikasi menurut Aristoteles, brainly.co.id/tugas/4684906

Ini adalah Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. (komunikasi publik (*public speaking*) atau pidato) Model Komunikasi ini pada dasarnya adalah model Komunikasi paling Kelasik (Retoris). Model Komunikasi Sederhana Menurut Aristoteles dalam Model Komunikasi Menururt Aristoteles terdapat tiga unsure dasar proses komunikasi, yaitu; a. pembicara (speaker),b. pesan (message) dan c. unsure pendengar (listener). Adapun bentuk model komunikasi yaitu Pembicara--------> Pesan----------> Pendengar bentuk model ini adalah bentuk model komunikasi yang langsung dari pembicara ke pendengar tanpa menggunakan berbagai media.

2. Materi tentang model komunikasi, brainly.co.id/tugas/1059759

   a. Model S-R (Stimulus – Respon)
   b. Model Interaksional
   c. Model Ariestoteles (retoris)
   d. Model Komunikasi Shannon and Weaver https://osf.io

Teori komunikasi Harold Lasswell merupakan teori komunikasi awal (1948).

Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk

menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, With What Effect* (Siapa Mengatakan Apa Melalui Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Efek Apa). Model komunikasi Lasswell dikelompokkan ke dalam bentuk model komunikasi linear. Dalam model komunikasi linear, komunikasi dipandang sebagai proses yang berjalan secara satu arah atau *one way communication* dimana pengirim pesan atau *sender* adalah satu-satunya elemen komunikasi yang mengirimkan pesan kepada penerima pesan. Penerima pesan digambarkan tidak memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap pesan yang dikirimkan. Sinyal pesan di- *encode* dan dikirimkan melalui media. Umumnya, model komunikasi linear diterapkan dalam konteks komunikasi massa seperti televisi, radio, dan lain-lain.

Salah satu model komunikasi yang paling tua tetapi masih digunakan orang untuk tujuan tertentu adalah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell, seorang ahli ilmu politik dari yale university. Dengan menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam melihat proses komunikasi yaitu, *who* (siapa), *says what* (apa yang dikatakan), *in which channel* (saluran komunikasi), *to whom* (kepada siapa), *with what effect* (unsur pengaruh)

Adapun penjelasan secara rinci tentang konsep model komunikasi Lasswell,yaitu :

1) Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model Lasswell ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan *who* tersebut adalah menunjuk kepada siapa yakni orang yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi suatu

persatuan.

2) Pertanyaan kedua dari model Lasswell adalah *says what* atau apa yang dikatakan, pertanyaan ini berhubungan dengan isi komunikasi atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut.
3) Pertanyaan ketiga adalah *to whom*, pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari komunikasi.
4) Pertanyaan keempat adalah *in which* channel atau melalui media apa, yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi seperti berbicara, gerakan badan, sentuhan, kontak mata, radio, televisi, surat, buku, gambar, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu.
5) Pertanyaan terakhir dari model Lasswell ini adalah *what effect* atau apa efek dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek komunikasi ini dapat menanyakan dua hal yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang dilakukan orang sebagai hasil dari komunikasi.

Merujuk pada grand desain di atas maka komunikasi pemerintah berisikan beberapa muatan dimensi yaitu:dimensi filisofis, agama,budaya dsn politis sehingga model komunikasi ataupun pola komunikasi tidak akan terlepas dari dimensi-dimensi tersebut atau salah satu dimensi yang mendominasi dari model atau pola komunikasi pemerintah tersebut.

Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya Susanto ; Ferry (2015) dengan bertujuan untuk memberikan gambaran

terkait proses komunikasi yang sedang terjadi.Konsolidasi bagi adaptasi pelayanan publik pada masa pandemi terutama bagi perilaku birokrasi, pola komunikasi dan regulasi perlu dilakukan pemerintah yang disertai dengan pengawasan seiring berjalannya dinamika perubahan yang mengikuti perkembangan situasi agar pelayanan bagi masyarakat dapat tetap berjalan dengan harmonis, baik bagi pelaku kebijakan maupun masyarakat sebagai tujuan dari pelayanan publik, karakteristik budaya berbagi yang harmonis, iklim yang mendukung, dan pemberdayaan sumber memiliki nilai korelasi tertinggi pada proses partisipasi dengan motivasi berprestasi tinggi sedangkan karakteristik budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan peluang memiliki nilai terendah pada motivasi partisipasi (Mulyaningsih, 2017) dapat melahirkan model komunikasi yang tepat.

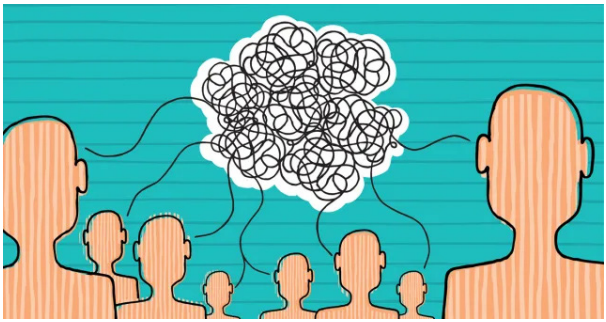
BAB II

Pendekatan Model Komunikasi Birokrat

A. Pengertian Model Komunikasi Birokrat

Pelaksanaan model komunikasi oleh birokrat merupakan sebuah keniscayaan pada masa pandemi yang sebelumnya sudah diawalai dengan berbagai persoalan dan perubahan yang terjadi dimasyarakat Indonesia yaitu dengan adanya fenomena globalisasi, revolusi indistri 4.0 dan akan dihadapi revolusi indistri 5.0 membuat birokrasi harus tetap mampu menjalankan tugasnya dalam menginformasikan berbagai kegiatan pemerintah dengan tepat,cepat,benar dan mudah diterima masyrakat. Komunikasi sebagai fungsi birokrat dalam menjalankan tugasnya membutuhkan pendekatan terhadap model komunikasi yang dijalankannya.

Konsolidasi perilaku birokrasi, pola komunikasi dan regulasi dalam pelayanan publik di masa pandemi sebagai sebuah hubungan yang holistik dalam mencapai tujuan pelayanan publik pada masyarakat. Pelayanan publik yang lebih baik melalui reformasi tergantung dari perilaku komunikasi pemimpin. Susanto, Eko Harry (2020). Aktivitas utama manusia, komunikasi **dikaji dalam berbagai aspek. Salah satunya dari sisi model. Berikut ini pengertian model** komunikasi, fungsi, dan jenis-jenisnya.



Pengertian Model Komunikasi

Model komunikasi adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya.

Menurut Sereno dan Mortensen, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi.

John Fiske (1990) menyebut ada dua mazhab utama yang tercermin dalam model komunikasi.

1. Transmisi Pesan

Mazhab pertama melihat komunikasi sebagai transmisi pesan. Mazhab ini tertarik dengan bagaimana pengirim dan penerima mengkonstruksi pesan (*encode*) dan menerjemahkannya (*decode*), dan dengan bagaimana transmiter menggunakan saluran dan media komunikasi.

Mazhab ini cenderung membahas kegagalan komunikasi dan melihat ke tahap-tahap dalam proses tersebut guna mengetahui di mana kegagalan tersebut terjadi.

2. Produksi dan pertukaran makna

Mazhab kedua melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna.

Hal ini berkenaan dengan bagaimana pesan berinteraksi dengan orang-orang dalam menghasilkan makna.

Jenis-Jenis Model Komunikasi

Banyak ahli merumuskan model komunikasi. Dari berbagai model yang telah dirumuskan, model komunikasi diklasifikasikan

ke dalam tiga jenis model, yaitu model komunikasi linear, model komunikasi transaksional, dan model komunikasi interaksional.

1. Model Komunikasi Linear

Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah.

Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan, komunikator ke komunikan.

Dalam model komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik (*feedback*). Penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan.

Model komunikasi linear di antaranya:

a. Model Komunikasi Aristoteles,
b. Model Komunikasi Lasswell,
c. Model Komunikasi SMCR Berlo,
d. Model Komunikasi Shannon dan Weaver.

2. Model Komunikasi Transaksional

Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah.

Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya.

Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan.

Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barnlund.

3. Model Komunikasi Interaksi

Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah.

Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern.

Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Schramm.

Para ahli telah mengenalkan berbagai macam model komunikasi sebagai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan proses komunikasi serta berbagai faktor yang mempengaruhi arus serta efektivitas komunikasi.

Model-Model Komunikasi

Berikut ini beberapa model komunikasi menurut para ahli yang terangkum dalam tiga jenis model komunikasi di atas.

1. Model Komunikasi Aristoteles

Model Komunikasi Aristoteles dibentuk dengan lima elemen dasar:

a. Pembicara,
b. Pidato,
c. Acara,
d. Audiens
e. Efek.

Aristoteles menyarankan pembicara untuk membangun pidato untuk audiens yang berbeda pada waktu (kesempatan) yang berbeda dan untuk efek yang berbeda.

Pembicara memainkan peran penting dalam Public Speaking. Pembicara harus mempersiapkan pidato dan analisis kebutuhan

audiens sebelum ia masuk ke panggung. Kata-katanya harus memengaruhi pikiran audiens dan membujuk pemikiran mereka terhadapnya.

Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses *public speaking*.

Model ini merupakan model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas diantara model komunikasi lainnya.

Model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik, yang sering juga disebut model retoris (*rhetorical model*).

Berdasarkan model komunikasi ini, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka.

Dalam model komunikasi ini, ada lima unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara (*speaker*), pesan (*message/speech*), pendengar (*listener/audience*), acara (*occasion*), dan aampak (*effect*).

2. Model Komunikasi Lasswell

Model Lasswell sering digunakan secara spesifik dalam komunikasi massa. Dia menegaskan, untuk memahami proses komunikasi massa kita perlu mempelajari setiap tahapan dalam modelnya.

Model komunikasi Lasswell dalam rumus *who says what in which channel to whom with what effect* memiliki lima komponen:

a. *Who* (sender) – komunikator atau pengirim atau sumber pesan.
b. *What* (message) – isi pesan.
c. *Channel* (media) – medium atau media.
d. *Whom* (receiver) – penerima pesan atau khalayak.

e. *Effect* (feedback) – umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan.

Kelima komponen tersebut seringkali dijadikan sebagai bahan analisis atau kajian untuk mengevaluasi masing-masing komponen dan proses komunikasi secara keseluruhan.

Analisis yang dilakukan terhadap kelima komponen komunikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Analisis kontrol, umumnya dilakukan untuk membantu pengirim pesan untuk memiliki seluruh kekuatan.
b. Analisis isi, umumnya dikaitkan dengan stereoptipe dan representasi perbedaan kelompok politik dan berhubungan dengan tujuan pesan yang disampaikan.
c. Analisis media, umumnya mengkaji pemilihan media yang akan digunakan untuk mencapai khalayak.
d. Analisis khalayak, umumnya mengkali siapa yang menjadi target sasaran.
e. Analisis efek, umumnya dilakukan sebelum proses dimulai dengan tujuan untuk memprediksi efek pesan terhadap target sasaran.

Model komunikasi Lasswell awalnya dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, khususnya studi tentang media propaganda.

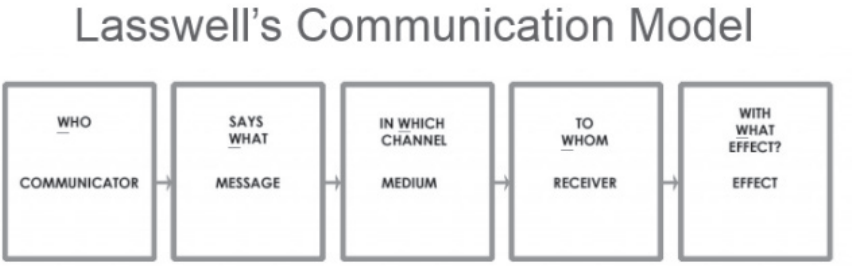
Namun, pada perkembangannya, model ini digunakan pula untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok yang menjadi sasaran diseminasi pesan.

Selain itu, Lasswell juga membawa konsep proses komunikasi yang efektif.

Menurutnya, terdapat hubungan antara penyajian fakta-fakta

dengan bagaimana fakta-fakta tersebut dapat menyebabkan efek yang berbeda.

Penggunaan konsep efek membuat model Laswell tidak seperti namanya. Hal ini dikarenakan efek dapat berperan juga sebagai umpan balik.



Model komunikasi Lasswell memiliki beberapa karakteristik:

a. Komunikasi berlangsung satu arah.
b. Tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek.
c. Tidak menyertakan umpan balik.
d. Mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi.
e. Dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional.
f. Merupakan dasar propaganda karena lebih menitikberatkan pada hasil keluaran.
g. Umumnya digunakan untuk media persuasi.

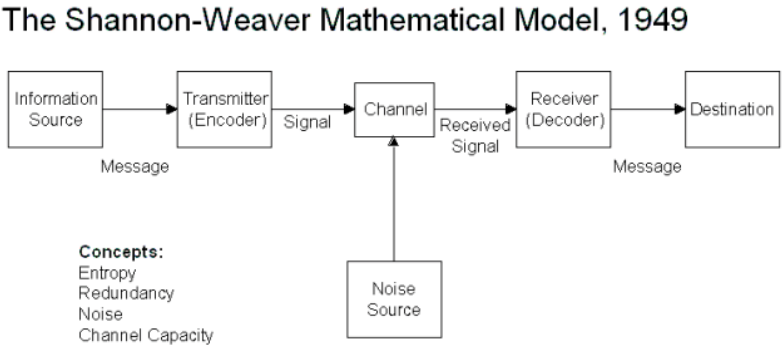
3. Model Komunikasi Shannon dan Weaver

Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver (1948) mengembangkan salah satu model komunikasi linear yang disebut dengan Model Komunikasi Shannon dan Weaver. Model Shannon

dan Weaver menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan.

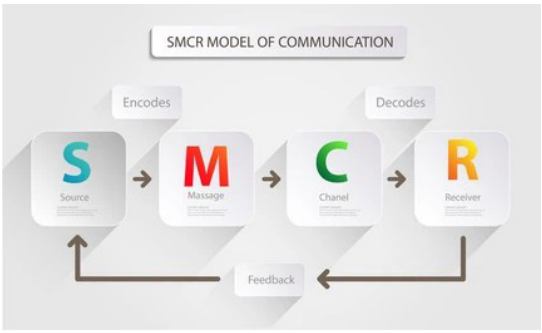
Diawali dengan pemancar (*transmiter*) yang mengubah pesan menjadi suatu sinyal, kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan pada penerima (*received*) dalam bentuk percakapan.

Model komunikasi Shannon dan Weaver dapat diterapkan dalam komunikasi antarpribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa.



4. Model Komunikasi SMCR Berlo

SMCR singkatan dari Source, Message, Channel, dan Receiver yang merupakan unsur komunikasi.



shutterstock.com · 218106457

Penemu model SMCR ini adalah David Berlo K. Salah satu mahasiswa generasi pertama di Program Doktor Komunikasi di bawah kepemimpinan Wilbur Schramm di Illinois.

Berlo merupakan penulis buku teks komunikasi yang terkenal, *The Process of Communication* (1960).

Menurut model ini, sumber dan penerima dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: kemampuan berkomunikasi, perilaku, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya.

Model komunikasi SMCR juga menitikberatkan pada proses *encoding* dan *decoding* yang terjadi sebelum pengirim mengirim pesan dan sebelum penerima menerima pesan.

Dalam model ini terdapat beberapa komponen yaitu *sender, message, channel*, dan *receiver*. Masing-masing komponen dipengaruhi oleh beberapa faktor.

1. Sender (pengirim)

Sumber pesan atau orang yang mengorganisasi pesan. Seorang pengirim pesan atau sumber pesan mengirimkan pesan kepada penerima pesan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengirim pesan dan penerima pesan, yaitu:

a. Keterampilan komunikasi – Jika pengirim pesan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, maka pesan akan lebih mudah dikomunikasikan dibandingkan dengan pengirim pesan yang tidak memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi mencakup keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan mendengarkan, dan lain-lain.
b. Sikap – Sikap yang dimiliki oleh pengirim pesan untuk menciptakan efek pesan.

c. Pengetahuan – Pengetahuan yang dimiliki oleh pengirim pesan dapat membuat pesan dapat dikomunikasikan secara lebih efektif.
d. Sistem sosial – Sistem sosial yang mencakup nilai, kepercayaan, hukum, aturan, agama dan lain-lain serta tempat dan situasi mempengaruhi cara pengirim pean dalam mengkomunikasikan pesan. Hal ini menciptakan perbedaan dalam membuat pesan.
e. Budaya – perbedaan budaya menyebabkan perbedaan dalam menyampaikan pesan.

2. Message (pesan)

Pesan adalah hal substansif yang dikirimkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan.

Pesan dapat berbentuk suara, teks, video atau lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pesan adalah:

a. Isi pesan – Merupakan sesuatu yang terdapat dalam pesan.
b. Elemen pesan – Elemen pesan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pesan nonverbal yang melekat dalam isi seperti gesture, tanda, bahasa sebagai alat komunikasi, dan lain-lain.
c. Perlakuan – Cara pesan dikirimkan kepada penerima pesan yang menimbulkan efek berupa umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan.
d. Struktur pesan – Pola pembentukan pesan dapat mempengaruhi efektivitas pesan.
e. Kode – Bentuk dimana pesan dikirimkan bisa berupa teks, video, dan lain-lain.

3. Channel (media)

Media yang digunakan untuk mengirim pesan misalnya telepon, internet sebagai media komunikasi dan lain-lain dan biasanya digunakan dalam komunikasi bermedia (media massa atau media baru).Namun, jika merujuk pada bentuk atau konteks komunikasi lain seperti misalnya komunikasi interpersonal maka media komunikasi yang dimaksud merujuk pada kelima rasa melalui panca indera yang dimiliki oleh manusia.

Kelima rasa inilah yang turut mempengaruhi arus dan efektivitas komunikasi. Kelima rasa tersebut adalah mendengarkan, melihat, menyentuh, mencium, dan merasakan.

a. Mendengar – pesan yang diterima melalui indera pendengaran.
b. Melihat – pesan yang diterima melalui indera penglihatan mencakup pesan nonverbal.
c. Menyentuh – sebagian pesan nonverbal terjadi melalui sentuhan seperti menepuk pundak.
d. Mencium – pesan yang diterima melalui indera penciuman.
e. Merasakan – pesan yang diterima melalui indera perasa.

4. Receiver (penerima)

Orang yang menerima pesan yang dikirmkan oleh pengirim pesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerima pesan sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengirim pesan, yaitu :

a. Keterampilan komunikasi – Penerima pesan yang memiliki keterampilan komunikasi (keterampilan berbicara, keetrampilan menulis, keterampilan membaca, kemampuan mendengarkan dan lain-lain) yang baik akan dapat menerima pesan dengan baik.
b. Sikap – sikap yang dimiliki oleh penerima pesan untuk

menerima pesan.

c. Pengetahuan – pengetahuan yang dimiliki oleh penerima pesan dapat membuat pesan mudah diterima dengan baik oleh penerima pesan.
d. Sistem sosial – Sistem sosial (nilai, kepercayaan, hukum, aturan, agama, dan lain-lain) mempengaruhi cara menerima pesan yang menyebabkan perbedaan dalam menerima pesan.
e. Budaya – perbedaan budaya dapat menyebabkan perbedaan dalam menerima pesan.

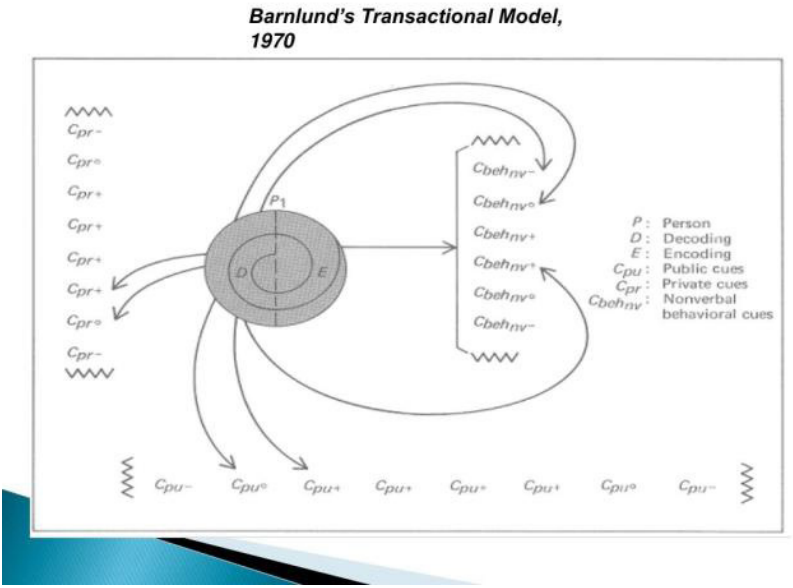
Model komunikasi SMCR Berlo memiliki beberapa karakteristik:

a. Fokus pada proses *encoding* dan *decoding*.
b. Komponen komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor.
c. Tidak adanya konsep umpan balik.
d. Efek komunikasi tidak dapat diketahui.
e. Tidak ada konsep gangguan atau noise atupun berbagai hambatan proses komunikasi lainnya,
f. Komunikasi berlangsung satu arah.
g. Baik pemberi pesan atau penerima pesan memiliki kesamaan jika dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya.

5. Model Komunikasi Barnlund

Dean C. Barnlund mengenalkan model komunikasi transaksional bagi dasar komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi tahun 1970.Model ini menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi.Model komunikasi Barnlund dikenal dengan nama Model Komunikasi Transaksional Barnlund.

Model ini merupakan respons terhadap model komunikasi linear yang bersifat statis ke model komunikasi yang bersifat dinamis dan model komunikasi dua arah.Model komunikasi transaksional Barnlund menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan.Pengirim dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang.Pesan berjalan mengambil tempat dengan umpan balik konstan yang diberikan oleh partisipan komunikasi.Umpan balik yang diberikan oleh salah satu pihak adalah pesan bagi pihak lainnya.

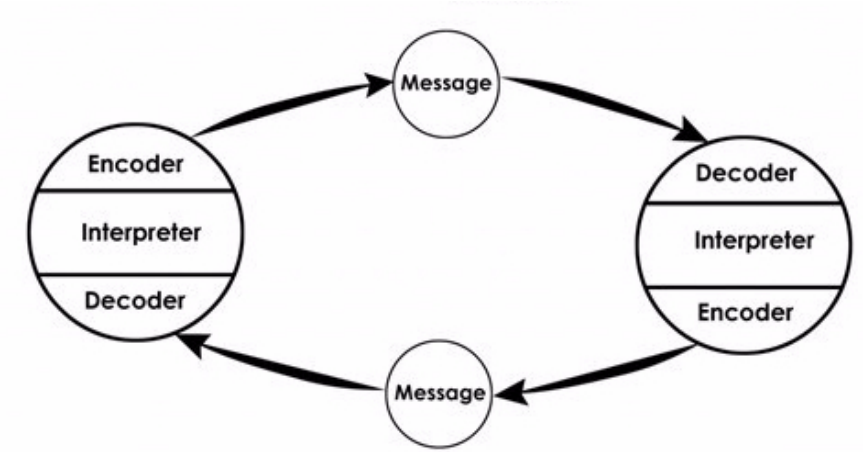


6. Model Komunikasi Osgood dan Schramm

Model proses komunikasi yang digambarkan oleh Osgood dan Schramm ini berlaku untuk bentuk-bentuk komunikasi antarpribadi.Dijelaskan bahwa proses komunikasi berjalan secara sirkuler, dimana masing-masing pelaku secara bergantian bertindak

sebagai komunikator/ sumber dan komunikan/penerima.Menurut model ini masing-masing pelaku komunikasi akan terlibat dalam proses pembentukan pesan (*encoding*), penafsiran (*interpreting*) pesan, serta penerimaan dan pemecahan kode pesan (*decoding*). Menurut model komunikasi Osgood dan Schramm, terdapat sembilan komponen dalam proses komunikasi:

a. Sender (transmitter) orang yang mengirimkan pesan.
b. Encoder – orang yang mengubah pesan ke dalam bentuk kode.
c. Decoder – orang yang mendapatkan pesan yang telah di-encode yang telah dikirimkan oleh encoder dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain.
d. Interpreter – orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisa pesan. Pesan diterima setelah interpretasi. Interpreter dan receiver adalah orang yang sama.
e. Receiver – orang yang menerima pesan yang melakukan proses decoding dan menginterpretasikan pesan-pesan aktual.
f. Message – data yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan informasi yang diterima oleh penerima pesan.
g. Feedback – proses merespon pesan yang diterima oleh penerima pesan.
h. Medium – media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan untuk mengirim pesan.
i. Noise – gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Gangguan juga dapat berupa gangguan semantic dimana terjadi perbedaan dalam pemaknaan pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan pemaknaan pesan yang diinterpretasi oleh penerima pesan.



Menurut Schramm, latar belakang individu yang terlibat dalam proses komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi. Setiap orang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta budaya yang berbeda satu sama lain. Perbedaan latar belakang ini mempengaruhi setiap individu dalam menginterpretasi pesan yang diterima.

Model komunikasi Osgood dan Schramm memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

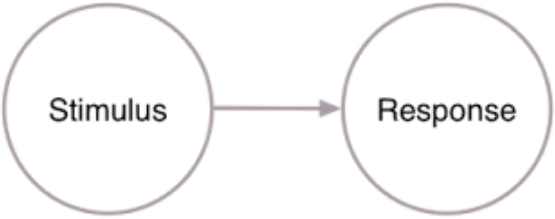
a. Fokus pada encode dan decode.
b. Komunikasi berlangsung dua arah.
c. Adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis dapat membantu untuk memahami proses komunikasi.
d. Umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat.
e. Terdapat konsep umpan balik sehingga memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan diinterpretasi dengan baik oleh penerima pesan.

f. Tidak diabaikannya konsep gangguan atau noise.
g. Penerima pesan dan pengirim pesan dapat bertukar peran dalam menyampaikan dan menerima pesan.
h. Bersifat dinamis dan berguna secara praktis.
i. Gangguan semantik atau semantic noise merupakan konsep yang dapat membantu memahami permasalah yang dapat terjadi selama pesan diinterpretasi.
    1) Konsep interpretatif membuat komunikasi menjadi efektif.
    2) Konsep konteks membuat faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam interpretasi pesan dan membuat perubahan dalam nilai pesan.
    3) Tidak sesuai atau tidak cocok untuk diterapkan dalam proses komunikasi yang sangat kompleks.
    4) Hanya terdapat dua sumber utama yang berkomunikasi.
    5) Banyaknya sumber justru akan membuat proses komunikasi mengalami komplikasi dan model komunikasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik.
    6) Dimungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pesan yang dikirimkan dan pesan yang diterima
    7) Digunakan untuk media baru
    8) Dapat menjadi model komunikasi linear jika penerima pesan tidak memberikan tanggapan.

7. Model S&R

Model komunikasi paling dasar. Sebagai pertukaran atau pemindahan informasi atau gagasan, komunikasi dianggap sebagai suatu proses aksi & reaksi yang sangat sederhana.

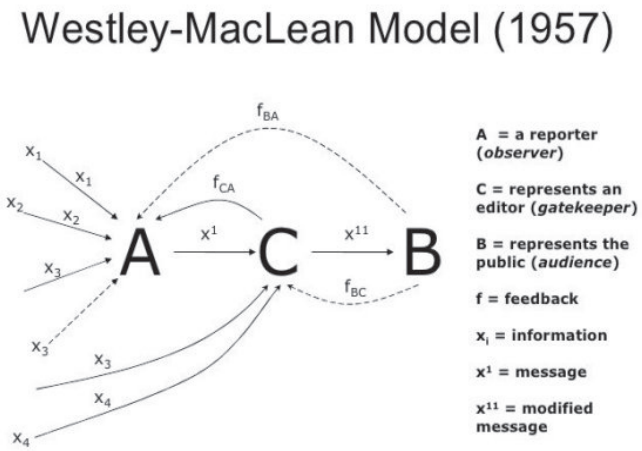
Ketika saya tersenyum pada Anda dan Anda membalas senyuman saya itulah model S&R.



Model ini mengasumsikan bahwa kata-kata, isyarat, verbal, gambar, non-verbal, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respons dengan cara tertentu.

8. Model Westley dan MacLean

Model Westley dan MacLean merupakan model perluasan dari model komunikasi Lasswell dan mode Shannon and Weaver, yaitu dengan menambahkan jumlah peristiwa, gagasan, dan objek yang tidak terbatas.



Model ini tidak membatasi pada tingkat individu, bisa juga terjadi pada aktivitas suatu kelompok atau suatu lembaga sosial, karena menurut pendapat Westley, setiap individu, kelompok, atau sistem mempunyai kebutuhan untuk mengirim dan menerima pesan sebagai sarana orientasi terhadap lingkungan.

Model ini merumuskan antara komunikasi antarpribadi dan komunikasi massa.

Konsep penting yang tercakup dalam model ini adalah memasukkan umpan balik. Perbedaan dalam umpan balik inilah yang membedakan antara komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa.Dalam komunikasi antarpribadi, umpan balik yang diterima bersifat segera, sedangkan umpan balik dalam komunikasi massa bersifat tertunda.Dalam model Westley dan MacLean ini terdapat lima unsur, yaitu: objek, orientasi, pesan, sumber, penerima dan umpan balik.

B. Pendekatan Model Komunikasi Digital

Budaya Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik akan berubah mengikuti kondisi dan kebutuhan dimana setiap pegawai harus dibiasakan dan didisiplinkan untuk melayani publik dengan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Setiap pegawai harus mengerti makna dari nilai-nilai inti; memahami cara menggunakan nilai-nilai inti; mengingat niat baik dari nilai-nilai inti; memendam nilai-nilai inti di dalam pikiran bawah sadar; serta mampu menjadikan nilai-nilai inti sebagai energi positif dalam menangani setiap harapan dan kebutuhan publik. Revolusi mental melalui pelatihan dan pencerahan secara terus- menerus wajib dilakukan. Manusia mudah lupa dan mudah kembali kepada kebiasaan

lama. Oleh karena itu, perkuat komitmen setiap individu untuk menjalankan nilai-nilai inti organisasi dengan konsisten. Perlu waktu yang panjang untuk membiasakan budaya organisasi yang kuat bekerja secara maksimal.

Setiap hari, para pemimpin wajib meluangkan waktu untuk menginternalisasikan setiap nilai inti kepada pegawai. Lakukan pertemuan rutin di semua level organisasi untuk memahamkan nilai-nilai inti organisasi; untuk memahamkan visi dan misi organisasi; untuk memahamkan sikap, perilaku, kebiasaan, reaksi, emosi, kepribadian, karakter, penampilan, gaya, cara, ekspresi, dan pola pikir yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.Setiap pegawai harus dilatih untuk memvisualisasikan pelayanan publik seperti yang diimpikan oleh instansi. Pemimpin harus bisa meyakinkan dan mengarahkan setiap individu untuk terbiasa memberikan pelayanan sesuai nilai-nilai, prosedur, sistem, prinsip, dan perilaku yang membuat publik bahagia dengan pelayanan yang mereka dapatkan.

Merawat mental, jiwa, dan emosional pegawai secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pikiran, hati nurani, dan emosional harus bekerja untuk menyelaraskan tindakan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai inti. Jadi, setiap tindakan dan perilaku pegawai harus mencerminkan nilai-nilai inti. Untuk itu, pemimpin wajib menggunakan disiplin agar dapat menegakkan nilai-nilai inti menjadi perilaku dan karakter kerja yang konsisten di lapangan. Lapangan akan selalu berubah tergantung pada beberapa kegiatan atau kondisi seperti dalam kebijakan karena dampak dari Covid-19.

Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari Covid-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Kebijakan ini merupakan langkah terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif

dan aman dari penularan Covid-19. Hampir semua lini kehidupan termasuk sektor ekonomi mengalami pelemahan yang sangat terasa. Pada fase masa transisi menuju kebiasaan baru, sektor ekonomi harus segera bangkit, seiring penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan.

Kondisi perekonomian global telah berubah secara signifikan dengan merebaknya Covid-19 di awal 2020. Perubahan ini diperlihatkan dengan menurunnya kondisi perekonomian di berbagai sektor setelah WHO menyatakan secara resmi Covid-19 sebagai pandemi. Kerugian diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 telah dirasakan oleh berbagai sektor di tanah air, dimulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata mengalami penurunan pendapatan cukup tajam.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi dan kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisasi risiko penyebaran Covid-19. Presiden mengeluarkan kebijakan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus yang diikuti oleh pejabat daerah yang mengeluarkan juga kebijakan WFH (Work from Home) dan belajar dari rumah. Strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap Pegawai agar tetap dapat berkarya secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario Covid-19 termasuk budaya organisasi.

Pelayanan Informasi di sektor publik merupakan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada publik. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah pelayanan publik. Termasuk dalam

cakupan pelayanan publik adalah penyediaan dan keterbukaan informasi ke masyarakat. Permasalahan dan pembahasan terkait penyediaan informasi di sektor publik merupakan pembahasan yang menarik.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebutuhan Informasi bahwa pelaksanaan pelayanan informasi publik banyak selama ini belum mengikuti standar pelayanan operasional informasi publik, demikian juga mekanisme dalam memperoleh informasi seperti di wilyah kehutanan belum sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Hubungan Masyarakat nomor 38 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan. Hasil kajian yang dilakukan Herma.. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain : belum adanya perencanaan anggaran untuk operasional pelaksanaan pelayanan informasi publik sehingga tidak ada proses perencanaan, pengolahan data dan informasi sebagai bahan pelayanan dan membangun sistem untuk pelaksanaan pelayanan, data dan informasi masih berada pada masing-masing bidang sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengklasifikasian data dan publikasi ke publik, dan kurangnya kegiatan yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan upaya menyampaikan informasi agar dapat diterima masyarakat, maka perhatian atas mekanisme penentuan saluran informasi menjadi sangat relevan. Dalam hal ini pemahaman tentang teknologi komunikasi agar informasi yang diterima dapat lebih cepat dan efisien mutlak dimiliki oleh lembaga Publik. Teknologi komunikasi sekarang ini semakin berkembang, dapat dilihat dari segala aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Marshall McLuhan (1964) dalam bukunya *Understanding media*

mengemukakan bahwa teknologi komunikasi memainkan peran penting dalam tatanan sosial dan budaya baru membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik. Kondisi ini akan membawa perubahan proses distribusi pesan, bentuk media baru mentransformasi pengalaman individu dan masyarakat tentang pesan media. Kemudian menjadi perpanjangan tangan manusia, media telah memperpendek pandangan, pendengaran dan sentuhan melalui ruang dan waktu. Tak heran menyadari hal ini, beberapa lembaga Publik termasuk pemerintah daerah membuat *website* sebagai media informasi Publik karena dianggap memenuhi prasyarat kecepatan penyampaian pesan ke masyarakat.

Dari kajian selanjutnya menjabarkan bahwa contoh *website* yang digunakan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bagian Humas dan Informasi sangat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan komunikasi. Bahkan *website* juga digunakan untuk menerima pengaduan-pengaduan masyarakat, sehingga Pemerintah menganggap perlu melakukan sosialisasi ke dinas dan satker untuk menerima pengaduan masyarakat. Penyampaian pesan secara informatif memang menjadi panduan Humas Pemerintah Kota Pekanbaru agar pesan yang disampaikan lebih menunjukkan inti informasi yang dapat diperoleh Publik Internal melalui media internal dan media massa. Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bina Widya Volume 4 Nomor 1 Februari 2017 tentang Pengelolaan Website Sebagai Media Informasi Publik Pada Bagian Humas dan Informasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

Proses penyampaian pesan secara informatif ini memang memiliki alasan yang kuat, menyangkut adanya aspek-aspek informasi yang terkandung dalam pesan yang diberikan. Cara penyampaian pesan ini akan berpengaruh pada adanya perilaku

pemahaman publik akan informasi yang diberikan oleh Humas dan informasi agar isi pesan yang disampaikan oleh Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada Publik disusun dengan baik. Dengan kata lain kejelasan sebuah pesan tentu sangat berpengaruh. Karena jika pesan tidak jelas akan menimbulkan kesalahan persepsi dari penerima informasi atau penerima pesan. Humas Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya untuk menyampaikan pesan dengan tepat dan efektif dengan mengupayakan berbagai cara dalam mengkomunikasikan informasi sesuai dengan data dan fakta yang ada. Humas dan Informasi Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan evaluasi dalam pengelolaan *website* sebagai media informasi publik. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat serta mempertimbangkan kembali apa-apa saja yang harus di rubah dalam sistem pengelolaan yang berkaitan dengan perangkat kerja, dan staf.

Sementara *benchmarking* atau pembandingan pada sembilan *website* pemerintah daerah yang meliputi tujuh (7) pemerintah daerah tingkat II di Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kulonprogo (DIY) dan Kota Surabaya (Provinsi Jawa Timur), menyimpulkan bahwa *website* pemda dapat dimanfaatkan sebagai sarana *Online Publik Relation*. hasil penelitian Liliek Budiastuti Wiratmo, Noor Irfan, dan Kuwatono dalam Jurnal ASPIKOM Volume 3 Nomor 2, Januari 2017 dengan menggunakan metode kualitatif .

Dalam era media baru (*new media*) *Online Publik Relation* merupakan keniscayaan dan tak dapat dihindari. Oleh karena itu setiap pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan *website* yang mereka miliki sebagai sarana mengembangkan *Online* Publik

Relation. Syarat terpenting yang harus dimiliki adalah kesadaran arti pentingnya layanan publik akan informasi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu diperlukan komitmen pimpinan daerah yang menjadi acuan seluruh SDM yang ada dalam tanggungjawabnya sebagai pelayan publik.

Setelah diketahui pelayanan informasi dan mekanisme yang digunakan dalam pelayanan informasi kepada publik telah sama-sama diketahui, lantas upaya yang dilakukan adalah memastikan proses manajemen komunikasi yang menggunakan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen komunikasi yang meliputi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ini sering kali tidak disadari bahwa manajemen komunikasi selalu diterapkan di dalam lembaga swasta ataupun pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dengan metode audit komunikasi, maka pada dasarnya Pejabat PPID Kabupaten Tuban sudah melaksanakan manajemen komunikasi. Namun, dalam segala penerapannya PPID Kabupaten Tuban masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor dari internal maupun eksternal. Manajemen komunikasi PPID dalam perencanaannya memang sudah sangat bagus dan sudah mempunyai dasar dalam penentuan setiap kebijakan perencanaan. Bahkan pengorganisasiannya juga sudah bagus dengan penempatan SDM yang sesuai bidangnya. Namun dalam pengoordinasian dan pengkomunikasian suatu perencaan masih lemah, sehingga membuat pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik kurang maksimal, sehingga membuat pengawasan PPID semakin

mendapat nilai jelek dan hasil evaluasi yang banyak tanpa disertai modifikasi. Manajemen komunikasinya dalam internal PPID Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan teori sistem, PPID Kabupaten Tuban sudah sesuai dengan teori ini, dimana dalam struktural PPID Tuban sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Namun masih ada kendala dalam sinkronisasi dengan PPID Pembantu yang ada di setiap Dinas atau kecamatan di kabupaten Tuban. Dalam Jurnal LISKI Vol. 3 No. 2 Tahun 2017 Tentang Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat Di Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tuban, dijelaskan bahwa PPID merupakan lembaga yang ditugaskan untuk mengelola seluruh informasi dan dokumentasi di Kabupaten Tuban.

Tentunya factor terakhir yang sangat penting dalam pelayanan informasi oleh pelayan publik adalah respon masyarakat selaku pengguna atau pemanfaat dari informasi publik tersebut bahwa masyarakat pengguna pusat informasi publik mempunyai berbagai macam pendapat dan pandangan mengenai keterbukaan informasi publik. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa keterbukaan informasi publik harus dilakukan pemerintah sebagai bentuk penyesuaian era globalisasi. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan keterbukaan informasi yang telah disediakan, berdampak pada implementasi *good governance* kurang maksimal. Masyarakat cenderung pasif dan hanya bersikap sebagai pelanggan jasa yang hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Dalam kajian oleh Girenda Kumala Cahyaningtyas Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Semarang, Studi Kasus : Masyarakat Pengguna Pusat Informasi Publik (PIP)

Tahun 2017. Kajian selanjutnya menyampaikan bahwa harus ada kolaborasi Budaya organisasi dan perilaku birokrasi dalam menghadapi Asia Future shock di abad 21 sehingga khususnya di Indonesia mampu menghadapi dan menyampaiakan pola pikir berbasis kearifan lokal mampu mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat sehingga perlu adanya model yang mampu menjadi alat yang menjembatani birokrat dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dengan beberapa kajian model komuniasi sebelumnya di atas saat ini memerlukan perangkat komputer untuk model komunikasi yang digunakan. Perangkat komputer dilengkapi dengan selain sistem komponen dengan sistem data,juga jaringan dan pembuat jaringan yaitu :

1. Berikut ada 5 komponen dasar berkaitan dengan sistem komunikasi data:
   a. Sumber Data. ...
   b. 2. Transmitter. ...
   c. Media Pengiriman atau Sistem Transmisi. ...
   d. Penerima. ...
   e. Pengirim dan Tujuan. ...
   f. Penutup.

2. Komponen dasar jaringan komputer ROUTER

Router adalah alat yang mempunyai kemampuan melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang memungkinkan memiliki jalur diantara keduanya.

a. SISTEM OPERASI (OS) ...
b. GATEWAY. ...
c. VITUAL LAN. ...
d. PROXY SERVER. ...
e. FIREWALL.

3. Komponen atau alat pembuat jaringan
   a. NIC (Network Interface Card).
   b. Kabel jaringan.
   c. Konektor.
   d. Hub.
   e. Switch.
      Switch pada prinsipnya sama dengan hub bedanya switch lebih pintar daripada hub karena mampu menganalisa paket data yang dilewatkan padanya sebelum dikirim ke tujuan.
   f. Repeater.
   g. Router.
   h. Modem.

Perangkat komputer ini berkenaan teknologi yang berkenaan jaringan,sistem komunikasi datadan komponen yang ada dan dibutuhkan saat ini harus diketahui ,dipakami dan dijalankan oleh birokrat dalam menjalankan fungsi komunikasi guna meningkatkan efektivitas organisasi.

C. Pendekatan Model Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal

Konsep Model Komunikasi Berbasis Kearifan lokal diawali di Indonesia dengan beberapa kajian dari berbagai literatur dan paradigma yang terjadi dimasyarakat dengan dimulainya globalisasi, bagaiman Asia mengalami Shock di abad 21 serta era digital sehingga perlunya pola pikir yang berbasis kearifan lokal dalam berpikir,bertindak berperilaku. Kearifan lokal merupakansebuah filosifis hidup yang dianut dalam suatu wilayah atau negara yang terlahir dari keanekaragama dan dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari budaya organisasi.

Dalam penelitian ini, perencanaan transformasi budaya organisasi harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan efektifitas penggunaan budaya berbagi, perlu adanya nilai luhur untuk efektivitas pendidikan di Indonesia dalam penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah. , seharusnya transformasi budaya berbagi nilai-nilai luhur yang sama - dengan saling membantu dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun yang mengacu pada visi dan misi, sama-sama serasi untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana pendidikan dalam bentuk melaporkan secara transparan, sama-sama setia melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melaporkan setiap dana yang dikeluarkan secara transparan.

Konsep awal Model komuniasi berbasi kearifan lokal di pemerintahan merupakan kajian dari sebuah penelitian mulyaningsih (2010); sebagai berikut terlihat dalam tabel

Tabel. ..Hasil Penelitian Tentang Analisis Pendekatan Awal Model Komunikasi Birokrasi Berbasi Kearifan Lokal (2010)

no	Kesimpulan	analisis
1	Secara deskriftif dilapangan budaya organisasi dan perilaku birokrasi sudah berjalan dan memberikan andil yang besar terhadap efektivitas organisasi	Budaya dan perilaku berpengaruh terhadap efektivitas organisasi
2.	budaya organisasi lebih besar memberikan andil dibandingkan dengan perilaku birokrasi, artinya budaya organisasi harus menjadi prioritas perhatian para pejabat agar efektivitas organisasi seluruh instansi tercapai.	Budaya lebih besa dibandingkan perilaku birokrasi terhadap efektivitas
3	Perilaku Birokrasi umumnya diwarnai dan termotivasi oleh budaya organisasi aparat yang mengadopsi dan mentrasformasikan kondisi yang datang dari lingkungan sebagai nilai-nilai leluhur	Perilaku di pengaruhi budaya kearifan local tempat birokrat

4	budaya organisasi terdiri dari karakteristik inisiatif individu, karakteristik toleransi terhadap tindakan berisiko, karakteristik arah, karakteristik Integrasi, karakteristik dukungan dari manajemen, karakteristik kontrol, karakteristik identitas, karakteristik sistem imbalan, karakteristik toleransi terhadap konflik, karakteristik pola-pola komunikasi memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas	Karakteristik budaya organisasi Inisiatif individu, tolerasi terhadap tindakan, integrasi, toleransi, arah, control, dukungan manajemen, identitas, system imbalan, toleransi terhadap konplik, pola-pola komunikasi.dan karakteristik identitas dan karakteristik arah berpengaruh lebih kuat sedangkan karakteristik dukungan dari manajemen dan karakterisrik pola-pola komunikasi berpengaruh paling kecil terhadap efektivitas organisasi.

5	Temuan penelitian menunjukan sangat perlu dikembangkan terus karakteristik identitas melalui indikator pencitraan pribadi, ciri khusus pribadi berupa nilai-nilai, simbol-simbol dan pemahaman perilaku aparat dalam mengidentifikasikan dirinya secara keseluruhan dalam organisasinya sesuai dengan arah kebijakan yang jelas	perlu dikembangkan terus karakteristik identitas sebagai dari karakteristik budaya organisasi yang bersandar pada nilai kearipan local mewarnai perilaku birokrat
6	perlu dikembangkan dukungan dan komunikasi hubungan dua arah dari atasan baik hubungan yang menyangkut hirarki kewenangan maupun persoalan diluar hirarki wewenang.	Perlu model pola komunikasi yang dapat menjembatani di dalam maupun luar kewenangan

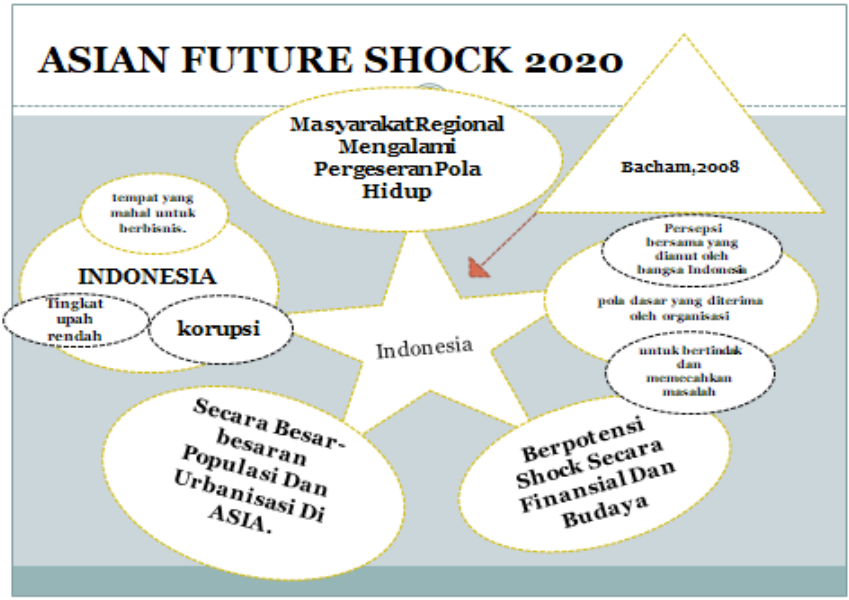
7	perilaku birokrasi yang terdiri dari karakteristik kemampuan, karakteristik kebutuhan, karakteristik kepercayaan, karakteristik pengalaman, karakteristik persepsi, karakteristik pengharapan, karakteristik hierarki, karakteristik tugas-tugas, karakteristik wewenang, karakteristik sistem *reward*, dan karakteristik Sistem kontrol memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap efektivitas organisasi	pelaksanaan karakteristik kemampuan dan karakteristik tugas-tugas berpengaruh sangat besar sedangkan karakteristik pengharapan dan karakteristik wewenang memberikan pengaruh paling kecil.

8	Temuan penelitian menunjukan sangat perlu dikembangkan kemampuan dalam menguasai dan mengendalikan TUPOKSI, tingkat pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani dalam mendukung kelancaran bidang tugasnya sesuai dengan pembagian kerja berdasarkan pedoman kerja yang tersusun sebagai ukuran keberhasilan dari seorang pegawai serta perlu adanya mendelegasikan pekerjaan sebagai bentuk dari kepercayaan atasan kepada bawahannya agar setiap pegawai dapat bekerja sepenuh hati , bertanggung jawab bekerja keras sesuai dengan ukuran standar keberhasilan serta kelayakan kerja	Perlu adanya mendelegasikan pekerjaan ;sebagai bentuk dari kepercayaan atasan kepada bawahannya agar setiap pegawai dapat bekerja sepenuh hati , bertanggung jawab bekerja keras sesuai dengan ukuran standar keberhasilan serta kelayakan kerja

Berdasarkan kajian di atas sebelumnya filosifis membangun sebuah kekuatan yang dijalankan oleh pemerintahan di Kabupaten Sumedang sehingga mampu menjalankan efektifitas organisasi.

Bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dampak dari pergeseran nillai-nilai saat ini dan kedepannya memiliki karakteristik budaya organisasi yang bermuara dari falsafah negara

yang telah memiliki karakter bangsa Indonesia harus dilengkapi dengan karakteristik budaya "Berbagi" (*sharing*) selain sebagai penyeimbang juga merupakan alat dan landasan kedepan pada saat Indonesia akan menghadapi "*Indonesia Culture Future Shock*" mengingat karakteristik "Berbagi" (*Sharing)* merupakan jelmaan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam pancasila yang sudah ada sejak lama yang terimplementasi dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti *Silih Simbeuh* di tataran Jawa Barat, memang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat bahkan orang sunda pada umumnya. penerapan pembangunan (Rekontruksi) nilai-nilai dalam karakteristik budaya organisasi "Berbagi" (*sharing*) terhadap peningkatan kompetensi daya saing sumber daya manusia (SDM) termasuk dalam bisnis seperti UKM, pemangku kebijakan di Indonesia harus dijadikan pemikiran bersama ke arah perubahan sikap dan pandangan bangsa sebagai konsekuensi interaktif manusia selaku individu dalam hubungannya dengan komunitas masyarakat nasional, regional dan internasional . Porter dalam bukunya "*The Competitive Advantage of Nation*", mengatakan bahwa teori daya saing suatu negara secara korelasional bertumpu pada pembangunan SDM. (MEIJO, 2015). Selanjutnya selain dikaji secara internal di Indonesia juga dalam era globalisasi dan beberapa literatur dari luar negara Indonesia seperti Linda Farel, dan Mechael Backham (2008) menyatakan dalam bukunya bagaimana di tahun 2020 Asia khususnya akan mengalami shock termasuk Indonesia yang akibat dipengaruhi beberapa hal, terlihat dalam gambar dibawah ini :



Sumber : Mulyaningsih

ASEAN@50 AND INDIA – RELATIONS India Institute Of Science Campus,Bangalore,India, 7-8 Desember 2017

Untuk mengatasi hal tersebut Indonesia harus memeiliki pola dasr untuk berpikir (persepsi) dan bertindak sehingga mampu bertahan (adaptif) pada tahun 2020,karena memiliki filososif kearipan lokal yang sangat berpengaruh terhadap efektiftas organisasi. (2010) dan selanjutnya hal tersebut dikaji pada pendapat Bacham,2008 bahwa Indonesia Tidak akan mengalami shock karena dapat menerapkan kearifan lokal (sundanis filosofis) sehingga menghasilkan beberapa sikap yang dapat di transformasikan dalam kehidupan dan berbagai bidang dalam melaksanakan berbangsa dan bernegara. Terlihat dalam tabel di bawah ini :

Table 1 Transformation Matrix
The Organization Sharing Cultural Characteristing as a Result of Rebounding Local Wisdom Values in Increasing the HR Competence in Indonesia in the 21st Century

The Organization Sharing Cultural Characteristing as a Result of Rebounding Local Wisdom Values in Increasing the HR Competence in Indonesia in the 21st Century								
Transformation in	Silih Simbeuh		Silih Asah Silih Asih Silih Asuh		Study Result of the Young Generations		Study Result of Implication of Ethic Values	
	Sharing Characteristic Value	Attitude and Way of Thinking	Sharing Characteristic Value	Attitude and Way of Thinking	Sharing Characteristic Value	Attitude and Way of Thinking	Sharing Characteristic Value	Attitude and Way of Thinking
Economic	Equally harmonious and working together	having a relationship with safety and with other workers	equally faithful and enduring, equally faithful	The amount of workers from the lower education group and the abundant natural recources, relation between subcontractors	Equally faithful	Working according to the job	Equally faithful and having high spirits	Giving quality service, increasing production capacity and looking for resources
Culture	Equally faithful and perseverng	Using the Chinese trading culture	Equally having a high fighting spirit	The gender towards the production scale in the involvement of men	Equally having a high fighting spirit	*Organization culture with dimension;involvement*		
Social	Equally having a high fighting spirit	The relation between the Labors with the source of invesment and resources supplier	Equally harmonious and working together	An anti-monopoly act	Working together, equally perseverng	Doing adaptibility; the capability of the member to suit the program of the senator	Equally harmonious and faithful	the cultural organization aspect gives influence towards the organization
Politic							Both harmonious and working together	The boss' attitude is hoped to be able to minimize the gap
Education							Both faithful, harmonious, have a high fighting spirit	The implementation of strategy of work by planning strategies in using the natural resources

Bahwa kearifan lokal yang ada sudah bisa dijalankan secara internasioal dan mampu membangun pola pikir, etos kerja dalam bentuk iklim kerja bagian dari budaya organisasi yang dapat diimplementasikan di birokrat dan berbagia institusi, seperti yang telah di jalankan di pemerintahan Kabupaten Bandung selama tahun 2011 dan sd 2013 di lingkungan pendidikan perguruan tinggi.

Penelitian dan Kajian selanjutnya tentang implementasi Kearifan lokal yang dimaksud adalah *simbeuh* dipahami sebagai proses saling mengingatkan dan memberi masukan atas opini-opini program dan kebijakan yang berwawasan birokrasi. Hal ini akan membantu para birokrat untuk melihat setiap program dan kebijakan bersama dari berbagai lingkungan dan perspektif secara komprehensif. Dalam implementasinya, komunitas

milenial mendengarkan, melihat, dan mengomentari program dan kebijakan pemerintah sehingga pemerintah mendapat masukan dari komentar yang diberikan dan karenanya direkondisi sebagai bagian dari penyelesaian masalah program. Proses ini merupakan salah satu bentuk *community of inquiry* (COI) yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya oleh para milenial.

CoI yang diwujudkan dalam program "Minum Kopi Bersama Kepala Daerah" merupakan bentuk *sharing* yang dilakukan oleh para birokrat, dalam hal ini calon Gubernur atau pemerintahan. Hal ini bermanfaat bagi mereka maupun bagi yang melihatnya karena dapat merangkul banyak isu dan dapat membaurkan banyak komponen dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan agama. Berbagi dalam bentuk minum kopi bersama dapat didalilkan menjadi model 'NGOPI SILIH SIMBEUH.CoI' atau 'berbagi sambil minum kopi'. Ini dimanifestasikan pada gambar 4 di bawah ini.

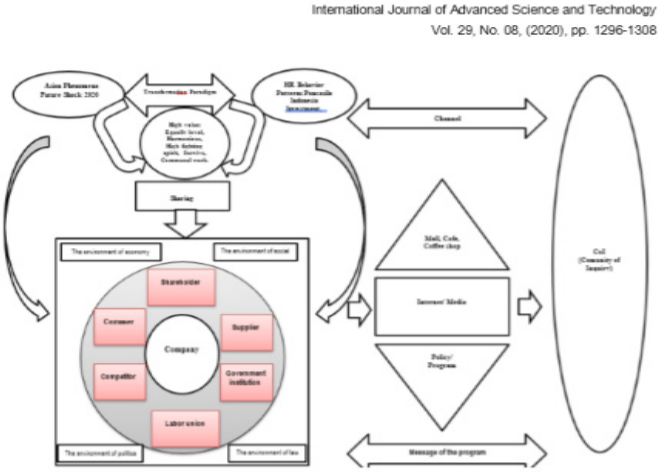
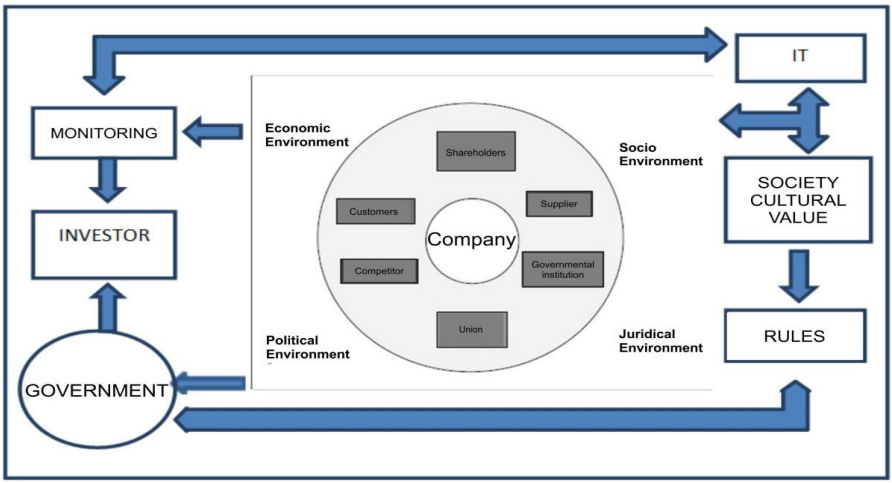


Figure 4 Model of 'sharing while drinking coffee' or *'NGOPI SILIH SIMBEUH.CoI'*

'NGOPI SILIH SIMBEUH.CoI' merupakan model pola komunikasi di era digital berbasis kearifan lokal saling berbagi atau 'simbeuh' melalui minum kopi bersama yang disulap menjadi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau Twitter milik birokrat. Hal ini akan memberikan kemudahan terutama bagi kaum milenial yang suka nongkrong di cafe, resto, atau mall dalam mengakses kebijakan pemerintah. Berdasarkan temuan konsep perilaku birokrasi dengan teknik observasi dan survei dari para birokrat yang sering berbagi kebijakan program yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat, model pola komunikasi birokrat ini dapat dinamakan 'NGOPI SILIH SIMBEUH.COI '. Sekali lagi istilah ini bisa diartikan sebagai minum kopi bersama sembari membahas kebijakan atau bahkan permasalahan di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini merupakan salah satu cara terbaik yang dapat diterapkan untuk memfasilitasi para birokrat ketika ingin berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan dengan menggunakan teknik berbasis kearifan lokal.Mulyaningsih (2020) juga melibatkan berbagai komunitas agar mampu mengikuti perkembangan yang ada dari berbagai komunitas di era digtal yaitu :

Penerapan budaya organisasi *sharing* dalam sebuah kelompok dapat dijalankan dengan baik karena adanya kolabarasi nilai dan norma dari kedua bagian tersebut seperti yang digambarkan dalam sebuah lingkungan sebagai berikut;



Gambar 1:
Model 1: IT collaboration with cultural transparency as a fundamental human resource mindset in the 4.0 era of the revolution industry
https;//ssbrj.org/indwx.php/rbaos/article/view/71

Dengan demikian model yang akan dibangun untuk mengkolaborasikan karakteristik budaya organisasi *sharing* ditataran internasional bagi UMKM di Indonesia sehingga selain tetap menjadi raja di negaranya sendiri bahkan mampu bersaing secara internasional bertompang dapat kekuatan lokal, keterbukaan budaya berbasis IT di era digital bagi berbagai komunitas diantaranya komunitas perempuan.

Sinergisme komunitas perempuan, generasi penerus bangsa dan media digital adalah upaya-upaya untuk mendesain generasi penerus agar dapat memanfaatkan media digital untuk mewujudkan impian-impian dan konsep tujuan hidup dan keberlangsungan jati diri sebuah bangsa Indonesia bagian pendekatan yang melibatkan

proses pendidikan regenerasi berbasis kekeluarga sebagai berbasis kearifan di Indonesai Anak dan Ibu dalam sebuah lingkungan komunitas.

D. Pendekatan Model Komunikasi Masa Pandemi

Kondisi pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Perilaku masyarakat masih ada yang belum memahami pencegahan virus covid-19 dengan tidak taat prokes, menghindari untuk di vaksin, sikap menutup diri masyarakat yang terdampak pandemi serta masyarakat yang menjauh oleh karena kekhawatiran terkena wabah serta masih banyak persoalan lain dimana masyarakat sesungguhnya membutuhkan informasi melalui media komunikasi dari pelayanan publik pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dengan standar yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Strategi media komunikasi birokrasi pemerintahan dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik harus berkorelasi dengan emphati, partisipasi, motivasi berprestasi tinggi, budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia.

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi Covid-19 disebabkan oleh penyakit yang disebabkan

oleh infeksi virus SARS-CoV-2, pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia terus bertambah. Covid-19 sebelumnya dikenal sebagai Novel 201 Novel Coronavirus (2019-nCoV) penyakit pernapasan, sebelum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan nama resmi sebagai Covid-19 pada bulan Februari 2020 Miquel Porta (2008). Miquel Porta, ed. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press. hlm. 179. ISBN 978-0-19-531449-6. Diakses tanggal 14 September 2012.

Saat ini terdapat penambahan kasus virus corona sebanyak 19.106 kasus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia, dengan penambahan 5.255 kasus. Untuk melihat pergerakan virus Covid -19 di suatu wilayah Kantor Berita Antara, 2021.https://www.antaranews.com/berita/2272346/ satgas-covid-19-pergerakan-virus-terlihat-dari-perilaku-manusia indikator dilihat dari tempat isolasi dan ruang intensive care unit (ICU). Protokol kesehatan tidak bisa ditawar lagi, harus diterapkan dengan ketat untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di masa PPKM dengan penyesuaian yang mana dalam penanganan pandemi COVID-19 diperlukan kerjasama semua pihak seluruh elemen bangsa. Pradipta, Raditya. 2021. Pengendalian Pandemi COVID-19, Kapolri Ingatkan Forkopimda Klaten Perkuat Prokes dan 3T. Jurnal patrol

1. AKB (Adaptasi kebiasan Baru)

Pandemi COVID-19 belum juga sirna dari Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah

ini, namun juga belum berhasil. Sebenarnya jika ingin usaha pemerintah berhasil, maka seyogyanya juga dibarengi dengan kedisiplinan masyarakat melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang lakukan sehari-hari baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Bangsa Indonesia dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah dan negara. Seperti yang telah diketahui bahwa COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer namun bisa menyebabkan kematian. Gejala COVID-19 ditandai dengan munculnya batuk pilek, flu, demam, gangguan pernapasan, namun ada juga yang tidak nampak / muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui *droplets* atau percikan batuk atau bersin.

Untuk melawan virus hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti : sering cuci tangan pakai sabun, menerapkan etika batuk / pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak dan hindari kerumunan.

Pada masa pandemi masyarakat diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru, yang dapat 'berdamai' dengan COVID-19. Secara singkatnya akan dijelaskan sebagai berikut: *New Normal* adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi risiko penularan.

Tujuan dari *new normal* adalah agar masyarakat tetap produktif

dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya agar *new normal* lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat maka "*new normal*" dinarasikan menjadi "***Adaptasi Kebiasaan Baru***". Maksud dari Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) adalah agar kita bisa bekerja, belajar dan beraktivitas dengan produktif di era Pandemi COVID-19.

Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan oleh setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari harus bisa mengadaptasi / menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum, seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat agar kita bisa bekerja, belajar, beribadah dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat dan produktif.

Adapun adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah :

a. Sering cuci tangan pakai sabun. Jika bepergian selalu membawa *hand sanitizer*.
b. Memakai masker
c. Jaga jarak atau menghindari kerumunan.
d. Istirahat cukup dan rajin olahraga.
e. Makan makanan bergizi seimbang.
f. Jika mengucapkan salam tidak perlu bersalaman dan cium pipi kanan kiri (cipika cipiki), kini diganti dengan "*salam namaste*" atau salam dengan kedua tangan mengatup di depan dada.
g. Gunakan uang elektronik, mengurangi membayar dengan uang *cash*.
h. Setiba di rumah langsung membersihkan diri / mandi.

i. Jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya lansia dan balita tetap tinggal di rumah.

Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, agar dapat mengurangi penyebaran Virus Corona. *(*Sumber : Kementrian Ketengakerjaan)

Beberapa kebijakan pemerintah berkaitan dengan uapaya mengatasi pandemi mulai dengan membatasi hubungan sosial (sosial distancing), bekerja dirumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta kepada masyarakat untuk tetap di rumah (stay at home), serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. Penyebaran virus terus meningkat hingga tahun ini, kebijakan dilanjutkan dengan Physical Distancing dan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Implementasi kebijakan Pemerintah kabupaten Garut berupaya untuk menurunkan level PPKM dengan menerapkan aturan yang dapat mencegah dan memutus rantai penularan wabah COVID-19. Konsep Otonomi Daerah dapat menjadi jawaban dari permasalahan birokrasi pemerintahan daerah jika implementasinya sesuai atau tidak dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta mendapat dukungan dari aspek pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Konflik yang timbul antara pemerintah daerah dengan rakyatnya dimana janji politik pada saat pilkada yang tidak terwujudkan menjadi sebuah analisa untuk di kaji. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil

penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan sebuah kebijakan dalam bentuk kinerja pelayanan kepada masyarakat harus memenuhi beberapa aspek, mulai dari indikator kinerja, formasi jabatan, pengawasan keuangan daerah hingga pengawasan lembaga independen yang menyertai berjalannya sebuah program kebijakan. Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan mereka sendiri, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas harus menjadi kunci penyelenggaraan pemerintahan yang baik *good government dan Clean government*.Mulyaningsih (2021)

Pada sisi lain, kebijakan pelayanan publik melalui WFH menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap kinerja seperti sulitnya bertemu secara fisik sebagai makhluk sosial, sehingga menyebabkan kesalahan informasi baik dalam bentuk data maupun prosedur pelaksanaan kerja di setiap instansi, Motivasi untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap publik juga masih kurang disadari. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan yang sebatas memenuhi formalitas dalam bekerja, ketidakadaan atau ketidaklengkapan sarana dan prasarana di rumah untuk menunjang pekerjaan mereka menjadi penghambat kinerja mereka dalam melayani publik secara baik, faktor kebosanan dari rutinitas, kondisi dan lingkungan bekerja di rumah juga berpengaruh pada kreatifitas dan semangat kerja dan biaya tersendiri untuk melaksanakan tugas melalui sarana internet menjadi kendala tersendiri dari faktor meningkatnya pengeluaran (jabarprov.go.id,

2020).....model komunikasi pandemi..? Satuan Tugas Covid-19 Satuan

Tugas Penanganan COVID-19 yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun tugas dan fungsi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut

a. Dasar Pembentukan

Bahwa penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi pada 11 Maret 2O2O. Telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya. Untuk itu, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Pembentukan

1) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
2) Mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
3) Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19
4) Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan

5) Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19

c. Tugas Pokok

6) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional
7) percepatan penanganan COVID-19;
8) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-I9;
9) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
10) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-L9; dan Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah. www.ojk.go.id/.../pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx

2. Pandemi

Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia.

Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi. Pandemi umumnya diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu yang penyebaran penyakitnya cepat dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Sebagai

contoh wabah virus Zika yang dimulai di Brasil pada 2014 dan menyebar ke Karibia dan Amerika Latin merupakan epidemi, seperti juga wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014-2016. https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi

Beberapa hal yang harus diperhatikan masyarakat pada masa pandemi ini, diantaranya adalah :

Pertama, masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan disiplin dalam memakai masker yang merupakan upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid yang dapat tertular akibat droplet.

Kedua, terus melaksanakan kegiatan vaksinasi demi mencapai herd immunity.

ketiga, memperkuat testing, tracing, dan treatment. Dianjurkan untuk kegiatan testing dan tracing bisa mencapai perbandingan 1:15, artinya apabila ada warga yang terkonfirmasi positif, maka dapat dilakukan pengecekan terhadap 15 orang yang memiliki riwayat kontak erat. https://bnpb.go.id CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menurut World Health Organization (WHO), virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrme (SARS). Virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah.

Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami

sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua, dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk dan kesulitan bernapas harus mendapat perhatian medis.

Birokrasi selama Masa PandemiIndonesia memiliki modalitas dan visi birokrasi yang baik dalam penanganan pandemi Covid-19. Belum lama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal

Para ASN mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, ASN dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.

Adapun strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu: 1) penerapan birokrasi digital, 2) standarisasi pelayanan, 3) profesionalisme SDM aparatur. Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19. Selain untuk memberikan informasi update tentang penanganan Covid-19, birokrasi digital juga dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. Standarisasi pelayanan menjadi hal terpenting selanjutnya untuk membuat birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masih berkaitan dengan tempat kerja kami, contoh lainnya adalah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri MenPANRB dalam percepatan pengisian JPT di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ada beberapa penyesuaian siginifikan dalam aturan pengisian JPT di SE tersebut dalam memangkas proses waktu pengisian JPT. Percepatan ini bukan berarti mengurangi kualitas. Kualitas tetap dijaga dan diawasi secara ketat, namun percepatan pengisian JPT yang kosong jauh lebih penting karena untuk tetap menjamin roda birokrasi di pemerintahan tetap berjalan dan memberikan kontribusi besar dalam penanganan masa pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, standarisasi pelayanan perlu dijalankan secara baik dan sesuai prosedur di seluruh insansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah harus memperhatikan standarisasi pelayanan publik dari 5 (lima) aspek yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik.

Birokrasi digital dan standariasi pelayanan sebagaimana disampaikan di atas, selanjutnya tidak dapat berjalan sesuai harapan tanpa didukung dengan profesionalisme SDM aparatur.

Birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme SDM aparatur menjadi strategi jangka pendek dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi ini. Tantangan selanjutnya setelah ketiga strategi jangka pendek ini dijalankan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan birokrasi yang dikeluarkan. Jangan sampai terjadi kembali contoh kasus di salah satu Pemda yang mana salah satu warganya mengalami gagap pelayanan publik secara online.

BAB III

Landasan Model Komunikasi Birokrat

A. Masalah Komunikasi Birokrat

Problema Komunikasi Pemerintahan di Era Global

Probelma komunikasi pemerintahan di era global deasa ini adalah, masih menggunakan pendekatan asal bapak senang, walaupun kita tahu bahwa sentuhan ICT (*Information, Communication adn Technology)* sudah sedemikian dahsyatnya. Namun, pendekatan demikian tampak jelas pada posisi dan peran para pimpinan pemerintahan mulai dari jabatan menteri sampai sampai kepala daerah yang dilatarbelakangi oleh akar budaya *paternlistik* yang mengkristal, *terpersonafikasikan,* serta dianut oleh para elit politik yang berkuasa. Di sisi lain, era global memerlukan penanganan serius dan sangat hati-hati. Bila tidak, ia akan menjelema menjadi buah *simalakama* bagi sistem komunikasi pemerintahan, yang disebabkan oleh interaksi kultural melalui media massa sehingga mengungkit kesadaran global, yakni sebuah kesadaran bahwa dunia adalah satu.

Beberapa penelitian tentang proses komunikasi di beberapa daerah membuktikan, bahwa komunikasi akan berhasil ketika:

1. Adanya kepentingan bersama anatara pemerintah dan masyarakat
2. Isi materi yang disampaikan dapat dipahami sebagai salah satu jawaban atas pemecahan masalah
3. Pemerintah merupakan sumber yang dapat dipercaya
4. Adanya dukungan media yang sesuai dan menguasai pemerintah dan masyarakat.

Etika komunikasi pemerintahan adalah fungsi pemerintahan terkait dengan derajat tanggung jawab etika yang diperankan

dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mengdepankan mengenai baik dan buruk, benar dan salah, serta kewajiban yang bertalian dengan hati nurani yang bernaung di bawah filsafat moral.Etika ialah pembahasan mengenai baik (*good*), buruk (*bad*), seyogyanya (*ought*), benar (*right*) dan salah (*wrong*). Memasuki era dengan teknologi yang semakin canggih, banyak hal mengalami transformasi yang tadinya mungkin *out of date* tetapi semenjak memasuki era digital semuanya berubah lebih modern dan canggih. Pastinya hal ini melahirkan generasi 4.0, dimana sekarang para millenials sudah memasuki usia bekerja. Generasi ini juga disebut generasi Y yaitu generasi yang lahir di pertengahan tahun 90an hingga awal 2000an. Maka bisa pastikan dua tahun ke depan, milenial akan mendominasi populasi karyawan.

Developing The Local Wisdom Capacity of Conflict and Social Culture Inequality in The Digital Era (113). Forbes mengatakan bahwa milenials tidak ingin adanya hubungan kaku satu arah. Sekarang bos atau atasanmu di kantor akan dianggap sebagai coach yang diharapkan akan membantu mereka berkembang untuk menjadi lebih baik lagi.Selain itu milenials cenderung menginginkan work-life balance dimana mereka memiliki fleksibelitas dalam jam masuk dan pulang kerja, maka dari itu muncullah pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengharuskan karyawannya datang ke kantor jadi mereka bisa bekerja dimana saja asal target pekerjaan terpenuhi. Ada juga perusahaan yang menerapkan jam kerja fleksibel dimana karyawan boleh datang jam berapapun dan pulang kapanpun asal target pekerjaan selesai.

Dengan mudahnya mengakses internet saat ini membuat pekerjaan bisa dikerjakan dimana saja, sehingga milenials tidak perlu datang ke kantor. Di era digital, Birokrasi bukanlah hal yang

harus diterapkan lagi. Sekat antara karyawan dan pemimpin pun semakin pudar dan mulai bertransformasi dengan mudahnya berkomunikasi dan koordinasi antar karyawannya (termasuk bos) semakin efektif dan langsung mendapatkan feedback.

Semakin kesini perusahaan pun semakin menyesuaikan budaya perusahaannya agar semakin modern dan cocok dengan millenials. Seiring perkembangan zaman menjadi era digital, perusahaan pun tidak perlu lagi menerapkan budaya terlalu kaku dan birokrasi. Sudah banyak perusahaan yang menerapkan budaya fleksibel di kantornya, terutama startup-startup.

Budaya Kerja (*corporate culture*) saat ini menjadi isu besar pada perusahaan atau lembaga pemerintahan yang ingin terus hidup berkembang. Trennya kian membuncah seiring tantangan revolusi industri 4.0 yang menuntut perubahan budaya pada sumber daya manusia (SDM) yang ada.

Semangat yang ingin ditonjolkan pada era tersebut adalah sistem yang cepat, adaptif, terukur, dan efisien. Pada saat implementasinya sudah berjalan dengan masif, maka disinyalir akan banyak lapangan pekerjaan manusia yang "dikudeta" seperangkat komputer atau robot. Oleh karena itu dalam perspektif layanan publik, pergerakan pemerintahan banyak mengalami dinamisasi dan embrionya berasal dari seluruh SDM pemerintahan.

Dalam konstelasi perubahan, peran pemerintah akan lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan *quality assurance* atas *services* yang akan dilakukan. Dengan fungsi yang lebih sedikit tentunya organisasi pemerintah akan mengalami *squizzing* (mengecil) dan beberapa layanan sudah akan berbasis digital (lebih cepat dan lebih *accessible*).

Gaya kebijakan publiknya pun semestinya juga membutuhkan penyegaran. Dalam struktur pelayanan publik, justru pemerintah

bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan sebaliknya. Hal-hal mendasar seperti inilah yang mungkin bisa meningkatkan efektivitas kebijakan, karena gagasan-gagasan yang dilahirkan pemerintah bertindak sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat. Bagaimana pemerintah semestinya melakukan dalam beberapa periode waktu ke depan? Dengan kata kunci "budaya kerja" dan "revolusi industri 4.0" maka orientasi pelayanan/kebijakan pemerintah semestinya adalah mengawinkan keduanya menjadi seperangkat sistem birokrasi. Mari telisik satu persatu sebelum menggabungkan kedua sistem tersebut.

Di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang terbaru, budaya kerja pemerintah sudah ditata agar mendukung terlaksananya sistem pemerintahan yang efektif dan kompeten. Salah satu poin yang menarik adalah gagasan pemberlakukan *merit systems*.Sistem merit adalah seperangkat kebijakan dan manajemen ASN yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikemas untuk tujuan keadilan dan kewajaran terhadap sistem kerja ASN. Maksud dari konsep ini cukup baik, yakni agar kinerja ASN bisa optimal karena bidang yang dioperasionalkan sesuai dengan kompetensinya.

Konsep ini juga selaras dengan target reformasi birokrasi yang menginginkan sistem kepemerintahan yang lugas dan melayani sehingga keberpihakan pemerintah bisa betul-betul dirasakan masyarakat, baik apakah itu sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha.Tantangan untuk menyelenggarakan birokrasi yang melayani pun bukanlah tugas yang mudah, karena untuk dapat merevolusi budaya kerja pemerintah, butuh ekstra kehatian-hatian agar tidak sampai melanggar norma atau rambu-rambu yang berlaku dalam sistem kepemerintahan. Namun ada beberapa

catatan yang ingin penulis sampaikan terkait dengan semangat birokrasi ke depannya.

Pertama, inovasi layanan cenderung mulai menjadi kebutuhan primer untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, sehingga insan-insan kreatif sudah sewajarnya dapat dipupuk agar dapat berkembang dengan baik. ASN perlu didorong agar kritis dan terbuka terhadap kondisi lingkungannya, serta memiliki keberanian untuk menghadapi risiko-risiko yang terukur. Sumber inovasinya bisa berasal dari kepekaan pemerintah terhadap barrier yang dialami masyarakat. Jadi pola komunikasi seharusnya didesain dengan cara yang lebih cair dengan konsumen (dalam hal ini adalah masyarakat).

Kedua, perspektif mengenai ASN perlu dikondisikan sebagai aset paling berharga dari organisasi pemerintah. Sistem *reward and punishment* sangat layak untuk diterapkan agar kinerja dari ASN dapat lebih bertenaga. Kompetisi yang sehat juga perlu dibangun agar setiap ASN memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi.

ASN yang kreatif berhak mendapatkan apresiasi yang layak, sedangkan yang kinerjanya di bawah target tidak semata-mata dihukum, tetapi bisa juga dibina agar memiliki semangat yang sama dengan rekan-rekan sejawatnya. Tujuannya adalah agar setiap ASN bisa memiliki motivasi untuk lebih berkontribusi terhadap kinerja organisasinya.

Ketiga, kendati pemerintah menerapkan sistem organisasi yang sangat terstruktur, namun ada baiknya pola struktural ini tidak sampai menghambat komunikasi yang erat dan terbuka antargolongan ASN. Setiap kepala/pejabat struktural perlu diarahkan agar memiliki pola hubungan yang cair dengan staf/bawahannya hingga batas-batas tertentu. Pejabat-pejabat tersebut

juga memiliki kepekaan atas hambatan-hambatan kinerja yang dialami anggotanya.

Perubahan gaya manajerial bisa dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan. Citra ASN yang ramah, harmonis, dan bertenaga mestinya mulai ditonjolkan agar modal sosial dengan masyarakat bisa berkembang dengan baik.

Keempat, sinergi dengan masyarakat melalui fasilitas teknologi informasi seharusnya juga bisa dimanfaatkan dengan optimal, mulai dari sistem perencanaan kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan/kinerja pemerintahan. Saat ini sudah begitu banyak akses informasi yang dibangun, tetapi kurang bisa dimanfaatkan karena minimnya tenaga ahli yang bisa mengelola perkembangan teknologi informasi sebagai media *sharing* dan curhat dengan masyarakat. Dengan banyak fasilitas yang kurang optimal penggunaannyadisamping ruang informasi yang kurang *update.* Mestinya dengan perkembangan yang sekarang ini terjadi, gaya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat didesain agar lebih santai dan interaktif serta memiliki respons yang cepat.

Di balik beberapa catatan tersebut, sudah sangat senang melihat beberapa pejabat publik di tingkat pusat dan daerah yang sudah memanfaatkan sosial media sebagai media interaksi dengan masyarakatnya. Apalagi kaum milenial sangat melek terhadap perkembangan teknologi digital.

Dengan arah pembangunan industri 4.0 yang memang akan *powerfull* pada ekonomi berbasis digital, maka suasana yang dibangun mestinya lebih mengarah pada egalitarian. Medio 2018 kemarin, dalam merespons tuntutan pengembangan industri, pemerintah menyusun program *Making Indonesia Industry* 4.0 yang memuat 10 langkah prioritas untuk mengimplementasikan transformasi menuju revolusi industri 4.0. Pada sektor ekonomi

jika dielaborasikan, maka tahap kebijakannya berkutat pada hilirisasi produksi lokal terutama UMKM, penguatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi, penyediaan ekosistem yang unggul pada zona-zona industri strategis, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan investasi asing untuk tujuan transfer *knowledge,* penguatan SDM, dan beberapa paket insentif fiskal.

Beberapa sektor yang terpilih sebagai prioritas diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri automotif, industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil dan produk tekstil. Kelimanya secara eksisting memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena sesuai dengan potensi dasar yang kita miliki. Beberapa tantangan atau pekerjaan rumah yang selama ini belum mampu diselesaikan dengan baik, terutama pada aspek investasi, teknologi, dan pengembangan kapasitas SDM. Dengan persoalan tersebut, mungkin persoalan SDM mendapatkan ranking tertinggi untuk permasalahan yang perlu dituntaskan dari awal, mengingat SDM merupakan kunci perubahan.

Dalam perspektif organisasi pemerintahan, perbaikan kinerja SDM bisa dilakukan dengan proses assessment dan edukasi terhadap perangkat ASN, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi kinerja. Tujuannya adalah agar pemerintah mendapatkan orang-orang terbaik dan untuk melahirkan sistem evaluasi yang akurat. Selain itu prioritas pembangunan juga perlu disosialisasikan dan diawasi dengan benar agar orientasi kinerja di setiap organisasi tidak tumpang-tindih. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua persoalan dengan sekaligus. Jadi kendati banyak pintu organisasi dan fungsi, tetapi muara kebijakannya memiliki arah dan tujuan yang sama. Selama ini persoalan tersebut cenderung menjadi permasalahan yang katalis. Salah satunya juga disebabkan sistem

komunikasi dan kepemimpinan yang kurang didesain dalam satu frame logika yang sama.

Pada akhirnya revolusi industri 4.0 sebenarnya tidak hanya akan terjadi pada masyarakat selaku kelompok bisnis, karena organisasi pemerintah pun juga akan segera terdampak. Jumlah ASN dalam masa depan juga sangat terbuka akan terus berkurang karena semakin giatnya digitalisasi struktur layanan kepada masyarakat.

Proses perubahan ini ketika berjalan lancar, suatu saat mungkin akan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi sebagian pihak. Tetapi sejatinya ketika bisa mengelolanya dengan proses transisi yang baik, justru akan memberikan banyak keuntungan. Perubahan akan terus bergerak menjadi sebuah keniscayaan.

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Sadu.1999

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, sesuai peraturan yang berlaku. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dipusat, didaerah dan dilingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan jika dalam penyelenggaraan

pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni:

a. Kepentingan umum, artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.
b. Kepastian hukum, artinya pelayanan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya.
c. Kesamaan hak, artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama.
d. Profesional, artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional.
e. Partisipatif, artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif. Tidak diskriminatif, artinya semua masyarakat, tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.
f. Keterbukaan, artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.
g. Akuntabilitas, artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab.
h. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan.
i. Ketepatan waktu, artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu. Cepat, mudah, dan terjangkau, artinya pelayanan publik harus cepat,

mudah atau tidak berbelit-belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. adapun standar pelayanan yakni meliputi sebagai berikut Ridwan.(2009):

1. Prosedur pelayanan

   Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pegaduan.

2. Waktu peyelesaian

   Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3. Biaya pelayanan

   Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan

   Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana

   Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

Jenis Pelayanan Publik

Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. antara lain:

1. Pelayanan Barang

Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara/BUMN). Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

2. Pelayanan Administratif

Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi

nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.

3. Pelayanan Pembangunan

Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

4. Pelayanan Utilitas

Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.

5. Pelayanan Kebutuhan Pokok

Pelayanan Kebutuhan Pokok merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

6. Pelayanan Kemasyarakatan

Pelayanan Kemasyarakatan merupakan pelayanan yang

berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain;

Sementara itu, agar layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok, yaitu Moenir,Has (2010)

a. Tingkah laku yang sopan, dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai sebagai layaknya dalam hubungan kemanusian dengan demikian sudah merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan.
b. Cara menyampaikan dimana Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya memperhatikan pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyampaian yang menyimpang.
c. Waktu penyampaian, artinya menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat didambakan setiap orang yang mempunyai permasalahan.
d. Keramah tamahan, hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak berhadapan.

Pada saat itu, salah satu warga tidak mengetahui sejak kasus Covid-19, Pemda menutup pelayanan tatap muka dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga. Warga tersebut tetap menunggu sampai kemudian ada petugas yang datang menghampirinya dan memberikan informasi bahwa pelayanan tidak dilakukan secara manual lagi, melainkan secara online.

Penyederhanaan birokrasi harus menjadi agenda penting selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan publik. Adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui penghilangan beberapa eselon di kepegawaian negeri akan menuai dampak yang siginifikan dalam percepatan pelayanan di birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dapat memisahkan sebuah hal yang salah dan lambat dengan sistem yang telah dibangun. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat membuat sistem biokrasi berdasarkan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Semakin cepat, masukan dan laporan dari masyarakat, itu akan lebih baik dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berjenjang panjang dengan cara disposisi-disposisi, namun kebijakan dapat diputuskan dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan pelayanan yang responsif sekaligus memuaskan kepada masyarakat.

Dengan agenda penyederhanaan birokrasi tersebut, Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern yang mengedepankan kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Sehingga, apabila dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah siap dalam mengatasinya karena memiliki birokrasi yang kuat namun tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. (https://www.kasn.go.id/details/item/570-birokrasi-selama-masa-pandemi). Pemerintahan tanpa komunikasi yang luas atau usaha menuju ke sana merupakan awal dari suatu tragedi atau lelucon, atau mungkin keduanya (*James Madison, Presiden Amerika ke 4*).

Masalah esensi dalam suatu kebijakan pada intinya akan menyentuh aspek *metapolicy*, sikap, dan perilaku yang tersembunyi

atau yang dinyatakan secara terbuka menyangkut hakikat dan perspektif yang terbuka, dari aktor-aktor yang ada dan bertanggung jawab pada perumusan atau pembuatan kebijakan yang dimaksud (Hodgkinso, 1968, pp, 121).

Menurut Wilbur Scramm (1982), bahwa proses komunikasi klasik melalui delapan komponen – komponen komunikasi, yaitu:

a. Sumber (*source*), yaitu yang memulai kegiatan komunikasi,
b. Pesan (*message*), yaitu isi komunikasi berupa informasi yang akan dipertukarkan,
c. *Encoder* yang menyandi pesan menjadi bentuk yang dapat dikomunikasikan,
d. Saluran (*channel*), media atau sistem pengiriman
e. *Decoder*, kebalikan dari proses *encording*
f. *Penerima* (*recevier*), yaitu tujuan atau sasaran komunikasi
g. Umpan balik (*feedback*), mekanisme antara sumber dan penerima yang dapat digunakan untuk mengatur arus komunikasi,
h. Gangguan (*noise*), gangguan atau kesalahan yang tidak dikehendaki yang dapat muncul pada saat pertukaran informasi.

Esensi kebijakan komunikasi pemerintahan adalah untuk menjembatani berjalanya fungsi-fungsi pemerintahan dengan kepentingan masyarakat dalam rangka mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya dengan tidak merugikan pihak manapun secara ilegal.

Lima aspek yang sangat relevan untuk diulas terkait dengan esensi kebijakan komunikasi pemerintahan, yaitu:

a. Penetapan visi,
b. Misi,
c. Tujuan,
d. Sasaran,
e. Strategi pencapainnya.

Pengertian kebijakan adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam rangka memberi solusi terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Kebijakan komunikasi pemerintahan apabila ditinjau dari sejumlah aspek diprediksi akan mampu memberikan nilai tambah bagi penyelnggaraan tugas-tugas pemerintahan khususnya dalam mereformasi mekanisme kerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat dieliminir beberapa aspek berikut ini:

a. *E-Leadership*, aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif pemerintah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
b. Infrastruktur Jaringan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup dan biaya jasa akses program-program pemerintah untuk masyarakat.
c. Pengelolaan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.
d. Lingkungan bisnis, aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem perdagangan dan regulasi yang dapat membentuk konteks bagi pengembangan bisnis teknologi informasi.
e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi teknologi informasi ke dalam kegiatan masyarakat baik perorang maupun organisasi.

Strategi adalah seperangkat rencana kerja yang akurat, yang tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan ketika berhadapan dengan kegelapan, tetapi juga dapat melakukan terobosan ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak terduga serta fleksibel menerpakan sesuatu peristiwa sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi dan tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi, maka perlu penetapan strategi-strategi kebijakan komunikasi pemerintahan.

Ada enam strategi pengembangan komunikasi pemerintahan melalui e government, yaitu:

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya
b. Menata sistem dan proses kerja pemerintah secara komprehensif dan holistik
c. Memanfaatkan teknologi secara optimal
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi
e. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun non pemerintah
f. Melaksanakan pengembangan secara sistemik melalui tahapan yang realistik dan terukur.

Pengembangan strategi komunikasi pemerintah melalui *e-government* dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan:

a. Tahap persiapan
b. Tahap pematangan
c. Tahap pemantapan
d. Tahap pemanfaatan

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingkan dalam pelaksanaan komunikasi pemerintahan perlu dilakukan sejumlah pengaturan sebagi berikut:

a. Standar kualitas dan kelayakan situs pemerintah bagi setiap tingkatan di atas.
b. Peraturan tentang kelembagaan dan kewenangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan transaksi informasi yang dimiliki pemerintah.
c. Persyaratan sistem manajeme dan proses kerja, serta sumber daya manusia yang berkualitas agar situs pemerintah dapat berfungsi secara optimal.

Gambaran kerangka arsitektur *e-government* adalah untuk memberikan jaminan keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan di dalamnya mencakup:

a. Akses, yaitu jaringan telekomunikasi
b. Portal pelayanan
c. Organisasi pengelolaan
d. Infrastruktur dan aplikasi dasar

Kata *governance* diartikan sebagai "*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*". Dari pengertian tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa "*governance*" adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna membangun masyarakat, cara dimaksud lebih menunjuk pada hal-hal yang bersifat teknis.

Yang dimaksud dengan UNDP dengan *governance* adalah penataan kembali pemerintahan, yang mempunyai tiga dominan yaitu sektor:

1. Pemerintah atau negara (*state*)
2. Swasta atau dunia usaha (*private sector*)
3. Masyarakat (*society*)

UNDP juga mengajukan sembilan karakteristik *good governance* sebagai berikut:

1. Participation
2. Rule of law
3. Transparancy
4. Responsiveness
5. Concensus orientation
6. Equity
7. Effectiveness and efficiency
8. Accountability
9. Strategic vision

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* dalam komunikasi pemerintahan, yaitu:

1. Faktor budaya birokrasi
2. Faktor budaya paternalistik
3. Lingkungan sosial dan politik lokal
4. Faktor dinamika politik
5. Kondisi sosial ekonomi
6. Kontrol masyarakat dan LSM

Mengoptimalisasikan penerapan *good governance* dalam komunikasi pemerintahan secara pragamatis dapat dikombinasikan

dari berbagai unsur komunikasi titik tengahnya dapat bervariasi pada setiap dominan dimaksud mencakup unsur-unsur

a. Komunikator(dalam konteks ini adalah pemerintah), yakni sebagai pemberi ispirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan yang bersifat temporer (non rutin)
b. Komunikan (dalam konteks ini bisa masyarakat, bisa juga swasta), mampu menangkap makna dengan mengartikulasikan berbagai aspirasi dan kepentingan publik.
c. Pesan, dalam konteks ini adalah kemampuan mengemas pesan yang bermoral dan beretika.
d. Media, yakni berbagai instrumen yang digunakan untuk menjabarkan, meneruskan pesan ke berbagai pihak, sehingga makna pesan aslinya tidak berubah karena penyadapan, pengurangan, penambahan
e. Feedback atau umpan balik, adalah informasi apa yang akan timbul ketika kondisi tertentu diciptakan.

Untuk mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik), dalam rangka mewujudkan tupoksi pemerintahan secara konsisten dan berkesinambungan maka tindakan yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan mengadakan berbagai program kerja pemerintah, seperti sosialisasi, diskusi, dan seminar yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman lebih dalam kepada seluruh jajaran pemerintahan guna menghindari salah persepsi dan salah aplikasi dalam penerapannya.

Kapita selekta merupakan suatu istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan lika-liku atau seluk beluk suatu bidang kajian yang dianggap bermasalah dalam perjalanan atau prosesnya.

5 karakteristik penyelenggara pemerintahan berkaitan dengan *Good Governance*

a. Pemimpin harus menyadari pentingnya komunikasi.
b. Pemimpin harus memiliki komitmen pada komunikasi dua arah.
c. Penekanan komunikasi diutamakan pada bentuk tatap muka.
d. Transparansi dan keterbukaan harus merupakan tujuan bersama dalam mencapai visi, misi, dan program.
e. Kepiawaian dalam menangani kondisi seburuk apapun termasuk berita yang jelek dan tidak menguntungkan.

Masalah *good governance*, dipahami sebagai alternatif bentuk penyelenggaraan pemerintah yang transparan dalam arti kata pemerintah yang terbuka terhadap semua persoalan bangsa dan masyarakatnya, sehingga harus ada kemauan dari pihak pemerintah untuk lebih terbuka, lebih demokratis, komunikatif, dan lebih persuasif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Model Komunikasi Digital Birokrat

Adanya pandemi Covid-19 menimbulkan berbagai macam kebijakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah setempa seperti, kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah atau *Work From Home* (WFH), penerapan sosial distancing, physcial distancing, dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tujuan untuk memutus rantai penularan Covid-19 yang ada di Indonesia saat ini.

Peningkatan kasus pandemi covid -19 di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketidaktanggapan yang tampak jauh dari *sense of crisis* dan lambannya respons pemerintah sehingga penyebaran

virus korona semakin kurang terkendali. Faktor lemahnya struktur birokrasi, birokrasi, dan disposisi yang tidak adaptif dengan masalah kesehatan, koordinasi antar stakeholder dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ketidakpedulian warga terhadap himbauan pemerintah seperti protokol kesehatan mengakibatkan tidak optimalnya penanganan COVID-19 di Indonesia.

Sebuah transformasi nilai karakteristik melalui model kolaborasi budaya organisasi *sharing* dari kearifan lokal *silih simbeuh* yang telah di *reubonding* yaitu; sama rukun dan gotong royong, sama setia dan bertahan-sama semangat juang tinggi, dengan sikap dan pola pikir; hubungan antar warga secara holistik menjadi pola guna mengatasi berbagai masalah. Modal sosial masyarakat tersebut pada akhirnya berlaku pula menjadi role model bagi pelaku birokrat yang bertugas untuk melayani rakyat pada umumnya. Mulyaningsih (2018)

Budaya kerja (*corporate culture*) saat ini menjadi isu besar pada perusahaan atau lembaga pemerintahan yang ingin terus hidup berkembang. Trennya kian membuncah seiring tantangan revolusi industri 4.0 yang menuntut perubahan budaya pada sumber daya manusia (SDM) yang ada. Semangat yang ingin ditonjolkan pada era tersebut adalah sistem yang cepat, adaptif, terukur, dan efisien. Pada saat implementasinya sudah berjalan dengan masif, maka disinyalir akan banyak lapangan pekerjaan manusia yang "dikudeta" seperangkat komputer atau robot. Oleh karena itu dalam perspektif layanan publik, pergerakan pemerintahan banyak mengalami dinamisasi dan embrionya berasal dari seluruh SDM pemerintahan.

Dalam konstelasi perubahan, peran pemerintah akan lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan *quality assurance* atas *services*

yang akan dilakukan. Dengan fungsi yang lebih sedikit tentunya organisasi pemerintah akan mengalami *squizzing* (mengecil) dan beberapa layanan sudah akan berbasis digital (lebih cepat dan lebih *accessible*).

Gaya kebijakan publiknya pun semestinya juga membutuhkan penyegaran. Dalam struktur pelayanan publik, justru pemerintah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik, bukan sebaliknya. Hal-hal mendasar seperti inilah yang mungkin bisa meningkatkan efektivitas kebijakan, karena gagasan-gagasan yang dilahirkan pemerintah bertindak sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat, yang semestinya dilakukan pemerintah dalam beberapa periode waktu ke depan yaitu, lebih ke orientasi pelayanan/kebijakan pemerintah maksudnya mengawinkan keduanya menjadi seperangkat sistem birokrasi.

Di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang terbaru, budaya kerja pemerintah sudah ditata agar mendukung terlaksananya sistem pemerintahan yang efektif dan kompeten. Salah satu poin yang menarik adalah gagasan pemberlakukan *merit systems*. Sistem merit adalah seperangkat kebijakan dan manajemen ASN yang berpijak pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dikemas untuk tujuan keadilan dan kewajaran terhadap sistem kerja ASN.

Maksud dari konsep ini cukup baik, yakni agar kinerja ASN bisa optimal karena bidang yang dioperasionalkan sesuai dengan kompetensinya. Konsep ini juga selaras dengan target reformasi birokrasi yang menginginkan sistem kepemerintahan yang lugas dan melayani. Sehingga keberpihakan pemerintah bisa betul-betul dirasakan masyarakat, baik apakah itu sebagai konsumen ataupun sebagai pelaku usaha.

Tantangan untuk menyelenggarakan birokrasi yang melayani pun bukanlah tugas yang mudah, karena untuk dapat merevolusi budaya kerja pemerintah, butuh ekstra kehatian-hatian agar tidak sampai melanggar norma atau rambu-rambu yang berlaku dalam sistem kepemerintahan. Namun ada beberapa catatan yang ingin penulis sampaikan terkait dengan semangat birokrasi ke depannya.

Pertama, inovasi layanan cenderung mulai menjadi kebutuhan primer untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah, sehingga insan-insan kreatif sudah sewajarnya dapat dipupuk agar dapat berkembang dengan baik. ASN perlu didorong agar kritis dan terbuka terhadap kondisi lingkungannya, serta memiliki keberanian untuk menghadapi risiko-risiko yang terukur. Sumber inovasinya bisa berasal dari kepekaan pemerintah terhadap barrier yang dialami masyarakat. Jadi pola komunikasi seharusnya didesain dengan cara yang lebih cair dengan konsumen (dalam hal ini adalah masyarakat).

Kedua, perspektif mengenai ASN perlu dikondisikan sebagai aset paling berharga dari organisasi pemerintah. Sistem *reward and punishment* sangat layak untuk diterapkan agar kinerja dari ASN dapat lebih bertenaga. Kompetisi yang sehat juga perlu dibangun agar setiap ASN memiliki semangat yang tinggi untuk berkontribusi. ASN yang kreatif berhak mendapatkan apresiasi yang layak, sedangkan yang kinerjanya di bawah target tidak semata-mata dihukum, tetapi bisa juga dibina agar memiliki semangat yang sama dengan rekan-rekan sejawatnya. Tujuannya adalah agar setiap ASN bisa memiliki motivasi untuk lebih berkontribusi terhadap kinerja organisasinya.

Ketiga, kendati pemerintah menerapkan sistem organisasi yang sangat terstruktur, namun ada baiknya pola struktural ini tidak sampai menghambat komunikasi yang erat dan terbuka

antargolongan ASN. Setiap kepala/pejabat struktural perlu diarahkan agar memiliki pola hubungan yang cair dengan staf/ bawahannya hingga batas-batas tertentu. Sehingga pejabat-pejabat tersebut juga memiliki kepekaan atas hambatan-hambatan kinerja yang dialami anggotanya. Perubahan gaya manajerial bisa dimulai dari perubahan gaya kepemimpinan. Citra ASN yang ramah, harmonis, dan bertenaga mestinya mulai ditonjolkan agar modal sosial dengan masyarakat bisa berkembang dengan baik.

Keempat, sinergi dengan masyarakat melalui fasilitas teknologi informasi seharusnya juga bisa dimanfaatkan dengan optimal, mulai dari sistem perencanaan kebijakan hingga evaluasi pelaksanaan/kinerja pemerintahan. Hingga saat ini sudah begitu banyak akses informasi yang dibangun, tetapi kurang bisa dimanfaatkan karena minimnya tenaga ahli yang bisa mengelola perkembangan teknologi informasi sebagai media *sharing* dan curhat dengan masyarakat. Alhasil banyak fasilitas yang kurang optimal penggunaannya. Selain itu banyak ruang informasi yang kurang *update.* Mestinya dengan perkembangan yang sekarang ini terjadi, gaya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat didesain agar lebih santai dan interaktif serta memiliki respons yang cepat.

Jika dielaborasikan, maka tahap kebijakannya berkutat pada hilirisasi produksi lokal terutama UMKM, penguatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi, penyediaan ekosistem yang unggul pada zona-zona industri strategis, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan investasi asing untuk tujuan transfer *knowledge,* penguatan SDM, dan beberapa paket insentif fiskal. Beberapa sektor yang terpilih sebagai prioritas diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri automotif, industri elektronik, industri kimia, serta industri tekstil

dan produk tekstil. Kelimanya secara eksisting memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena sesuai dengan potensi dasar yang kita miliki.

Dari persoalan tersebut, mungkin persoalan SDM mendapatkan ranking tertinggi untuk permasalahan yang perlu dituntaskan dari awal, mengingat SDM merupakan kunci perubahan. Dalam perspektif organisasi pemerintahan, perbaikan kinerja SDM bisa dilakukan dengan proses assessment dan edukasi terhadap perangkat ASN, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi kinerja. Tujuannya adalah agar pemerintah mendapatkan orang-orang terbaik dan untuk melahirkan sistem evaluasi yang akurat. Selain itu prioritas pembangunan juga perlu disosialisasikan dan diawasi dengan benar agar orientasi kinerja di setiap organisasi tidak tumpang-tindih.

Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua persoalan dengan sekaligus. Jadi kendati banyak pintu organisasi dan fungsi, tetapi muara kebijakannya memiliki arah dan tujuan yang sama. Dan selama ini persoalan tersebut cenderung menjadi permasalahan yang katalis. Mungkin salah satunya juga disebabkan sistem komunikasi dan kepemimpinan yang kurang didesain dalam satu frame logika yang sama.

Dan yang terakhir revolusi industri 4.0 sebenarnya tidak hanya akan terjadi pada masyarakat selaku kelompok bisnis, karena organisasi pemerintah pun juga akan segera terdampak. Jumlah ASN dalam masa depan juga sangat terbuka akan terus berkurang karena semakin giatnya digitalisasi struktur layanan kepada masyarakat. Proses perubahan ini ketika berjalan lancar, suatu saat mungkin akan dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bagi sebagian pihak. Tetapi sejatinya ketika kita bisa mengelolanya dengan proses transisi yang baik, justru akan memberikan banyak

keuntungan bagi kita. Perubahan akan terus bergerak menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu, jika ASN berharap mendapatkan *rewards* yang lebih baik serta menginginkan organisasinya bisa memiliki akses fiskal yang lebih longgar, maka seyogyanya mereka harus mampu mengelola sumber daya fiskal dan SDM-nya dengan kualitas yang semakin efisien.

Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah. Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintahan. Birokrasi, dalam keadaan demikian, hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat.

Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari"jalan pintas" dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari "kesempatan" dalam "kesempitan" agar mereka dapat menciptakan rente dari pelayanan berikutnya.

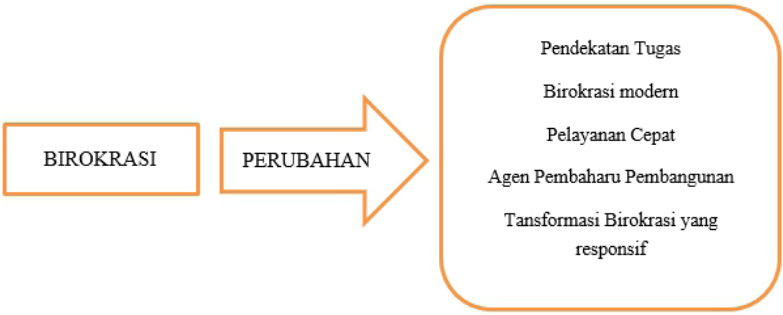
Guna merespons kesan buruk birokrasi, maka birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya (Benveniste, 2001) antara lain:

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayom dan pelayan masyarakat

dan menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.

2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya, yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efi siensi biaya dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memosisikan diri sebagai agen pembaharu pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid), menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih esentralisasi, inovatif, fl eksibel dan responsif.

Kondisi di atas akan terlihat hubungan dan gambaranyya dalam bentuk gambar sebagai berikut; Gambar 4.1 Perubahan sikap dalam birokrasi adaptasi dari Benveniste (2001)



Salah satu dampak besar pandemi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia adalah bidang pelayanan publik yang menuntut perubahan dalam birokrasi pelayanan publik dalam dimensi organisasi dan sistem kerja.

Perubahan dan dinamika di masyarakat senantiasa terjadi seperti pada saat pandemi ini dimana memerlukan sebuah model komunikasi birokrasi yang dapat memecah seluruh hambatan dan kelambanan dalam pelayanan publik. Sebuah penelitian dideskriptifkan terhadap kearifan lokal sebagai kolaborasi budaya lokal yang diterima lingkungan internal dan eksternal serta temuannya direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak praktis dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi dalam model komunikasi birokrasi berbasis kearifan lokal.

Pelaku usaha.

Manusia saat ini hidup di abad keempat kemanusiaan.Fase pertama menjadi manusia. Yang kedua menjadi beradab, ketika menciptakan uang. ketiga menjadi komersial, ketika menciptakan bank. Di abad keempat kemanusiaan ini, kita telah mengubah diri kita menjadi Manusia Digital. Dengan demikian Teknologi mengubah cara kita berbicara, berdagang, dan bertransaksi.

Manusia sekarang berinteraksi dengan teknologi setiap melakukan bisnis, berteman, dan menjalani kehidupan kita. Apa artinya ini untuk bisnis, perbankan, masyarakat dan pemerintah? Apa artinya ini bagi Anda? Manusia Digital mengeksplorasi transformasi yang telah mendisrupsi seluruh bidang kehidupan: dominasi raksasa digital global; munculnya struktur keuangan baru (*FinTech);* gangguan yang disebabkan oleh Bitcoin; munculnya robot; dan jatuhnya bank.

Revolusi manusia yang terakhir sekaligus terbesar adalah revolusi industri. Sebelum itu, ada kebangkitan peradaban selama revolusi yang kedua pada lima ribu tahun yang lalu. Dan sebelum itupun, kita memiliki revolusi kemanusiaan yang besar untuk pertama kalinya, yaitu menjadi diri manusia itu sendiri. Dampak luar biasa dari revolusi digital yaitu menciptakan peradaban keempat dalam kemanusiaan, dimana kita terhubung satu sama lain secara *real time* untuk pertama kalinya.

Saat ini, semua orang mampu saling terhubung melalui telepon seluler (ponsel). Dengan pemanfaatan teknologi, fungsi telepon bertransformasi menjadi jauh lebih cerdas, yaitu menjadi *trading machine*. Dengan demikian, transaksi perdagangan dapat dilakukan secara *real time*.

Manusia digital mengambil ide dari jaringan "*Digital Bank and Value*" dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih luas. Bagaimana implikasi bagi kemanusiaan, perdagangan dan perniagaan, dan hal yang paling menggembirakan dari segala hal, masa depan kita. Apa yang terjadi dalam digitalisasi kemanusiaan kita adalah kita mengikis batas dan mengatasi pengecualian.

Pengecualian keuangan berlaku untuk hampir dua pertiga umat manusia. Pengecualian keuangan menciptakan tantangan karena sulit untuk bertransaksi dan berdagang atau mencapai perubahan nyata jika anda tidak dapat mengirim atau menerima uang. Oleh karena itu, digitalisasi kemanusiaan harus mencapai keikutsertaan semua orang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sistem -sistem jaringan seluler tepatnya- termasuk semua orang.

Digitalisasi di dunia membawa perubahan yang besar. Setiap orang di seluruh dunia ini akan dimasukkan dalam jaringan dan semua orang di planet ini akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara, berdagang, dan bertransaksi dengan semua orang

di belahan bumi lainya secara *real time*. Tidak seperti revolusi industri, di mana hanya sejumlah kecil manusia yang memperoleh akses menuju kekayaan dan perdagangan, revolusi digital ini akan memberi semua orang peluang.

REVOLUSI KEMANUSIAAN : MANUSIA DIGITAL

Ada tiga revolusi besar dalam sejarah manusia: pertama-tama kita membentuk komunitas, peradaban berikutnya, dan kemudian industri. Kita saat ini hidup melalui revolusi besar keempat dalam sejarah umat manusia, dengan yang kelima di masa depan yang tidak terlalu jauh jaraknya. Dan dalam setiap revolusi umat manusia, pada gilirannya, menciptakan revolusi dalam pertukaran moneter dan nilai. Itulah sebab penting untuk merenungkan masa lalu untuk memahami saat ini dan juga meramalkan masa depan.

1. **Zaman Pertama: Penciptaan Keyakinan Bersama**
   Keyakinan bersama adalah hal inti yang menyatukan manusia dan mengikat mereka. Inilah yang memungkinkan kita untuk bekerja bersama dan melanjutkan satu sama lain, atau tidak, sebagaimana adanya. Berdasarkan tema ini sebagai penciptaan perbankan dan uang adalah semua tentang kepercayaan bersama bahwa hal-hal ini penting dan memiliki nilai. Tanpa keyakinan bersama itu, perbankan, uang, pemerintah, dan agama tidak akan memiliki kekuatan. Mereka tidak akan berarti.

2. **Zaman Kedua: Penemuan Uang**
   Ada kebutuhan akan suatu sistem dan para pemimpin agama di masa itu -pemerintah jika Anda lebih suka-merespons dengan menciptakan uang. Sejak awal, uang telah menjadi mekanisme kontrol masyarakat dan ekonomi.

Negara-negara yang memiliki uang menghormati sistem ekonomi; sedangkan negara yang tidak memiliki uang, mereka tidak menghormati sistem ekonomi.

3. **Zaman Ketiga: Revolusi Industri**
   Revolusi industri kurang lebih dapat disejajarkan dengan kemunculan tenaga uap. Sementara zaman uap menciptakan banyak inovasi baru, yang mengubah dunia adalah penemuan mesin uap. Rentang momen transformasional yang muncul selama masa ini memuncak pada inovasi listrik dan telekomunikasi pada akhir abad ke-19. Ketika revolusi industri mendorong kemajuan penuh, diperlukan suatu bentuk pertukaran nilai baru. Sudah ada beberapa inovasi tetapi tidak ada yang menjadi arus utama sampai revolusi industri menuntutnya. Untuk mengatasi kebutuhan akan bentuk pertukaran nilai baru ini, pemerintah dunia mulai memberi mandat dan melisensikan bank untuk memungkinkan pertukaran ekonomi.

4. **Zaman Keempat: Zaman Jaringan**
   a. Perbedaan utama diantara keempat zaman dan mereka yang telah pergi sebelumnya adalah runtuhnya waktu dan ruang. Kita dapat berbicara, bersosialisasi, berkomunikasi dan berdagang secara global, secara *real time* dan hampir gratis. Saat ini, kita memiliki penyimpanan dan konektivitas yang hampir tidak terbatas, berkat biaya teknologi yang semakin berkurang. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam revolusi ini adalah kita dapat menyediakan komputer yang jauh lebih kuat daripada apa pun yang datang

sebelumnya dan meletakkannya di tangan semua orang di planet ini sehingga semua orang berada di dalam jaringan. Setelah berada di dalam jaringan, Anda memiliki efek jaringan, yang menciptakan kemungkinan eksponensial karena semua orang sekarang dapat berdagang, bertransaksi, berbicara, dan menargetkan satu-lawan-satu, *peer-to-peer* (komunikasi dua arah dalam satu *server*).

b. Jaringan sebagai zaman keempat kemanusiaan adalah sebuah transformasi besar dan menunjukkan bahwa manusia bergerak dari satu suku menuju komunitas untuk menghubungkan komunitas yang terhubung ke platform tunggal, yaitu internet.

5. **Zaman Kelima: Masa Depan**

ketika kita baru saja memulai *Internet of Things* (IoT), dan membangun *Internet of Value* (IoV), orang-orang sudah membayangkan masa depan di luar hari ini. Akan seperti apa dunia seabad dari sekarang? Nah, ada beberapa petunjuk. Kami tahu bahwa kami telah membayangkan robot selama beberapa dekade, dan robot pasti akan menyebar dan ada di mana-mana dalam seratus tahun ke depan karena bahkan IBM mendemonstrasikan hal-hal seperti itu hari ini. Satu abad dari sekarang, kita tahu kita akan bepergian melalui ruang angkasa. Kita akan memiliki mobil pintar, rumah pintar, sistem pintar, dan kehidupan cerdas. Jadi, di zaman kelima manusia ini, di mana manusia dan mesin menciptakan manusia super, apa yang akan terjadi dengan sistem pertukaran nilai? Yah, itu bukan uang dan bahkan mungkin tidak akan menjadi

transaksi data tetapi, sebaliknya, beberapa struktur lainnya. Uang mungkin tidak lagi menjadi sistem yang bermakna pada zaman kelima. Memiliki uang digital pada zaman keempat, itu hanya akan menjadi sistem kredit dan debit yang universal. Digit pada jaringan merekam pengambilan dan pemberian kita; hidup dan penghasilan kita; pekerjaan dan kesenangan kita.

EVOLUSI ZAMAN DIGITAL

Bersamaan dengan revolusi dalam kemanusiaan, kita juga telah melihat evolusi dalam digitalisasi. Kemanusiaan digital tidak mendadak muncul dalam semalam; hal tersebut telah muncul selama tujuh puluh tahun terakhir. Banyak orang satu dekade lalu, misalnya, berbicara tentang web 2.0, internet generasi kedua. Setelah bekerja dengan teknologi sepanjang hidup saya, saya benar-benar berpikir kita berada dalam evolusi keempat dalam teknologi. Digital 4.0 jika Anda suka. Oleh karena itu, di samping pemahaman kita tentang kemanusiaan yang hidup melalui transformasi digital, penting untuk memahami asal-usul dan kemunculan bagaimana transformasi digital telah berkembang.

Generasi pertama dari internet modern lahir pada tahun 1990, sekitar empat puluh lima tahun setelah kelahiran komputasi. Sejak itu setiap generasi internet telah berlangsung sekitar sepuluh tahun. Pada 2000-an, ada web 2.0. Sekarang kami sedang mengembangkan web 3.0, internet yang bernilai. Segera kita akan memasuki era *Internet of Things*, web 4.0. Kemudian, pada 2030-an, kita akan terbenam di web semantik, web 5.0.

a. Web 1.0: Awal Jaringan

Hampir setengah abad perkembangan teknologi mengarah pada peluncuran web seperti yang kita kenal sekarang, mengikuti

makalah Tim Berners-Lee yang merinci HTML dan URL. Ini terjadi pada 1990 dan, selanjutnya, internet berubah hampir di setiap dekade. Situs web pertama cukup mendasar seperti kebanyakan situs web awal. Sebagian besar situs ini diluncurkan oleh perusahaan akademik dan penelitian, dan ada di sana untuk mengumpulkan informasi. Meskipun situs web ini terutama menyediakan informasi, beberapa menyajikan secara visual daripada yang lain tetapi tidak ada yang interaktif. Fitur utama dari internet generasi pertama ini adalah bahwa internet sangat terkontrol dan terstruktur. Bisnis menjalankan internet. Situs web ditawarkan oleh bisnis ke konsumen (B2K) dan bisnis ke bisnis (B2B). Mengikuti layanan informasi, perdagangan memungkinkan web untuk benar-benar melesat.

b. Web 2.0: Awal Jaringan Sosial

Zaman web 2.0 adalah kombinasi faktor dari ponsel pintar ke ponsel dengan kamera ke internet seluler, dikombinasikan dengan aplikasi seluler sosial.

c. Web 3.0: Internet Pasar

Web 3.0 bukan hanya tentang *Internet of Value* (IoV). Pelanggan membuat struktur jaringan nilai mereka sendiri. Individu itu sendiri yang membuat dan berbagi konten di media sosial. Ini semua tentang memindahkan kita dari struktur kontrol yang terintegrasi secara vertikal ke pasar dengan proses *"plug-and-play"* yang dikirimkan melalui platform. Pasar-pasar ini adalah platform digital untuk berbagi ekonomi.

d. Web 4.0: Tahun 2020 dan Internet untuk Segalanya

Ini bukan hanya mengenai perangkat internet, melainkan

seluruh teknologi dari robotik hingga kecerdasan buatan hingga pembelajaran mesin, dikombinasikan dengan *Internet of Things* (IoT). Teknologi ini sudah dijalankan dalam setiap aspek kehidupan kita, dari penerangan jalan hingga mutasi gen, dan mengubah dunia kita menjadi struktur cerdas yang terhubung. Idenya adalah Anda dapat menempatkan chip di dalam apa saja dan membuatnya pintar. Jalan pintar, bangunan pintar, kota pintar, orang pintar.

e. Web 5.0: Web Semantik

Ungkapan Semantic web ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 2001 dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh ilmuwan Amerika, yang ikut menulis bersama James Hendler dan Ora Lassila. Mereka mendefinisikannya sebagai internet yang "akan memungkinkan mesin untuk memahami dokumen dan data semantik, bukan ucapan dan tulisan manusia". Apa pun sebutannya, pada tahun 2030-an, sangat jelas bahwa kita akan memiliki planet yang berjejaring dengan perangkat yang secara cerdas berniaga di jaringan itu. Di mana robot memiliki kecerdasan yang sangat baik atau, dalam banyak kasus, lebih baik daripada manusia. Jauh lebih mungkin bahwa pada periode ini, kita secara otomatis akan memiliki sebagian besar tugas-tugas "kasar" serta banyak dari mereka yang saat ini membutuhkan keterampilan kognitif. Sebenarnya ada tiga tingkat kecerdasan buatan:

1) Kecerdasan sempit buatan *(Artificial narrow intelligence)*
2) Kecerdasan umum buatan *(Artificial general intelligence)*
3) Kecerdasan super buatan *(Artificial super intelligence)*

KEBANGKITAN ROBOT

Isu terkini dalam teknologi saat ini adalah pembelajaran mesin dan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Ada

yang lain seperti perdagangan kontekstual, pengenalan suara dan asisten digital, tetapi pembelajaran mesin dan AI adalah yang terbaik. Pembelajaran mesin itu merupakan prioritas tertinggi karena dapat memberikan manfaat langsung bagi bisnis dalam meningkatkan alur kerja dan proses. Pembelajaran mesin dapat menghemat biaya produksi dan biaya tak terdua lainnya, di sini, sekarang.

IBM Watson mungkin adalah AI paling terkenal di dunia nyata, setelah memenangkan game show AS Jeopardy! Jauh di tahun 2011. Watson (dinamai pendiri IBM, Thomas J. Watson) adalah teknologi kognitif yang memproses informasi lebih seperti manusia daripada komputer. Sistem ini didasarkan pada komputer super IBM yang menggabungkan AI dengan perangkat lunak analitis canggih untuk menyediakan mesin "penjawab pertanyaan".

Jadi, apa gunanya semua pengembangan AI ini? Nah, di perbankan, ini sangat penting karena raksasa teknologi pada dasarnya melatih jaringan besar mesin untuk mengidentifikasi wajah dalam foto, mengenali kata yang diucapkan dan langsung menerjemahkan percakapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini berarti bahwa tidak hanya orang yang dapat berbicara dengan bank mereka adalah mesin, tetapi bank yang juga mesin dapat segera mengenali transaksi yang benar versus penipuan.

Tentu saja, kita akan melihat semakin banyak penggunaan AI untuk semuanya mulai dari tampilan pengguna yang lebih sederhana, peningkatan pengalaman pelanggan, deteksi penipuan otomatis dan layanan yang sangat personal, proaktif, dan prediksi. Bank telah lama mencoba mengganti tenaga manusia dengan mesin. Ini disebut sebagai sistem perdagangan aktif (manusia) versus pasif (mesin). Dengan perdagangan frekuensi tinggi dan teknik lainnya, dikombinasikan dengan mesin pembelajaran

mesin dan AI, kita dapat menghilangkan kebutuhan akan tenaga manusia.

Area yang dikritisi dalam hal ini adalah integrasi robotika dan kecerdasan buatan. Dalam revolusi industri, orang berpindah dari ladang ke pabrik; dalam revolusi layanan, orang-orang pindah dari pabrik ke kantor; dalam revolusi digital, orang pindah dari kantor ke apa? Itulah tema dari beberapa komentator yang mengklaim bahwa tidak ada pasar kerja generasi berikutnya, dan bahwa otomatisasi kemampuan kognitif manusia menghilangkan kebutuhan akan manusia sepenuhnya.

Jika robot dapat melakukan segala hal yang dapat dilakukan manusia dan melakukannya dengan lebih baik, apa yang akan dilakukan manusia? Ada dua kubu: optimis dan pesimis. Orang yang optimis percaya bahwa pekerjaan memiliki nilai, dan bahwa robot tidak dapat melakukan semua yang dapat dilakukan manusia. Pesimis percaya bahwa robot akan mengambil semua pekerjaan kita.

Dalam visi masa depan ini, mereka yang bekerja memilih untuk bekerja atau dipilih untuk bekerja, berdasarkan keterampilan ultra-kognitif mereka. Akan ada penambah robot, perancang cerdas artifisial, mesin enabler dan banyak lagi, yang akan ada di sana untuk melanjutkan pengembangan mesin di atas dan di luar tempat yang ada saat ini.

Jika kita memindahkan semua pekerja manusia dengan robot, apakah menurut Anda dunia akan berakhir? Itu tidak akan berakhir kecuali orang kehilangan motivasi untuk bekerja, karena itulah yang membuat manusia menikmati hidup, dan ada imbalan untuk pekerjaan itu, karena itulah yang mendorong ekonomi.

Mengganti manusia dengan robot hanya membuat kita semua pecandu menjalani gaya hidup narsis dalam ekonomi

yang jatuh bebas. Itu sebabnya saya tidak berpikir bahwa robot akan mengambil alih segalanya. Akan selalu ada kebutuhan bagi manusia di suatu tempat.

MASA DEPAN KEMANUSIAAN

Dunia masa depan untuk beberapa abad mendatang semuanya akan tentang kolaborasi manusia/ mesin. Teknologi tidak akan menyingkirkan manusia dan pekerjaan manusia, juga tidak akan menciptakan ras manusia super dan sub-manusia. Sebaliknya, kita akan melihat dunia masa depan manusia yang menjelajahi dunia lain, hidup di planet lain dan mencari sisi kemanusiaan yang lebih baik.

Sebuah laporan yang diberikan Organisasi Riset Ilmiah dan Industri Persemakmuran (CSIRO), sebuah badan Pemerintah Australia, telah mendaftarkan sepuluh kekuatan utama yang mengubah dinamika pekerjaan.

1. Meningkatnya kepentingan pendidikan dan pelatihan
2. Kebutuhan akan kemampuan baru untuk pekerjaan baru di masa depan
3. Kebutuhan akan literasi digital disamping numerasi dan literasi
4. Pentingnya perubahan STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics)* sementara tingkat partisipasi menurun
5. Bakat dan pola pikir untuk menangani pasar tenaga kerja yang dinamis
6. Persepsi dan norma yang menantang tentang jenis pekerjaan
7. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam demografi

yang rentan

8. Kebutuhan untuk bergerak menuju model lancip retirement
9. Model baru untuk memperkirakan persyaratan transisi pekerjaan
10. Peningkatan pemahaman tantang ekonomi *peer-to-peer* (dan freelancer)

Laporan *"Future of Job"* dalam Forum Ekonomi Dunia menemukan perubahan besar berupa rangkaian keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang dalam pandangan baru di tahun 2020.

1. Pemecahan masalah yang kompleks
2. Berpikir kritis
3. Kreativitas
4. Manajemen SDM
5. Berkoordinasi dengan orang lain
6. Kecerdasan emosional
7. Penilaiann dan pengambilan keputusan
8. Orientasi layanan
9. Negosiasi
10. Pengetahuan yang fleksibel

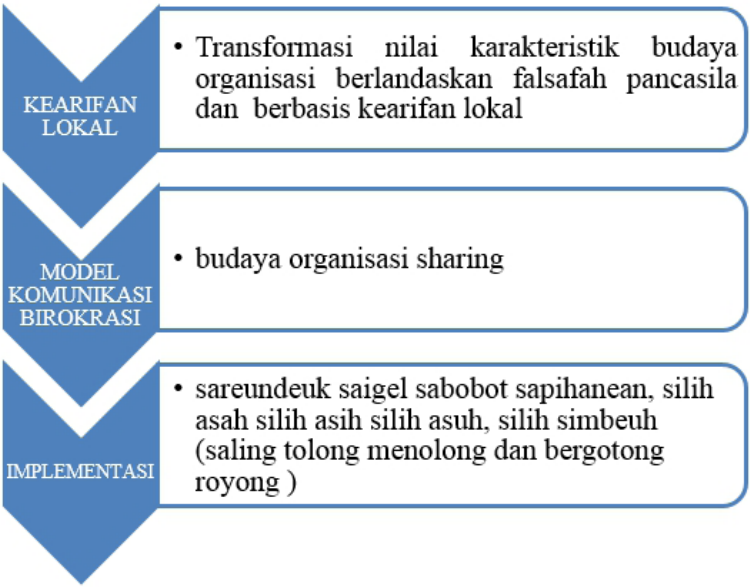
Berdasarkan kondisi di atas sudah barang tentu ,birokrat sebagai pelayan harus mampu bukan hanya memahani tetapi mengikuti bahkan menjalankan bagaimana peradaban teknologi berjalan dalam kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Human digital sangat dibutuhkan dalam menjembatani antar kembutuhan masyarakat negara dengan kebutuhan untuk hidup tenang,damai dan sejahtera . prubahan akan tuntutan

keterampilan dan kemampuan manusia di tahun 2020 sebuah keniscayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berbasis teknologi. Model komunikasi digital merupakan sebuah alat yang dapat menjembatani bagaimana tugas ,kemampuan dan teknologi berperan dalam menyampaikan berbagai program, tujuan dan nilai berdasarkan teknologi sehingga akan nampak jelas baik dan buruknya kinerja birokrat sebagai pelayan masyrakat.

C. Trasformasi Model Komunikasi Digital Birokrat

Pada masa era digital ini budaya organisasi yang harus dianut yaitu budaya organisasi yang kuat dimana budaya organisais kuat ini mengacu pada situasi dimana karyawan dapat menyesuaikan diri dengan baik, menghormati kebijakan organisasi, dan mematuhi semua pedoman organisasi yang berlaku.

Dalam budaya organisasi yang kuat seperti ini setiap orang yang terlibat merasa sangat menikmati pekerjaan mereka dan menjadikan setiap tugas kerja sebagai pembelajaran baru. Transformasi nilai karakteristik budaya organisasi *sharing* dari kearifan lokal berlandaskan falsafah pancasila dan hasil penelitian berbasis kearifan lokal "*sareundeuk saigel sabobot sapihanean, silih asah silih asih silih asuh, silih simbeuh* di tataran sunda dengan simbol budaya kebesaran kerajaan Sumedang menjadi landasan untuk berubah pola pikir sebagai bentuk modal sosial dan meningkatkan kompetensi daya saing Indonesia menghadapi masa pandemi ini.



Gambar 4.3 Model Komunikasi Birokrasi Berbasis Kearifan Lokal di Masa Pandemi
(Mulyaningsih, 2020)

Perubahan- perubahan yang terjadi sebagai bagian dari kondisi pandemi dan dinamika masyarakat sudah saatnya untuk melakukan peluncuran (*launching*) sebuah model komunikasi birokrasi dengan berbasis kearifan budaya lokal dengan harapan tujuan pelayanan publik dapat efektif serta optimal oleh karena masyarakat sangat berharap dapat hidup secara normal walaupun kondisi berada pada era new normal. Sinergi pada semua pihak terkait untuk adaptasi dan implementasi model tersebut memerlukan keinginan yang kuat dari semua pihak dengan memahami, menelaah dan melaksanakan dalam setiap tataran birokrasi untuk tugas mulia sebagai pelayan publik.

Dalam mendukung pengembangan ekonomi di wilayah perdesaan, diperlukan peningkatan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat dan industri olahan berbasis sumber daya lokal Tidak pernah lepas dari pengaruh perubagahan secara global, revolusi industri 4.0 bahkan dampak dari pandemi covid -19. Secara langsung dampak pandemi covid-19 kurang dirasakan cepat untuk di daerah mengungat masih kuatnya kearifan lokal dalam mengatasi kondisi yang terjadi sehari –hari tapi secara panjang perlu adanya desain perubahan secara adminsitrasi , perilaku birokrasi dan budaya organisasi yang telah disesuaikan dengan paradigma yang berjalan.

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan antara lain: (a) menyusun pedoman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui satu pintu untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan bagi suatu jenis usaha di daerah. Dengan sistem ini, proses perizinan yang semula harus dilakukan melalui beberapa meja yang ada di beberapa instansi, proses perizinan dilakukan di satu tempat yang dikelola oleh suatu unit kerja tertentu sehingga memangkas rantai birokrasi yang panjang; (b) menyusun pedoman tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah, untuk meningkatkan daya jual/ saing program investasi daerah. Melalui upaya ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mempunyai daya tarik tinggi bagi para investor; dan (c) diselenggarakannya forum-forum promosi berbagai produk unggulan dan program-program investasi unggulan daerah, sebagai wujud pelaksanaan peran pembinaan kepada pemerintah daerah. Selain itu, untuk mengembangkan ekonomi

lokal, Pemerintah juga meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kawasan agropolitan serta meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan melalui percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP).

Pembangunan infrastruktur perdesaan perlu dilanjutkan untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di perdesaan secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pengembangan pola hubungan hulu-hilir dalam mencapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan, (b) percepatan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, situ) terutama di daerah selatan khatulistiwa dan wilayah strategis, (c) pengendalian pemanfaatan air tanah sejalan dengan optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah, dan (d) pengendalian pencemaran air dengan meningkatkan pemantauan kualitas air untuk mengendalikan limbah domestik dan industri. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan di perdesaan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas luar pulau Jawa untuk mengimbangi alih fungsi lahan yang terjadi, (b) optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastuktur irigasi, (c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dan (d) rehabilitasi areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama pada daerah-daerah andalan penghasil padi, serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan saluran irigasi.

Transformasi yang sedang berlangsung dan berkembang adalah

strategi pembangunan nasional dalam konteks globalisasi ekonomi internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dan dalam transisi mungkin harus menyesuaikan kebijakan pajak mereka, administrasi, dan undang-undang termasuk dimensi internasional dari sistem pajak nasional terhadap perubahan domestik, ekonomi, fiskal, dan keuangan lingkungan eksternal. Globalisasi, liberalisasi, perjanjian perdagangan internasional, dan upaya untuk menarik modal asing telah membujuk negara-negara berkembang, untuk sering mengistimewakan faktor penggerak keuangan dengan mengorbankan tenaga kerja dan menahan kebutuhan untuk membangun atau memperkuat sistem pajak progresif.

Pengalaman masa lalu juga menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat atau menempatkan sistem pajak yang adil dan merata, yang meminimalkan disinsentif untuk efisiensi ekonomi yang sederhana (mudah dimengerti dan mengelola), yang menghilangkan penggelapan dan penghindaran, yang cukup fleksibel untuk mengamankan penerimaan pajak yang adil dari pendapatan disebabkan instrumen keuangan yang inovatif, dan yang memungkinkan untuk secara bertahap memperluas basis pajak dan mengintegrasikan sektor informal dalam arus utama perekonomian. Pemilihan pajak dan bea perlu memastikan bahwa mereka layak secara administratif dan mengakibatkan pengumpulan pendapatan yang realistis. Sistem ini harus melindungi pendapatan nasional dari *havens* pajak, dan tempat penampungan lainnya sehingga mencegah dari persaingan lokasi menjadi perlombaan ke bawah.

Sebuah proses anggaran yang transparan dan menghubungkan pendapatan untuk pengiriman meningkatkan akuntabilitas dan melegitimasi pengumpulan pendapatan, hasil yang sukses dari

program publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebuah sistem administrasi perpajakan yang transparan, efisien, bebas dari korupsi, dapat memperluas pengumpulan pendapatan. Sementara mobilisasi sumber daya domestik dalam jangka panjang penting untuk pembangunan berkelanjutan, untuk sejumlah besar negara-negara maju, akan ada kebutuhan untuk sumber daya eksternal yang substansial untuk membuat langkah besar dalam pengentasan kemiskinan.

Pajak memainkan peran penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Fungsi yang paling penting adalah untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai program-program pengeluaran pemerintah. Apakah pajak dapat membantu dalam mendistribusikan pendapatan atau memberikan bantuan yang ditargetkan adalah pertanyaan yang sulit, jawaban yang tergantung pada faktor-faktor tertentu. Namun, hingga pajak penghasilan pribadi memainkan peran yang lebih besar di negara berkembang, redistribusi melalui perpajakan akan sangat sulit. Bahkan kemudian, kompetisi pajak penghasilan dari negara lain dan keterbatasan administrasi pajak akan membatasi kemampuan untuk menggunakan sistem pajak untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Menangani masalah kemiskinan melalui desain instrumen pajak tertentu mungkin lebih menjanjikan. Meskipun setiap usulan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam konteks sistem pajak secara menyeluruh, mengurangi jumlah individu yang dikenakan pajak penghasilan dan rating yang lebih rendah dari bahan makanan dasar tertentu dan manfaat bahan bakar sebagai pertimbangan serius.Penjelasan mengenai tasformasi kegiatan pemerintah yang berkenaan dengan bagaimana meningkatkan pelayanan dari birokrat sangat penting melalui digital mengingat semua komponen dari sistem sudah

menggunakan aplikasi digital.

Persoalan–persoalan di atas yang bukan saja menyangkut tentang perekonomian yang menyangkut desa, pajak dengan langkah-langkah kebijaknnya, penganggaran pembangunan infrastruktur desa, informasi kebutuhan dasar air baku dan sebagainaya sudah menggunakan aplikasi digital sebagai bentuk tantangan bagi birokrat untuk dapat mengkomunikasinyakannya pada masyarakat. Hal ini ditrasformasikan dengan menggunakan model komunikasi birokrat berbasis kearifan lokal atau *Sharing* (berbagi)Hal ini dapat dari beberapa hasil penerlitian di berbagai bidang dan instiitusi negeri maupun swasta.

Dengan adanya kebijakan akan kondisi dari pandemi yang diberlakukan di wilayah birokrat.

Trasformasi karakteristik *Sharing* (berbagi) merupakan bagian dari perilaku birokrasi harus diterapkan dalam berbagai trasformasi kegiatan di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya seperti di Indonesia dapat meningkatkan efektifitas organisasi. Mulyaningsih,2015,2017,2018 2020,terlihat dalam tabel di bawah ini :

Transformasi Karakteristik Budaya Organisasi *Sharing* (Berbagi) Sebagai Hasil Reubonding Nilai Local Wisdom Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi SDM Indonesia Di Abad 21								
Transformasi Dalam Bidang	Silih Simbeuh		Silih Asah Silih Asih Silih Asuh		Hasil Penelitian Generasi Muda		Hasil Penelitian Penerapan Nilai Etika	
	Jenis Nilai Karakteristik *Sharing*	Sikap Dan Pola Pikir	Jenis Nilai Karakteristik *Sharing*	Sikap Dan Pola Pikir	Jenis Nilai Karakteristik *Sharing*	Sikap Dan Pola Pikir	Jenis Nilai Karakteristik *Sharing*	Sikap Dan Pola Pikir
Ekonomi	Sama-sama rukun dan gotong royong	menjalin hubungan dengan "pengaman" dan pelaku usaha lain	-Sama-sama setia dan bertahan -Sama-sam setia	-besarnya jumlah tenaga kerja dari golongan berpendidikan rendah dan bahan baku yang berlimpah -hubungan Relasi antara subkontraktor	Sama-sama setia	bekerja sesuai dengan tugasnya	Sama sama setia dan semangat tinggi	memberikan kualitas pelayanan, meningkatkan kapasitas produksi dan mencari sumber daya
Budaya	Sama-sama setia dan bertahan	penggunaan budaya dagang Cina	sama-sama semangat juang tinggi	bentuk gender terhadap besar skala produksi dalam keterlibatan laki-laki	sama-sama semangat juang tinggi	budaya organisasi dengan dimensi; *involvement*		
Sosial	sama-sama semangat juang tinggi	hubungan pelaku usaha dengan sumber modal dan pemasok bahan baku	Sama-sama rukun dan gotong royong	sikap anti pemegang monopoli	-gotong royong -sama sama bertahan	-melakukan *adaptability* -adanya kemampuan anggota menyesuaikan kegiatan program senat	Sama sama rukun dan setia	aspek-aspek budaya organisasi memberikan pengaruh terhadap kinerja organisasi
Politik							Sama-sama rukun dan gotong royong	sikap Pimpinan diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan
Pendidikan							sama-sama setia,rukun berjuang tinggi guna	Penerapan strategi usaha yang berkaitan dengan rencana strategis dalam menggunakan sumber daya

Pelaksanaan kegiatan semasa pandemi dapat di jalankan di berbagai bidang seperti yang tertera dalam tabel di atas dengan mentrasformasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah diluruskan dengan pancasila (*rebounding*),berbasis kearifan lokal, dalam bentuk digital dalam berbagai bidang sesuai dengan kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi landasan *sharing* (berbagi) ditransformasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa pencegahan, memebantu dan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid -19.

D. Implementasi Model Komunikasi Digital Birokrat

Dalam katan antara birokrasi dan perubahan sosial, tidak semua perubahan sosial dalam masyarakat modern dilakukan secara birokratis. Berbagai kebiasaan baru dapat saja muncul tanpa intervensi birokrasi (Blau dan Meyer, 200:123), Pada inovasi atau penemuan baru, dapat dianggap sebagai sumber-sumber perubahan sosial yang dapat terjadi secara spontan, namun dalam masyarakat-masyarakat yang besar dan kompleks seperti pada masa sekarang ini, penerapan suatu kebijakan sosial yang baru tetap memerlukan suatu birokrasi.

Hasil penelitian menyajikan transformasi nilai karakteristik budaya organisasi melalui peluncuran model komunikasi birokrasi berbasis kearifan lokal, *silih simbeuh* yang telah di reubonding, gotong royong, saling setia dan bertahan-sama semangat juang tinggi, dengan sikap dan pola pikir dapat dijadikan modal sosial berupa pola berpikir dan berperilaku guna mengatasi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara. Mulyaningsih (2021) dan Riant

Nugroho Dwijowijoto (2004), birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar.

Pada dasarnya birokrasi merupakan sub sistem pemerintahan yang berkait langsung dengan operasionalisasi efektivitas kebijakan roda organisasi pemerintah dalam memimpin rakyatnya. Proses komunikasi digunakan untuk tujuan-tujuan komunikatif termasuk di dalam komunikasi birokrasi agar tujuan penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercapai (Fitriana Utami Dewi, 2011). Keterkaitan dengan posisi dan peran birokrasi yang harus berubah dikuatkan dengan pendapat ahli yaitu:

1. Dengan mengubah pola kerja birokrat yang mulai mengarah menggunakan media dan teknologi untuk mendukung Work from Home (WfH) agar pelayanan tetap berjalan selama pandemi covid-19, itu berarti bahwa perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yaitu *reinventing government* dan *good governance*.
2. Pemakaian system Work from Home (WfH), itu juga berarti pelayanan publik harus diciptakan sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi. Pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat ini

akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin baik pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin sejahtera dan governance tercipta.

3. Jadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penetapan dan pemakaian *Work from Home* (WfH) agar pelayanan tetap berjalan selama pandemi covid-19, itu sejalan dengan peran birokrasi yang harus berubah, yang salah satu tokoh ahlinya ialah Martin Albrow.

Konsep Birokrasi Martin Albrow ini adalah bahwa birokrasi yaitu organisasi yang memaksimumkan efisiensi dalam administrasi. Secara teknis, birokrasi juga mengacu pada mode pengorganisasian dengan tujuan utamanya menjaga stabilitas dan efisiensi dalam organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Birokrasi juga mengacu pada susunan kegiatan yang rasional yang diarahkan untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Ini berarti bahwa birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya kegiatan kerja.Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil diformat oleh aturan organisasi. Personil dalam bertindak tidak bisa seenaknya atau menggunakan caranya sendiri, tatapi harus bertindak mengikuti peraturan organisasi. Kemudian, terciptanya kondisi oganisasi birokrasi yang baik, tidak lepas dari peraturan atau sistem yang ada yang diberlakukan oleh organisasi itu sendiri. jika terjadi kekacauan kerja dalam sebuah organisasi modern, yang pertama kali disorot adalah sistem kerjanya, karena individu-individu yang berada di dalam struktur hanya bekerja mengikuti prosedur atau system, serta harus segera mengambil kebijakan dan perubahan.

Itulah alasan saya mengkaitkan pandangan Martin Albrow pola kerja birokrat yang mulai mengarah menggunakan media dan teknologi untuk mendukung Work from Home (WfH) agar pelayanan tetap berjalan. Karena pandangan ini sesuai kebijakan yang dilakuan demi mengatasi covid-19 Pada intinya dalam hal inilah yang menjadi bentuk implementasi keberadaan dari model komunikasi, *silih simbeuh* yang telah di *reubonding*, gotong royong, saling setia dan bertahan-sama semangat juang tinggi, dengan sikap dan pola pikir dapat dijadikan modal sosial untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi rasional yang netral pada skala yang besar pada saat ini. Dalam penelitian ini, perencanaan transformasi budaya organisasi harus menjadi prioritas utama untuk mewujudkan efektifitas penggunaan budaya berbagi, perlu adanya nilai luhur untuk efektivitas pendidikan di Indonesia dalam penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah. , seharusnya transformasi budaya berbagi nilai-nilai luhur yang sama - dengan saling membantu dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun yang mengacu pada visi dan misi, sama-sama serasi untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana pendidikan dalam bentuk melaporkan secara transparan, sama-sama setia melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan melaporkan setiap dana yang dikeluarkan secara transparan.

Model pola komunikasi birokrat dengan menggunakan media sosial telah memfasilitasi akses berbagai kelompok berbasis kearifan lokal termasuk kaum milenial. Model ini diberi nama 'NGOPI *SILIH SIMBEUH*.CoI' atau berbagi sambil minum kopi. Mulyaningsih, (2021) model ini berkontribusi pada peningkatan daya saing dan efektivitas birokrasi di organisasi pemerintahan di

era digital ini. Perubahan dan dinamika di masyarakat senantiasa terjadi melalui transformasi sebuah model komunikasi birokrasi diharapkan dapat memecah seluruh hambatan dan kelambanan dalam pelayanan publik. (2021)

Masa pandemi adalah masa dimana kondisi Negara atau organisasi tidak stabil dengan berbagai masalah dan perubahan kebijakan yang mungkin tidak popular dilain pihak birokrat sebagai pelayan publik harus meenyampaikan, membuat dan melaksanakan kebihakan yang mungkin tidak sesuai dengan konndisi masyarakat sehingga akan mengakibatkan gejolak masyarakat sebagai anggita yang harus dilayani dan bagaimanna pelayanan public harus dilakukakn oleh birokrat melalaui model komunikasi birokrat yang berbasis identitas diri sebagi alat yang mampu nyampaikan tugasnya dengan baik dn efektif sehinggan pelayan public bias jalankan dengan baik. Demikian hal tersebut di atas sebagai bentuk implementasi model pola komunikasi di masa pandem di Indonesia. Konsep awal adanya perubahan dari globalisasi, ervolusi industrai 4.0 juga masa pandemi menjadi landsan bagaiman implemenetasi model komunikasi birokrat di jalankan di masa pandemi. Berbagai pertimbangan dan faktor – faktor menjadi dasar dan dijalankannya komunikasi birokrasi.

Hal ini sudah dialankan oleh para birokrat kepala daerah yaitu Gubernur Jawa Barat, Bp Ridwan Kamil, Jawa tengah Bp Ganjar Pranoto dan DKI Jakarta Bp Anies Bawesda serta di implentasikan di berbagai komunitas daerah dan kota di masa pandemi dengan respondensi birokrat, emak-emak dan kaum melinial yang pelaksana kebijkan penangan covid- 19, yang membantu bagi yang sedang isoman serta yang terpapar Covid -19 di masyarakt sehingga daerah yang menjadi wilayahnya paham terhadap program serta kebijakan di masa pandemi untuk menjalankan kebiasaan dan

cara pencegahan peningkatan covid -19 melalui bentuk dan cara yang menggunakan media IT dan berbasis kearifan lokal dalam penekatannya baik secara perilaku maupun bahasa dan budaya.

Dalam negara demokratis, peranan masyarakat atau swasta sangat besar. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti akan mengarah kepada tercapainya kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dibandingkan masa lalu. Tingkat pendidikan dan kehidupan ekonomi yang semakin baik akan menyebabkan tuntutan masyarakat semakin tinggi dan akhirnya berpengaruh terhadap sistem kerja birokrasi pemerintah. Hal tersebut pada akhirnya akan mengarah pula pada kemungkinan perubahan sikap, peran, dan posisi birokrasi pemerintah. Perubahan sosial yang disebabkan oleh pengaruh budaya asing ataupun perkembangan teknologi baru cepat atau lambat pasti akan berpengaruh terhadap birokrasi pemerintah dan perubahan itu tidak mungkin dapat dibendung oleh birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah jangan sampai menutup diri namun sebaliknya malahan harus menyelesaikan diri terhadap perubahan tersebut karena jika tidak maka birokrasi pemerintahan akan terlindas oleh arus perubahan tersebut. Hal-hal yang saling berkaitan dengan posisi dan peran birokrasi yang harus berubah, pada masa pandemi covid-19 saat ini merupakan sebuah cikal bakal perubahan sosial. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kecanggihan teknologi yang dapat membantu birokrat untuk bekerja dari rumah menggunakan media dan teknologi untuk mendukung *Work from Home* (WfH) agar pelayanan tetap berjalan.

Penerapan birokrasi digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19. Selain untuk memberikan informasi update tentang penanganan Covid-19, birokrasi digital juga dapat menjadi way of services terbaik kepada masyarakat. Birokrasi digital

sangat memiliki peran penting di setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka efektivitas birokrasi di masa pandemi Covid-19. Karena dampak dari birokrasi digital adalah kecepatan pelayanan yang dirasakan masyarakat yang mana kecepatan pelayanan tersebut menjadi hal yang amat dinanti-nantikan. Standarisasi pelayanan menjadi hal terpenting selanjutnya untuk membuat birokrasi tetap berjalan efektif, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

.

BAB IV

Model Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi

Komunikasi dalam bentuk model dipergunakan birokrast dalam menjalankan kegiatan dan tugasnya, konten dari ilmu administrasi fungsi komunikasi merupakan sebagai alat untuk menjalankan administrasi untuk pembangunan. Masyarakat yang selalu berubah dan berkembang selalu bersifat dinamis dan hasil nya diinteraksikan satu dengan yang lainnya.

Perubahan antar manusia selalu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan perbaikan, penyempurnaan untuk kehidupan sesuai dengan kehidupan sehingga administrasi untuk pembangunan kehidupan atau sering disebut Administrasi Pembangunan. Nawawi (1999). Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang dikaukan secara terus menurus yang dijalankan untuk kehdupan manusia. acapkali disebut pembangaunan. Dalam hal ini pembanguan yang berkenaan dengan konsep Model komunikasi digital birokrat pada masa pandemi akan dibagi dalam 2 hal, yaitu :

a. Periode masa pembangunan sebelum pandemi, dan
b. Periode masa pembangunan masa pandemi
c. Selanjutnya akan diakhiri masa Periode Model Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi.

Dalam hal ini Administrasi Pembangunan Perumusannya memiliki 2 Ciri;

Dua ciri utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukan lebih majunya pendekatan Administrasi Pembangunan adalah ;

1) Ciri pokok pertama adalah orientasinya kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.

Bahkan Administrasi Pembangunan dimaksud untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (Basic change) di berbagai kegiatan / bidang kehidupan yang saling berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pembangunan.Thompson menyebut bahwa Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk " *innovate* " (melakukan perubahan)

2) Ciri pokok kedua, pendekatan Administrasi Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Usaha-usaha perubahan dibidang administrasi saling pengaruh mempengaruhi dengan perubahan-perubahan dibidang lain tersebut.

Perbaikan administrasi bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan pelayanan administrative usaha perbaikan dan perubahan dibidang tersebut diatas, supaya dapat terselenggara secara lebih baik.

Administrasi Pembangunan berarti kemampuan system Administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat pembangunan.Montgomery dan Esman dalam Development Administration in Malaysia, mengemukakan "Administrasi Pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (*The Development Of Administration*) dan juga berarti perbaikan dari pelaksanaan usaha pembangunan (*Administration Of The Development*).Siagian, 1974-4, merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut : "Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai

suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan ".

Pada pokoknya pendekatan Administrasi Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara / pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa (*Nation Building*) dan atau perkembangan sosial ekonomi. Perkembangan kearah kemajuan seringkali disebut pula oleh para cendikiawan sebagai Modernisasi.

S.P.Siagian (Administrasi Pembangunan,1978:2) Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleg suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini dalam menjalankan aktivitas pemerintahan terutama pemerintahan daerah adalah sistem administrasi pembangunan yang belum mendukung (jelek). Padahal lebih dari 40% dana APBN dan APBD habis untuk biaya membayar penggerak administrasi pembangunan (PNS). Keberadaan administrasi pembangunan dalam masa desentralisasi memegang peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sistem administrasi pembangunan yang baik pembangunan tidak akan berjalan baik atau bahkan kacau. Dengan demikian, upaya pembaruan birokrasi atau dalam bahasa lain reformasi birokrasi adalah suatu hal yang mutlak untuk segera dilakukan. Kelemahan utama selama ini adalah birokrasi kita yang sangat birokratik sehingga urusan menjadi tidak efisien dan sangat

lama Ada lima ciri administrasi yang umumnya ditemukan di negara berkembang.

Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik di Indonesia bersifat jiplakan (*imitative*) dari pada asli (*indegenous*). Di negara-negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Negara yang pernah dijajah umumnya mengikuti pola administrasi negara yang menjajahnya Di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatam-jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik penjajahnya, dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial. Administrasi kolonial itu sendiri diterapkan hanya di daerah jajahannya. Sementara di negaranya sendiri tidak dilaksanakan. Administrasi kolonial bersifat elitis, otoriter, menjauh dari masyarakat, lingkungannya, serta paternalistik. Pola administrasi kolonial ini diwarisi administrasi di negara-negara yang baru merdeka. Bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang terutama Indonesia.

Kedua, birokrasi di negara berkembang kekuarangan sumberdaya manusia terampil untuk menyelenggarakan administrasi pembangunan. Kekurangan ini bukan pada kuantitas, melainkan kualitas. Dari sisi kuantitas justru mengalami kelebihan, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (*overstaffed*). Yang justru kurang adalah administrator yang terlatih, dengan kapasitas manajemen, keterampilan-keterampilan pembangunan, dan penguasan teknis yang memadai. Gejala ini nampak pada besarnya jumlah yang diperlukan dalam proses rekruitmen. Di wilayah Sumatera Selatan pada 2006 misalnya, mengalokasikan pengangkatan sampai 8.126 orang.

Pertanyaannya sekarang apa memang benar sebanyak itu PNS yang dibutuhkan? Berapa perbandingan tingkat pendidikan yang tamatan SMP, SMU, S 1, dan S 2? Jangan-jangan setelah diangkat menjadi PNS perilaku mereka sama seperti selama ini di mana tidak ada diskripsi tugas yang jelas sesuai keahiannya. Sehingga tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakan atau apa yang dapat dikerjakan. Atau besarnya alokasi yang akan diterima ini memang kebutuhan karena dampak dari pemekaran kabupaten/kota. Sehingga membutuhkan banyak PNS. Pada umumnya penyebab utama keadaan kurangnya kemampuan ini mencerminkan kondisi dan tingkat pendidikan. Namun hal ini tidak dapat disamaratakan. Seperti kasus di Mesir dan India, di mana dua negara ini banyak memiliki tenaga yang berpendidikan namun menganggur. Hal ini disebabkan tenaga yang berpendidikan ini dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang tidak berkualitas atau lembaga pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan (marginal institutions).

Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi pada hal-hal lain ketimbang mengarah pada yang benar-benar menghasilkan. Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Dari sifat ini lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi lainnya yang pada akhirnya para birokrat memiliki kredibilitas yang rendah dan tidak mengenal etika. Korupsi telah merajalela sedemikian rupa. Sehingga menjadi fenomena dan 'diterima' sebagai sesuatu yang wajar

Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Budaya yang hidup adalah budaya formalisme, yaitu gejala

yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekpresi formal dibanding yang sesunggunya terjadi. Gejala ini nampak dari penetapan perundang-undangan yang tidak mungkin untuk dilaksanakan. Bahkan dilanggar sendiri oleh yang membuatnya, sering melaporkan hal-hal yang baik saja kepada atasan bahkan terkadang memanipulasi data untuk memberi gambaran yang menguntungkan.

Kelima, biriokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan dari administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. Pada masa kolonial orang-orang berpendidikan berkumpul di administrasi pemerintahan. Sehingga kemampuan administrasinya tidak tertandingi, elit dan pihak-pihak luar sulit untuk melakukan kontrol. Penempatan orang-orang berpendidikan ini sendiri selain dengan tujuan menggerakan sistem administrasi juga untuk menjauhkan orang berpendidikan dengan rakyat.

Dengan demikian, penjajahan menjadi langgeng Keadaan sekarang adalah kebalikkannya. Birokrasi terbaik tidak lagi dimiliki kantor pemerintah. Birokrasi yang baik sudah beralih ke perusaaan swasta, swasta asing, dan BUMN. Tenaga administrasi dan sistem birokrasi di sini bisa andal karena memang orang yang berkualitaslah yang menjalankannya dan proses seleksi yang jelas terhadap tenaga administrasi. Mereka yang tidak masuk kualifikasi tidak akan diterima serta adanya upaya yang jelas untuk meningkatkan kulitas pegawai.

Dari beberapa ciri-ciri yang dikemukakan diatas, nampak jelas betapa kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi dalam

upaya pembangunan administrasi di Indonesia. Di antaranya pembenahan sikap mental dan norma-norma kepegawaian. Sikap mental umum PNS di Indonesia sebagai penggerak Administrasi pembangunan dapat digolongkan dalam tiga golongan besar.

Pertama, golongan tradisionalis, yaitu mereka yang menolak setiap usaha untuk mengintrodusir cara kerja baru, metode baru, dan inovasi baru. Mereka lebih senang bekerja pada suasana yang serba tradisional dan established. Bagi golongan tradisional ini, masa kerja diidentikkan dengan pengalaman mereka yang telah bekerja 20 tahun dianggap telah berpengalaman 20 tahun Hal ini sesungghnya tidak benar sebab pengalaman secara implisit memiliki makna kemampuan menumbuhkan kapasitas kerja. Jika seseorang tidak berkembang kemampuannya, berapun lamanya ia bekerja ia tidak bisa dikatakan berpengalaman. Sesungguhnya penolakan golongan tradisionalis ini pada hal-hal baru karena ketakutan akan kehilangan kedudukan, jabatan, pangkat, dan pengaruhnya karena akan terlihat sesuangguhnya ia tidak mampu untuk bekerja lebih baik dan lebih cepat

Kedua, golongan modernis, yaitu orang-orang yang pada umumnya berpandangan luas dan bersedia untuk menerima hal-hal yang baru. Bahkan tidak jarang mereka menjadi pelopor untuk menemukan hal-hal yang baru itu. *Pioneering spirit* dan *sense of dedications* mereka pada umumnya tinggi, hanya saja jumlah mereka dalam birokrasi di Indonesia masih sedikit, kedudukan dan pengaruhnya belumlah begitu menentukan. Golongan semacam inilah yang perlu ditingkatkan dalam waktu yang sesingkat mungkin karena golongan ini dapat menjalankan peranan selaku administrative change agents, administrative reform agents, dan administrative modernizing agents.

Ketiga golongan ambivalen. Golongan ini di Indonesia adalah mayoritas dan sesunggunya golongan ini bahaya besar dan sebagai penghalang dalam usaha pengembangan suatu sistem administrasi yang tangguh. Ciri umum dari golongan ini adalah ingin mempertahankan status quo, orientasi waktu masa sekarang, ketidakmampuan mengambil risiko, parasitisme, dan oppurtunisme.

Masalah kesejahteraan pegawai, merupakan suatu hal yang tidak dapat disanggah oleh siapapun juga. Bahwa pendapatan bersih dan nyata para PNS di Indonesia tidak memungkinkan untuk hidup dalam suasana dan kesejahteraan yang layak dan mewah. Namun keadaan ini merupakan pencerminan dari tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan yang juga masih rendah. Meskipun gambaran rakyat secara keseluruhan, masalah kesejahteraan PNS perlu dipikirkan secara serius. Tanpa pemikiran yang serius, penggerak administrasi pembangunan (PNS) akan berusaha membuka peluang peningkatan kesejahteraan menurut cara-caranya sendiri yang belum tentu halal dan membuka peluang merajalelanya korupsi, penyalagunaan wewenang dan jabatan. Selain itu, sulitnya pengambilan tindakan disiplin, apatisme, abseenteeisme, kemalasan, dan kemerosotan moral. Jika gejala ini nampak, maka birokrasi di Indonesia akan menyerupai birokrasi pasar gelap (*black market bureaucracy*) yang 'menjual' jasa pelayanan yang diberikan kepada rakyat sebagai pengguna jasanya. Slogan abdi rakyat dan abdi negara akan tinggal kenangan. Namun harus disadari peningkatan kesejahteraan pegawai tidak akan menjamin hilangnya penyakit birokrasi seperti di atas.

Penyakit birokrasi masalah ini pada dasarnya menyangkut moral. Jika moral menjadi penyebabnya, sebesar apapun pendapatan yang diterima tidak akan menghilangkan sifat

keserakahan dan jiwa pemangsanya. Istilah yang kita kenal kalau ingin kaya raya dan berada dalam kemewahan jangan jadi PNS. Karena negara ini belum mampu memberikannya. Tapi kalau hidup berada dengan sedikit lebih dari rakyat kebanyakan dengan masa depan dan hari tua yang aman karena ada uang pensiun, maka menjadi PNS mungkin adalah pilihan yang tepat. Ketiga, masalah peningkatan kemampuan kerja. Secara umum birokrasi di Indonesia memiliki kekurangan managerial skills, technicl skills, dan tecnological skills. Rendahnya kemampuan kerja ini pada umumnya dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan seperti latihan jabatan, kursus, seminar, komperensi, simposium, coaching, dan pendidikan akademis. Namun masalah peningkatan kemampuan kerja PNS ini terkadang kurang mendapat perhatian dari pimpinan, karena pimpinan kurang menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas dan kapasitas kerja bawahannya. Padahal seorang pimpinan yang baik harus mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk mengembangkan kemampuan kerja bawahannya, yang kelak mungkin akan menjadi penerus etafet pemerintahannya. Permasalahannya tidak jarang sikap mental negatif pimpinan yang merasa risih bila ada bawahannya memiliki kemampuan dan pengetahun yang tinggi melebihi dirinya. Bawahan seperti ini dinilai sebagai saingan dan ancaman yang harus segera disingkirkan. Penyingkiran ini dilakukan dengan cara yang halus misalnya tidak memberikan jabatan, memperlemah pengaruhnya, menugaskan di daerah terpencil, dan memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya,sehingga ia kelihatan tidak bisa dan berbagai upaya penyingkiran lainnya. Di luar itu, tidak jarang pendidikan dan latihan sebagai sarana peningkatan kualitas ini dijadikan ajang kolusi dengan mengikutkan orang satu suku, keponakan, teman

dekat yang pada akhirnya orang yang tidak tepatlah yang disuruh mengikuti pendidikan dan latihan. Atau mental yang dari awalnya yang sudah rusak pendidikan dan latihan tidak dijadikan ajang peningkatan kulitas diri, mengikutinya secara tidak serius atau menjadi ladang baru korupsi untuk menambah 'seseran

Keempat, masalah approch yang legalistis. Yang dimaksud dengan aproach yang legalistis adalah dengan memandang permasalahan tidak pada tempatnya. Gejala ini akan nampak ketika ada suatu permasalahan maka memandang permasalahan tersebut dari sisi hukumnya. Seolah-olah semua permasalahan akan selesai dengan adanya instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan. Misalnya, ketika merajalela korupsi diterbitkanlah UU Antikorupsi. Mereka beranggapan korupsi akan hilang karena sudah ada UU. Padahal yang sesuangguhnya lebih penting adalah actions aproach. Gejala lain yang nampak karena aproach yang legalistis adalah memahami ketentuan hukum secara letterlijk. Akibatnya aturan-aturan hukum bukan menjadi alat untuk menjamin proses pembangunan, malahan menjadi alat penghancur. Aturan-aturan hukum menjadi kaku dan sulit untuk ditegakkan karena tidak adanya fleksibelitas dalam penyelenggarannya.

Persolan di atas merupakan titik tolak bagaimana diawal merubah sikap mental warisan sejarah penjajahan baik terhadap ASN dan juga masyarakat, kemudian mempersiapkan perubahan menghadapi inftrastruktur era digital dalam pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan model komunikasi digital birokrat di berbagai periode.

A. Periode Masa Pembangunan sebelum pandemi

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klassifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klassifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata *pembangunan*. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho

dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Kondisi selanjutnya terdapat bebrapa kajiandan pendapat tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah dan bagaimana pandangan para ahli tentang Ketimpangan Pembangunan antar daerah

Teori Neo-Klasik Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar daerah mula – mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai *Hipotesa Neo-Klasik*yang menarik perhatian para ekonom dan perencana pembangunan daerah.

Menurut Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur -angsur ketimpangan pembangunan antar daerah tersebut akan

menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada Negara- negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar daerah adalah berbentuk huruf U terbalik (*Reserve U-shape Curve*) sebagaimana telah dijelaskan pada bab 4 terdahulu.

Pertanyaan yang menarik adalah mengapa pada waktu proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang, justru ketimpangan meningkat? Jawabannya adalah karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai di negara sedang berkembang. Kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah- daerah yang kondisi pembangunan sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh factor ekonomi, tetapi juga oleh factor social-budaya sehingga akibatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih cepat di daerah dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Keadaan yang berbeda terjadi di Negara yang sudah maju dimana kondisi daerahnya ummnya telah dalam kondisi yang lebih baik dari segi prasarana dan sarana serta kualitas sumberdaya manusia. Disamping itu, hambatan-hambatan social dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi yang demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Proses

pembangunan berkibat pada Negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jefrey G. Willamson pada tahun 1996 melalui suatu studi tentang ketimpangan pembnagunan antar daerah pada negara maju dan Negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Hipotesa Neo-Klasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empiric. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu Negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar daerah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal sebaliknya.

Fakta empirik ini menunjukan bahwa peningkatan ketimpangan pembangunan yang terjadi di Negara-negara sedang berkembang sebenarnya bukanlah karena kesalahan pemerintah atau masyarakatnya, tetapi hal tersebut terjadi secara natural diseluruh Negara. Bahkan ketika Amerika Serikat mulai melaksanakan proses pembangunan pada abad kedelapan belas dulu, peningkatan ketimpangan pembangunan antar daerah juga meningkat tajam. Peningkatan ketimpangan ini bahkan sampai memicu terjadinya perang saudara antar Negara bagian di Selatan yang masih relative tertinggal dengan Negara bagian di Utara yang sudah lebih maju. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI-Persemesta di Sumatera Barat tahun 1957, *Gerakan Aceh Merdeka (*GAM) dan *Organisasi Papua Merdeka* (OPM).

2. Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Selanjutnya, pada bagian ini, perlu pula dibahas beberapa faktor utama yang menyebabkan atau memicu terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Dengan adanya analisa ini, akan dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah tersebut. Disamping itu, analisa ini juga sangat penting artinya karena hasilnya dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan untuk menanggulangi atau mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah tersebut dan infrastruktur teknology yang kurang mendukung atau ketimpangan terlalu jauh antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga informasi dan program yang disampaikan birokrat pusat tidak terakomodir bahkan menjadi suatu pemahaman yang berbeda. Perlunya media sebagai alat untuk menyampaikan informasi sebuah keniscayaan pada sat sekarang di era revolusi industri 4.0 dan masa pandemi dimana masyarakat jarang berkomunikasi langsung karena pembatasan sosial disamping terdapat pebedaan lain,yaitu ;

Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam

Penyebab utama yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar daerah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada daerah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi daerah lain tidak mempunyai. Ada daerah yang mempunyai deposit batubara

yang cukup besar, tapi daerah lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan tingkat kesuburan lahan yang juga sangat bervariasi sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah.

Perbedaan Kondisi Demografis

Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayahadalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimliki masyarakat daerah bersangkutan.

Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Kurang lancanya mobilits barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrsi spontan. Alasannya adalah karena bila mobillitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual kedaerah lainyang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrsi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelibahan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lian yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

Karena itu tidaklah mengherankan bilamana, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi pada negara sedang berkembang dimana mobilitas barang dan jasa kurang lancar dan masih terdapatnya beberapa daerah yang terisolir.

Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yag cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daeerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.Hal ini terlihat dari bukti bahwa (mulyaningsih,2005) terciptalah kondisi ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sehingga menjadi satu kebiasaan baik bagi masyarakat komplek yang memerlukan tenaga bantuan yang bersifat insidental maupun bagi masyarakat desa yang menggunakan waktu luang untuk menambah penghasilan.

Adanya pembangunan komplek didesa juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa sekitarnya, seperti di bidang transportasi desa. Karena komplek itu pada mulanya banya didirikan dipedasaan yang pada umumnya gersang serta tempatnya jauh dari jalan raya, sedangkan masyarakat komplek hampir 90% bekerja, bahkan tempatnya agak jauh dari tempat tinggal.

Melihat hubungan kehidupan antara masyarakat komplek dengan pedesaan, tidak hanya menimbulkan dampak negatif. Khususnya diwilayah komplek Bandung Timur Jawa Barat, tapi ternyata banyak menimbulkan keuntungan baik untuk masyarakat komplek tersebut juga bagi masyarakat pedesaan sekitarnya. Dengan demikian hubungan saling menguntungkan tersebut dapat terus berlangsung dikalangan masyarakat Sunda, khususnya Jawa Barat. Karena kehidupan demikian sudah merupakan suatu yang sudah tercipta sejak lama dan tertanam seperti istilah Silih Simbeuh, memang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat bahkan orang sunda pada umumnya. (Kusnaka Admihardjo, UNPAS : 2001)

Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah

Tidak dapat disangka bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemetintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk kesuatu daerah ternyarta lebih rendah.

3. Solusi mengatasi Ketimpangan Pembangunan antar Daerah

Kebijakan dan upaya untuk menanggulangi ketimpangan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh faktor yang menentukan terjadinya ketimpangan tersebut Kebijakan yang

dimaksudkan disini adalah merupakan upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu negara atau wilayah.

Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan

Sebagaimana ttelah dibahas terdahulu bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah karena adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam yang cukup besar antar daerah. Sementara itu, ketidak lancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan wilayah tersebut. Karena itu, kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah dengan mempelancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah. Upaya utuk mendorong kelancaran mobilitas barangdan faktor produksi antar daerah dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruh pelosok daerah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah.

Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Untuk mengurangi kepentingan pembangun antar wilayah, kebijakan dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah mendorong pelaksanaan transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan menggunakan fasilitas dan dukungan pemerintah. Sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui

proses transmigrasi dan migrasi spontan ini, kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh daerah terbelakang akan dapat pula diatasi sehingga prosees pembangunan daerah bersangutan akan dapat pula digerakan.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah melalui pengembangan pusat pertumbuhan (*Growth Poles*) secara tersebar. Kebijakan ini diperkirakan akan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep *konsentrasi* dan *desentralisas*i secara sekaligus. Aspek konsentrasi diperluka agar penyebaran kegiatan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan masih terus mempertahankan tingkat efesiensi usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan aspek desentralisasi diperlukan agar penyebaran kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan dapat dikurangi. Penerapan konsep pusat pertumbuhan ini untuk mendorong proses pembangunan daerah dan sekaligus untuk dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota-kota skala kecil dan menengah.

Institusi Otonom Dan Perusahaan Negara

1. Macam-macam Institusi Otonom

Pemerintah di banyak Negara membentuk berbagai badan-badan yang dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai otonomi operasional tertentu.

Badan-badan ini masih dapat dianggap dalam lingkungan

pemerintahan dan dipergunakan sebagai alat pemerintahan.

Namun demikian badan-badan tersebut tidak termasuk dalam hirarki formil dari badan-badan pemerintahan.

Macam dari institusi otonom ini berbagai ragam bentuknya. Yang paling umum adalah bentuk Perusahaan Negara, Lembaga-lembaga dan Yayasan-yayasan yang sponsornya adalah pemerintah.

Bentuk perusahaan-perusahaan Negara sendiri berbagai macam.

Bermacam-macam lembaga dibentuk oleh pemerintah terutama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi dan lain-lain.

Dalam hal ini universitas-universitas diberbagai Negara dikategorikan sebagai suatu institusi otonom.

Dalam bidang ini misalnya terdapat lembaga-lembaga penelitian bidang tertentu, lembaga informasi pemasaran, lembaga pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, institusi-institusi otonom atau yang juga disebut badan-badan non tradisionil inilah yang paling penting sebagai alat organisasi dalam administrasi pembangunan.

2. Klasisikasi Perusahaan-Perusahaan Negara

Mengenai perusahaan Negara, klasifikasi dapat diberikan menurut :

a. Tujuan usaha, yaitu perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan karena harus menyelenggarakan kegiatan yang vital atau memiliki hajat hidup rakyat banyak suatu Negara.
b. Perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang tertentu yang pada umumnya

tidak begitu menguntungkan bagi sector swasta. Misalnya mengenai penyediaan air minum, transport, dan lain-lain.

c. Dimana kegiatan tersebut belum ada kesediaan sektor swasta yang memasukinya.
d. Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk sebagai badan untuk membina dan menggaerahkan sector ekonomi, sector swasta atau sector masyarakat tertentu.
e. Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk karena pemerintah memang ingin menguasai dan memiliki sector kegiatan ekonomi tertentu (yang menguntungkan). Hal ini sering didasarkan pula karena sistim pemerintahan yang statis.

Empat macam klasifikasi bentuk-bentuk organisasi perusahaan Negara yang terlihat perbedaannya didalam tingkat hubungan seberapa jauh otonomi operasional diberikan atau seberapa jauh pengawasan pemerintah terhadap kebijaksanaan perusahaan berlaku yaitu :

a. Kelompok pertama adalah perusahaan – perusahaan jawatan. Pada umumnya perusahaan ini dipergunakan untuk administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan-pelayanan jasa monopoli secara nasional seperti : pos, telepon dan telegraf, kereta api, pegadaian, pelabuhan, dan lain-lain.
Pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi.

b. Kelompok kedua adalah bentuk Perusahaan Negara (*Public Comporation).*
Perusahaan-perusahaan bentuk ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Tetapi dibentuk dengan suatu peraturan khusus yang merumuskan wewenang, tugas, bentuk manajemen

dan hubungan departemen pemerintah.

c. Kelompok ketiga adalah perusahaan yang tunduk kepada perundang-undangan perusahaan umum (swasta dari Negara bersangkutan), tetapi dimana pemerintah mempunyai kepentingan melalui pemilikan dari sebagian atau seluruh modal.

Dalam bidang ini termasuk perusahaan-perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah ataupun perusahaan campuran antara pemerintah dan swasta.

d. Kelompok keempat dari bentuk perusahaan Negara adalah seperti yang disebutkan oleh Hanson, perusahaan ini disebut " The Operating Contract "

Disini pemerintah memasuki suatu kontrak dengan perusahaan swasta tertentu untuk melaksanakan manajemen terhadap suatu perusahaan Negara atau perusahaan milik Negara. Kemudian pemerintah akan membayar kontrak manajemen tersebut. Misalnya manajemen suatu hotel besar yang dimiliki oleh pemerintah.

3. Peranan Perusahaan Negara dalam Pembangunan

Pembentukan perusahaan-perusahaan Negara didalam suatu Negara tertentu didasarkan kepada peranan pemerintah yang ingin dilakukan dalam pembangunan dan cara melaksanakan pemerintahan tersebut.

Negara-negara tertentu yang memberikan kebebasan yang besar kepada swasta dan usaha milik pribadi tentu akan kurang menggunakan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara.

Disektor-sektor yang bersifat strategis, memerlukan pembiayaan yang besar, penyediaan jasa-jasa pelayanan atau belum bersedianya sector swasta masuk, pemerintah dapat

berperan sebagai entrepreneur.

Ada beberapa sector tertentu dimana pemerintah paling sedikit pada prinsipnya memasuki dengan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara secara sementara., untuk kemudian secara berangsur dialihkan kepada sector swasta.

Dan ada pula perusahaan-perusahaan Negara yang sebenarnya dibentuk untuk dapat membina sector swasta atau sector ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah Di Indonesia regulasi mengenai otonomi daerah ini telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Berikut di bawah ini merupakan perjalanan mengenai pelaksanaan otonomi atau desentralisasi di Indonesia:



Peraturan terbaru mengenai otonomi daerah sekarang ini di atur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan oleh Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Diagram berikut menggambarkan pembagian urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah:



Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pembangunan pada Abad XXI ini lebih menekankan pada peran serta daerah sebagai garda terdepan pelayan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi ini pelayana publik menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada Pemerintah itu sendiri.

Pembangunan daerah terus saja menjadi sorotan publik.

Masyarakat yang semkain cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kalangan LSM dan Organisasi kemasyarakatan dengan kritisnya menyampaikan berbagai kritik terhadap persoalan yang gagal diselesaikan dengan baik oleh Pimpinan Daerah. DPRD dan Partai Politik dengan sigapnya menyampaikan permasalahan yang belum diatasi oleh Pemerintah dan menjadi problem kehidupan bagi konstituen mereka.

Sebenarnya, demikian banyak pihak-pihak yang melakukan pengawasan kepada kinerja Pemerintah Daerah. Sejumlah institusi pengawasan internal dan eksternal juga bertebaran. Pemerintah Pusat atau Kepala Daerah Tingkat I seperti Gubenur juga melakukan pembinaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan didaerahnya masing-masing. Meski demikian, masih saja banyak daerah gagal untuk memberikan bukti bahwa pembangunan didaerahnya secara substansial memberikan keberartian bagi rakyatnya.

Kondisi demikian terjadi karena adanya mismanajemen dalam pembangunan daerah. *Pertama,* mismanajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi di kebanyakan pimpinan daerah mengenai konsep pembangunan yang seharusnya diterapkan di daerahnya. Umumnya, hal ini terjadi karena pimpinan daerah gagal untuk melakukan identifikasi masalah daerahnya. Alih-alih menganalisa dengan cermat kondisi daerahnya, kebanyakan justru mengambil model pembangunan yang tidak sesuai hanya karena terpengaruh sukses daerah lain yang tidak identik. Bila toh seorang Bupati memiliki visi-misi dalam kampanye Pilkada, biasanya hanya merupakan bahasa indah yang tidak membumi dengan kondisi realitasnya.

Kedua, dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalahpahami hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh Pemerintah saja. Padahal pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk mengkoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait. Sinergi dimaksud harus mencakup segala hal termasuk aspek fisik, sosial-ekonomi, moral-budaya dan aspek lingkungan lainnya sehingga program-program pembangunan juga harus dapat menciptakan peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara berkelanjutan.

Ketiga, secara lebih khusus, mismanajemen banyak terjadi dalam berbagai aspek manajemen APBD. Pimpinan Daerah sering gagal untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian APBD secara baik. Hal ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen sosial dan akuntabilitas publik, serta kurangnya keterampilan komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran. Dibanyak daerah, penyusunan APBD saja membutuhkan proses yang lama dengan dominasi masalah politik, sehingga kualitasnya dalam mengarahkan pembangunan menjadi kurang optimal.

Memperhatikan masalah demikian, tentu saja dibutuhkan suatu jalan keluar untuk mengatasi mismanajemen pembangunan daerah. Upaya untuk meluruskan kesalahan-kesalahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Intinya adalah, bagaimana kepala daerah sebagai *top manager* dalam pembangunan daerah ini dapat

memainkan peran yang nyata dalam memimpin seluruh lapisan rakyatnya untuk menghimpun potensi daerah dalam sebuah sistem pembangunan daerah yang sinergis. Peran seorang kepala daerah sangat strategis untuk menggugah kesadaran bersama bahwa pembangunan adalah tanggungjawab bersama, harus dilaksanakan bersama dan untuk kepentingan bersama.

Kepala daerah bukanlah seorang manusia super. Ia tidak harus pandai dalam segala hal, tidak harus muncul di setiap aktivitas pembangunan, tidak harus mengawasi segala kegiatan aparatnya. Namun seorang kepala daerah seharusnya memiliki komitmen kuat untuk menjamin bahwa seluruh proses manajemen pembangunan daerah dilaksanakan secara utuh, baik dan sesuai dengan rencana yang dibuatnya. Untuk sampai kesana, manajemen pembangunan daerah harus dikelola dengan manajemen mondial yang menggabungkan aspek kepemimpinan struktural dan kepemimpinan partisipatif. Dengan demikian segala aktivitas pembangunan akan terbingkai dalam partisipasi publik yang sinergis dengan dinamika politik kedaerahan.

Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal, yang mana secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan suatu negara dan kehidupan masyarakat didalamnya. Konsep pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terencana menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan juga sering kali dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara tinggi maka negara tersebut dinilai dapat melakukan pembangunan yang baik. Pernyataan tersebut memang benar, tetapi di masa globalisasi dan era modernisasi saat ini arti suatu pembangunan bukan lagi hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga sejauh mana ilmu pengetahuan

dan teknologi suatu negara, maka pembangunan yang akan dilakukan oleh negara tersebut akan berjalan semakin cepat.

. Hal ini jelas, karena dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktifitas pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang akan dapat lebih digerakan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakan. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar daerah akan dapat pula dikurangi. Pemerintah indonsia telah melakukan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan mulai tahun 2001 yang lalu. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola kegiatan pembangunan didaerahnya masing-masing (desentralisasi pembangunan).

Perkembangan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia

Pada tahun 1950, PDB disusun pertama kali sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Nilai PDB atas dasar harga berlaku saat itu mencapai Rp 84,0 miliar. Mulai tahun 1960, PDB disusun secara berkala dengan metodologi dan cakupan yang lebih lengkap. Pada periode 1960–1965 kondisi perekonomian masih buruk, inflasi tumbuh sangat tinggi yang berdampak pada nilai PDB atas berlaku. Nilai PDB atas dasar harga berlaku saat itu tumbuh tinggi dari Rp 470,1 miliar pada tahun 1961 menjadi Rp23.709,9 miliar pada tahun 1965. Namun pada akhir tahun 1965, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru yang nilainya diciutkan.

Nilai Rp1.000 —uang lama— diturunkan menjadi Rp1 —uang baru. Kebijakan ini kembali mempengaruhi besaran PDB, dimana PDB menurun menjadi Rp315,9 miliar pada tahun 1966.

Pada tahun 1973 saat akhir Pelita I, PDB meningkat menjadi Rp6.753,4 miliar. Lapangan Usaha Pertambangan mengalami masa emas (*booming*) dampak melonjaknya harga minyak di pasaran internasional. Lapangan Usaha Industri dan lapangan usaha lainnya meningkat tajam sebagai dampak positif dari penerapan berbagai kebijakan terutama di bidang moneter dan fiskal.

Tahun 1998, ekonomi Indonesia terkena dampak krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia yang langsung berdampak pada perekonomian Indonesia, saat itu nilai PDB Indonesia hanya mencapai Rp955.753,5 miliar. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Perlahan ekonomi Indonesia mulai membaik. Pada tahun 2000, besaran PDB mencapai Rp1.389.769,9 miliar dan terus merangkak naik hingga tahun 2014, PDB Indonesia mencapai Rp 10.542.693,5 miliar.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Lapangan Usaha

Pada periode 1960–1965 perekonomian Indonesia berada pada masa sulit dan menghadapi masalah yang besar. Kebijakan pemerintah masih terkonsentrasi pada bidang politik. Situasi ekonomi dan politik tidak stabil. Pertumbuhan PDB sangat rendah dan inflasi sangat tinggi.

Pada periode 1966–1968 yang merupakan masa transisi dari orde lama ke orde baru, ekonomi Indonesia mulai menggeliat dan menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai lima persen.

Pembangunan nasional mulai terarah dan terencana melalui repelita. Dalam kurun waktu 1969–1973 pertumbuhan ekonomi

meningkat tajam, dengan ratarata pertumbuhan di atas tujuh persen. Lapangan Usaha Konstruksi tumbuh ekspansif dengan pertumbuhan dua digit (*double digit*), begitu juga Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sumber pertumbuhan pada periode ini.

Pada periode 1974–1983, ekonomi Indonesia masih tumbuh cukup baik. Dukungan program-program repelita sebelumnya menjadikan pertumbuhan rata-rata PDB mencapai 6,66 persen. Capaian ini sedikit lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Hal ini disebabkan terjadinya resesi ekonomi dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional. Pada periode ini sektor-sektor sekunder masih menunjukkan perkembangan yang baik.

Selanjutnya periode 1984–1993 tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat dibanding periode sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 6,06 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, beberapa kebijakan ekonomi diluncurkan melalui paket-paket deregulasi seperti deregulasi perbankan serta ekspor dan impor. Tatanan ekonomi semakin diperbaiki dimana investasi dipacu lebih cepat dan pola produksi diarahkan ke pasar luar negeri.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia seperti negara lainnya dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara pada pertengahan 1997 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan sebesar 4,70 persen. Dampak krisis ekonomi semakin nyata di tahun 1998 dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hebat sebesar 13,13 persen dan merupakan pertumbuhan terendah sejak Indonesia merdeka. Seluruh lapangan usaha ekonomi mengalami kontraksi pertumbuhan. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang mengalami pukulan hebat akibat krisis ekonomi, diikuti Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan serta

Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Pada tahun 1999, dampak krisis ekonomi mulai dapat dikendalikan. Ekonomi Indonesia saat itu berada dalam masa perbaikan (*recovery*) dan mampu tumbuh 0,79 persen. Ekonomi Indonesia terus membaik dimana tahun 2000 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen. Selanjutnya Ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 2001–2010 berkembang semakin baik dari tahun ke tahun, namun mengalami sedikit tekanan ketika terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Kondisi ini memberikan dampak pada ekonomi Indonesia tahun 2009 yang hanya tumbuh 4,63 persen melambat dibanding capaian tahun 2008 sebesar 6,01 persen. Tahun 2010, perekonomian Indonesia kembali membaik dengan capaian pertumbuhan sebesar 6,22 persen.

Dalam kurun waktu 2011–2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perlambatan yang terjadi pada beberapa lapangan usaha, diantaranya Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan dan Perdagangan. Perlambatan di Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi serta perlambatan pada Pertambangan Batu Bara dan Lignit pada tahun 2014. Perlambatan di Industri Pengolahan disebabkan kontraksi pada Industri Batubara dan Pengilangan Migas serta perlambatan di beberapa industri bukan migas lainnya. Perlambatan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda motor disebabkan oleh perlambatan yang terjadi pada perdagangan besar dan eceran bukan mobil sepeda motor.

Struktur Ekonomi yang digambarkan oleh PDB atas dasar harga berlaku, dalam kurun waktu 1960–1980 didominasi oleh Sektor Primer yang utamanya adalah Lapangan Usaha Pertanian

dengan kontribusi sebesar 50–60 persen. Selanjutnya Sektor Tersier dengan kontribusi sekitar 30–40 persen, dan diikuti Sektor Sekunder dengan kontribusi sekitar 10–20 persen. Pada tahun 1985 terjadi perubahan struktur ekonomi Indonesia, dimana kontribusi Sektor Tersier mulai melampaui Sektor Primer. Sektor Tersier memiliki kontribusi sebesar 40 persen, diikuti Sektor Primer dengan kontribusi berkisar 25–40 persen. Selanjutnya Sektor Sekunder yang didominasi industri pengolahan memiliki tren terus meningkat dengan kontribusi berkisar 20–30 persen. Pada tahun 1993 struktur ekonomi kembali mengalami perubahan. Sektor Sekunder dengan kontribusi berkisar 30–40 persen mampu menggeser Sektor Primer ke urutan paling bawah dengan kontribusi berkisar 25–30 persen. Sementara Sektor Tersier masih menempati urutan teratas dengan kontribusi sekitar 40 persen. Sampai saat ini, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh Sektor Tersier, kemudian Sekunder dan Primer. Meskipun demikian, perbedaan antara ketiganya tidak terlalu besar.

Pertumbuhan ekonomi dapat juga ditunjukkan menurut komponen Pengeluaran PDB. Pertumbuhan ekonomi menurut komponen Pengeluaran PDB ini juga menggambarkan angka yang bervariasi. Keanekaragaman angka pertumbuhan ini juga sangat dipengaruhi oleh tahapan-tahapan perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Tahapan dan kebijakan ini sangat dipengaruhi pula oleh kejadian dan peristiwa yang juga terjadi di dalam perekonomian dunia pada umumnya dan kejadian dan peristiwa yang juga terjadi di dalam negeri. Mulai dari masa orde lama, masa transisi, masa awal perencanaan pembangunan lima tahun (Pelita), masa keemasan migas (*oil boom*), *recovery* dari *oil boom* menjadi *non oil boom*, masa *non oil boom*, sampai kepada masa krisis moneter dunia yang mengakibatkan terjadinya krisis

multidimensi perekonomian Indonesia dan akhirnya pada masa pemulihan perekonomian atau *recovery* kedua.

Pada masa orde lama tahun 1960–1968 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih cukup tinggi mulai sebesar 7,8 persen tahun 1961 menjadi 9,1 persen tahun 1968, kecuali tahun 1963 dan 1966 tumbuh negatif masing-masing sebesar 4,0 persen dan 1,5 persen. Tingginya pertumbuhan ini didorong pula dengan pengeluaran konsumsi makanan yang begitu mahal pada waktu itu. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pertumbuhannya juga cukup tinggi, terbesar tahun 1966 senilai 39,0 persen, kecuali tahun 1961, 1962, 1965 dan 1967 pertumbuhannya negatif. Hal ini dapat dimengerti karena pada masa itu belum adanya perencanaan yang komprehensif dan baik dari pemerintah. Pembentukan Modal juga mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada waktu ini. Mulai tahun 1961 sebesar 43,7 persen dan tahun 1968 sebesar 22,3 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto ini secara umum masih didominasi oleh PMTB pemerintah. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pertumbuhannya juga cukup tinggi, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1962, 1963, 1965 dan 1966 dengan pertumbuhan ekspor semakin tinggi dibandingkan dengan impor.

Tahun 1969–1975 pada masa awal pelaksanaan Pelita pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga berada di bawah tujuh persen, kecuali tahun 1974 sebesar 13,8 persen. Terlihat di sini bahwa penyediaan dan permintaan barang dan jasa sudah mulai agak membaik seiring dengan membaiknya iklim perekonomian. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah seiring dengan peran yang sangat dominan dari pemerintah pada masa itu juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, bahkan mencapai angka 36,5 dan 30,3 persen pada tahun 1973 dan 1975,

tetapi juga bertumbuh negatif pada tahun 1972 sebesar 1,9 persen. Pertumbuhan Pembentukan Modal pada tahuntahun ini mencapai di atas 15 persen, tertinggi tahun 1970 sebesar 33,0 persen dan terendah 14,6 persen tahun 1975. Pembentukan modal ini masih didominasi oleh modal milik pemerintah. Begitu pula dengan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa berada di atas 9 persen, kecuali pertumbuhan ekspor tahun 1974 dan 1975 masing-masing sebesar 3,6 dan -9,8 persen, dan impor tahun 1975 sebesar 7,9 persen.

Pada masa harga minyak di pasaran dunia mulai naik tahun 1976 dan mencapai puncaknya tahun 1981 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cukup tinggi dari sebesar 6,2 persen tahun 1976 menjadi 16,7 persen tahun 1981. Begitu pula dengan pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah berada diatas 10 persen, tertinggi sebesar 16,5 persen tahun 1977, kecuali tahun 1976, dan 1982 masing-masing sebesar 7,3 persen dan 8,2 persen. Pertumbuhan pembentukan modal selama periode ini juga cukup tinggi, yaitu berada di atas 11 persen, kecuali tahun 1976 dan 1979. (PMTB) didominasi oleh investasi pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana, yang sebagian besar berasal dari hasil ekspor migas.

Hal ini dapat dimengerti karena tabungan domestik dan sumber dana luar negeri pada waktu itu masih relatif rendah. Pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa pada masa keemasan migas ini juga cukup tinggi.

Pertumbuhan Ekspor tertinggi tahun 1977 sebesar 22,4 persen, tetapi pada waktu mendekati habisnya masa keemasan migas ini mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 5,6; 2,4 dan 13,9 persen berturutturut tahun 1980–1982. Dilain pihak pertumbuhan Impor Barang dan Jasa masih berada diatas 15 persen, kecuali tahun 1976 dan 1982.

Pada masa transisi yaitu masa ketergantungan ekonomi terhadap migas menjadi nonmigas tahun 1982–1985 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah mulai melambat yaitu di bawah empat persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah masih tumbuh sebesar 7,6 persen tahun 1985. Begitu juga dengan pertumbuhan PMTB juga mulai lambat, bahkan tahun 1984 pertumbuhannya negatif sebesar 6,0 persen. Pemerintah mulai mendorong investasi dari pihak swasta untuk menggantikan sumber dari penerimaan migas. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa juga mengalami perubahan yang drastis, Ekspor turun -13,9 persen dan -7,8 persen tahun 1985 yang tidak lagi bertumpu dari migas. Sebaliknya Impor juga tumbuh negatif 7,5 persen tahun 1984.

Pada tahun 1986–1989 masa recovery atau pemulihan kembali kepada keadaan oil boom, pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, mulai naik kembali. Tahun 1989 pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,2 persen, dan Pengeluaran Pemerintah sebesar 10,5 persen, walaupun sempat mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 persen tahun 1987. Pertumbuhan PMTB pada masa ini juga semakin lama semakin meningkat dari 9,2 persen tahun 1986 menjadi 13,4 persen tahun 1989. Pertumbuhan PMTB swasta masih tetap tinggi pada periode ini, terutama investasi di bidang nonmigas. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pada waktu ini juga menyamai pertumbuhan semasa periode oil boom yaitu masing-masing sebesar 10,4 persen dan 13,4 persen tahun 1989. Periode ditandai dengan kontribusi ekspor nonmigas semakin meningkat dibandingkan nonmigas.

Periode tahun 1990–1996 disebut juga dengan fase non oil boom. Peranan nonmigas sangat dominan dibandingkan dengan

migas. Pada masa ini pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan yang tinggi. Tahun 1990 dan 1995 mencapai sebesar 9,9 persen dan 12,6 persen. Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tidak secepat pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, karena sudah semakin berperannya swasta pada waktu itu. Tahun 1991 dan 1992 masing-masing sebesar 7,0 persen dan 5,8 persen pada puncaknya dan semakin menurun pada tahun-tahun selanjutnya. PMTB pertumbuhannya juga semakin tinggi, 14,6 persen pada tahun 1990, kemudian sempat menurun pada tahun-tahun berikutnya, lalu meningkat lagi pada tahun 1994–1996 diatas 13 persen. Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa pada waktu ini juga cukup tinggi, tetapi pertumbuhan Impor lebih besar dari Ekspor.

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik dan sosial tahun 1998, merupakan krisis ekonomi terparah yang pernah dialami oleh Indonesia. Pertumbuhan semua komponen PDB Pengeluaran utamanya tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh negati 6,2 persen walaupun tahun 1997 sempat tumbuh sebesar 7,8 persen dan 3,1 persen tahun 1999. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga tumbuh negatif 15,4 persen, yang pada tahun 1997 dan 1999 juga hanya tumbuh 0,1 persen dan 0,7 persen. PMTB mengalami pertumbuhan negatif tidak hanya pada tahun 1998 tetapi juga pada tahun 1999 masing-masing sebesar 33,0 persen dan 16,7 persen. Padahal tahun 1997 masih tumbuh sebesar 8,6 persen. Hanya Ekspor Barang dan Jasa yang masih tumbuh positif karena didorong oleh terdepresiasinya mata uang rupiah terhadap US dolar, sebesar 11,2 persen. Tahun 1997 Ekspor Barang dan Jasa

juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,8 persen, tetapi tahun 1999 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 31,8 persen. Sementara Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 1998 dan 1999 masing-masing sebesar 5,3 persen dan 38,3 persen, tetapi tahun sebelumnya tahun 1997 masih tumbuh positif 14,7 persen.

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada masa recovery kedua dan kebangkitan kembali perekonomian Indonesia tahun 2000–2010 bertumbuh sebesar 3–5 persen. Mulai tahun 2000 sampai dengan 2005 angka pertumbuhannya tercatat semakin tinggi, 3,6 persen tahun 2001 menjadi 5,7 persen tahun 2005. Sedangkan untuk paruh kedua periode 2000–2010, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga cenderung tumbuh tinggi dengan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2006 (3,2 persen) dan tertinggi pada tahun 2008 yang tercatat 5,3 persen. Pada periode ini, pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sempat berada pada titik terendah sejak krisis moneter 1998 yaitu hanya tumbuh sebesar 0,3 persen pada tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada rentang waktu 2000–2010 terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 15,7 persen sebagai dampak dari adanya pemilu parlemen dan presiden yang membutuhkan tambahan belanja negara secara signifikan. Pada periode ini, pertumbuhan Ekspor juga relatif membaik dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan tercatat negatif –9,7 persen. Pertumbuhan Ekspor negatif pada tahun 2009 ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan merupakan gejala umum yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan Impor pada periode ini juga memiliki dinamika yang senada dengan pertumbuhan Ekspor yaitu mengalami kontraksi pertumbuhan

pada tahun 2009 bahkan dengan magnitude yang lebih besar, yaitu –15,0 persen.

Periode 2010–2014 diwarnai oleh situasi perekonomian internasional yang kurang kondusif, meskipun demikian, perekonomian Indonesia masih mampu tumbuh di atas lima persen pada tiap tahunnya. Yang terendah adalah pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat 5,0 persen sedangkan yang tertinggi adalah capaian tahun 2011 yang tercatat 6,2 persen.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh stabil di kisaran lima persen sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2014 menjadi 2,0 persen dari 6,9 persen yang dicapai pada tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto sepanjang periode 2010–2014 juga cenderung menurun terutama karena ketergantungan yang tinggi terhadap barang modal impor sehingga gejolak yang terjadi pada mata uang Rupiah sangat mempengaruhi komponen ini.

Ekspor dan Impor hanya tumbuh tinggi pada tahun 2011. Untuk tahun-tahun setelahnya tercatat pertumbuhan yang tergolong rendah meskipun masih positif. Penyebab rendahnya pertumbuhan Ekspor dan Impor pada beberapa tahun belakangan ini adalah lemahnya demand terhadap komoditas ekspor Indonesia yang sebagian besar adalah komoditas primer. Di samping itu, pelemahan mata uang Rupiah terhadap US Dolar membuat harga barang impor termasuk juga barang modal impor menjadi tidak ekonomis dan secara otomatis mengurangi masuknya barang impor ke dalam negeri. Pada semester I tahun 2015, pertumbuhan tercatat 4,7 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun sebelumnya (c-to-c). Hal ini merupakan capaian pertumbuhan semester I yang terendah sejak tahun 2010 yang

biasanya di atas lima persen. Penyebabnya adalah ekonomi internasional yang kurang kondusif sebagai dampak dari berlarut-larutnya krisis Eropa. Meskipun demikian, capaian pertumbuhan semester I sebesar 4,70 persen ini tergolong exceptional karena rendahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara baik di Asia Tenggara maupun kawasan lain di dunia. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga pada semester ini tercatat lima persen, capaian ini sedikit lebih rendah daripada capaian tiga tahun terakhir yang selalu di atas lima persen. Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah tercatat 2,47 persen dikarenakan penyerapan belanja negara yang baru mencapai 37,9 persen pada akhir semester I tahun 2015. Pembentukan Modal Tetap Bruto pada semester ini tercatat 3,92 persen. Ini termasuk rendah dibandingkan dengan capaian semester I tahun lalu yang tercatat 4,18 persen. Pertumbuhan negatif terjadi untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan jenis Mesin dan Perlengkapan yang terkontraksi masing-masing sebesar minus 3,32 persen dan minus 6,47 persen. Ekspor dan Impor tumbuh negatif dikarenakan penurunan harga komoditas andalan ekspor Indonesia dan pelemahan Rupiah terhadap dolar.

Struktur Perekonomian Menurut Komponen Pengeluaran

Pada masa 1960–1968 lebih banyak digunakan untuk Pengeluaran Konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah masing-masing tertinggi 96,0 persen tahun 1966 dan 11,8 persen tahun 1961. Sedangkan, persentase terendah masing-masing tahun 1960 sebesar 79,8 persen dan 5,6 persen tahun 1965. Sementara itu, Investasi atau PMTB tertinggi sebesar 12,1 persen tahun 1964 dan terendah tahun 1966 sebesar 4,5 persen. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa tertinggi terjadi pada tahun 1960 sebesar 13,3 persen dan terendah sebesar 5,3 persen tahun 1965, sedangkan kontribusi

Impor tertinggi terjadi tahun 1966 sebesar 22,1 persen dan terendah sebesar 5,7 persen tahun 1965.

Pada awal pelaksanaan Pelita 1969–1975 kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mulai menurun dibandingkan dengan pada masa Orde Lama. Dari sebesar 86,8 persen pada tahun 1969 menjadi 69,2 persen pada tahun 1975. Begitu pula dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mulai stabil pada angka tertinggi sebesar 10,8 persen tahun 1973 dan terendah tahun 1969 sebesar 7,3 persen. Tetapi terjadi lonjakan yang besar terhadap kontribusi PMTB dari 13,70 tahun 1970 yang merupakan persentase terendah menjadi 20,3 persen tahun 1975. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa juga meningkat dari 9,0 persen tahun 1969 (terendah) menjadi 29,0 tahun 1974 (tertinggi). Begitu juga dengan Impor Barang dan Jasa dari yang terendah sebesar 14,8 persen tahun 1969 menjadi 22,0 tertinggi tahun 1975.

Pada masa oil boom tahun 1976-1981 kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin menurun dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, yaitu terendah sebesar 60,5 persen tahun 1980 dan tertinggi sebesar 67,7 persen tahun 1976. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada periode ini terbesar 12,1 persen tahun 1978 dan terkecil 10,3 persen tahun 1976. Kontribusi PMTB juga naik dari yang terendah 20,1 persen tahun 1977 menjadi 21,4 persen tertinggi tahun 1981. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa juga naik dari terkecil sebesar 21,8 tahun 1978 menjadi tertinggi sebesar 30,5 persen tahun 1980. Begitu juga dengan Impor sebesar 20,1 persen tahun 1977 yang merupakan persentase terendah menjadi 25,6 persen tahun 1981 yang merupakan persentase tertinggi.

Tahun 1982–1985 masa transisi dari migas ke nonmigas

kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin menurun dibandingkan dengan fase-fase sebelumnya, tertinggi sebesar 69,9 persen tahun 1982 menjadi terendah 59,0 persen tahun 1985. Distribusi pengeluaran konsumsi pemerintah cukup stabil pada 10,2 persen terendah tahun 1984 menjadi 11,2 persen tertinggi tahun 1985. PMTB kontribusinya juga bertambah dari tertinggi tahun 1983 sebesar 25,1 persen dan terendah tahun 1984 sebesar 22,4 persen. Ekspor dan Impor Barang dan Jasa kontribusinya tertinggi masing-masing sebesar 25,6 persen tahun 1984 dan 25,3 persen tahun 1983, dan terendah masing-masing sebesar 22,2 dan 20,5 persen tahun 1985.

Tahun 1986–1989 masa pemulihan dari masa ketergantungan dari migas kepada nonmigas, kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga semakin kecil yaitu dari sebesar 61,7 persen tahun 1986 yang merupakan persentase tertinggi menjadi 53,1 persen tahun 1989 sebagai persentase terendah. Begitu juga dengan kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah juga semakin kecil dari 11,2 persen (tertinggi) tahun 1986 dan sebesar 9,0 persen (terendah) tahun 1988. PMTB kontribusinya semakin naik dari 24,1 persen tahun 1986 terendah menjadi 27,3 persen tahun 1989 tertinggi. Kontribusi ekspor dan impor barang dan jasa sedikit bertambah dari 19,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 25,5 persen tahun 1989 tertinggi untuk ekspor, serta dari 20,5 persen tahun 1986 terendah menjadi 23,1 persen tertinggi untuk impor, walaupun sempat sedikit menurun tahun 1988 sebesar 21,5 persen.

Masa ketergantungan terhadap nonmigas tahun 1990–1996, kontribusi Pengeluaran Rumah Tangga sedikit naik, walaupun pada tahun 1990–1993 sempat mengalami penurunan, yaitu dari yang terendah sebesar 52,3 persen tahun 1992 menjadi 62,4

persen tahun 1996. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah semakin kecil, dari yang tertinggi sebesar 9,9 persen tahun 1993 menjadi terendah 7,6 persen tahun 1996. Sementara kontribusi PMTB semakin naik dari yang terendah sebesar 25,9 persen tahun 1993 menjadi yang tertinggi sebesar 29,6 persen tahun 1996. Begitu juga dengan Ekspor secara perlahan juga menunjukkan perubahan kontribusi yang berkurang dari yang tertinggi sebesar 29,4 persen tahun 1992 menjadi yang terendah sebesar 25,8 persen tahun 1996. Begitu juga dengan kontribusi Impor dari yang tertinggi sebesar 27,1 persen tahun 1992 menjadi terendah sebesar 25,4 persen tahun 1994.

Pada masa krisis perekonomian tahun 1997–1999 persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDB semakin naik yaitu dari 61,8 persen tahun 1997 menjadi 76,2 persen tahun 1999. Persentase Pengeluaran Pemerintah turun dari 6,8 persen tahun 1997 menjadi 5,7 persen tahun 1998, akan tetapi naik kembali sebesar 6,6 persen tahun 1999. Persentase PMTB semakin turun dari 28,3 persen tahun 1997 menjadi 20,6 persen tahun 1999. Sebaliknya Ekspor dan Impor Barang dan Jasa terutama pada tahun 1998 persentasenya sempat naik tinggi dari 27,9 persen tahun 1997 menjadi 53,0 persen serta dari 28,1 persen tahun 1997 menjadi 43,2 persen. Tahun 1999 persentase keduanya menurun kembali masing-masing sebesar 35,5 persen dan 28,5 persen.

Tahun 2000–2010 diwarnai oleh krisis keuangan global yang dipicu oleh macetnya subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007. Sentimen negatif dan kepanikan yang terjadi di Wall Street sebagai akibat dari krisis subprime mortgage ini dengan cepat menjalar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini tergambar dari kontribusi Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga yang mengalami pasang surut, yaitu dari 61,7 persen pada tahun 2000, mencapai puncak kontribusi pada tahun 2003 yaitu 66,5 persen dan kemudian menurun mulai tahun 2008 hingga tahun 2010. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah justru menunjukkan kontribusi yang meningkat sejak tahun 2007. Hal ini dikarenakan pemerintah sengaja meningkatkan belanjanya untuk mengkompensasi pelemahan yang terjadi baik pada sisi produksi, konsumsi, dan ekonomi eksternal (ekspor dan impor). PMTB kontribusinya menunjukkan peningkatan yang terus menerus. Dari sebesar 19,7 persen pada tahun 2000 hingga menjadi 32 persen pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dan dunia usaha yang kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sepanjang dekade ini pula, kontribusi Ekspor dan Impor cenderung menurun. Kontribusi Ekspor terhitung menurun dari 39,0 persen pada awal periode menjadi 24,6 persen pada akhir periode, sedangkan kontribusi Impor juga cenderung menurun dari 30,8 persen pada awal periode menjadi 22,9 persen pada akhir periode. Hal ini dikarenakan situasi ekonomi eksternal yang sedang kurang kondusif untuk mengakomodasi perkembangan kegiatan ekonomi Indonesia.

Periode 2010 hingga 2014 merupakan periode yang menandai recovery perekonomian Indonesia dari dampak krisis subprime mortgage meskipun tak lama setelah itu, krisis berskala global kembali terjadi yaitu di Eropa. Dampak krisis Eropa ini juga dapat dirasakan di Indonesia terutama dengan melemahnya permintaan ekspor dari Indonesia oleh negara-negara Eropa. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga kontribusinya terjaga pada kisaran 55 hingga 57 persen. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada periode ini cenderung meningkat sedikit demi sedikit dari

9,0 persen pada tahun 2010 menjadi 9,5 persen pada tahun 2014. Pergerakan Kontribusi PMTB pun senada dengan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang menunjukkan kenaikan secara gradual dari 31,0 persen pada awal periode hingga 32,6 persen pada akhir periode. Kontribusi Ekspor dan Impor cenderung fluktuatif di tengah gejolak ekonomi eksternal yang terjadi pada periode ini. Kontribusi Ekspor terendah terjadi pada tahun 2013 sementara kontribusi Impor terendah terjadi pada tahun 2010.

Untuk semester I tahun 2015, struktur Produk Domestik Bruto Indonesia menurut pengeluaran relatif sama dengan struktur PDB menurut Pengeluaran pada lima tahun terakhir. Dominasi yang kuat masih ada pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tercatat 55,34 persen disusul oleh PMTB (32,46 persen). Kontribusi Ekspor tercatat 21,81 persen dan merupakan kontribusi Ekspor terendah sejak semester I tahun 2010. Sementara itu, kontribusi Impor juga lebih kecil daripada kontribusi Impor pada semester I tahun-tahun sebelumnya pada periode 2010–2014.

Referensi yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

Periode masa pembangunan sebelum pandemi dijalankan oleh pemerintah melaui pengembangkan kebijakan pembangunan birokrasi yang holistis (menyeluruh) agar mampu menyentuh semua dimensi baik itu sistem, struktur, budaya, dan perilaku birokrasi mengembangkan sistem politik yang demokratis dan mampu mengontrol jalannya pemerintahan dengan maksud agar pemerintah lebih transparan, tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi publik; mengembangkan birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti, e-government, e-procurement untuk mempermudah interaksi antara masyarakat

dengan para pemberi layanan. Akan tetapi sistem berbasis teknologi tersebut tetap perlu dimonitoring dan dikawal terkait dengan pengimplementasiannya guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan birokrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelangan

Salah satunya kinerja pelayanan faktor yang mempengaruhi pelanggan. Dalam pengukuran kinerja pelayanan memerlukan indikator-indikator tertentu. Menurut Parasuraman, Zeithml dan Berry (1991) mencoba menyampaikan teorinya yang sering digunakan dalam sektor swasta, dimana kinerja pelayanan baku dapat diukur dengan 10 indikator antara lain :

a. Ketampakan Fisik / *Tangible* yaitu penampakan fisik faslitas-fasilitas yang di miliki pemerintah / penyedia layanan.
b. Keandalan / *Realibility* yaitu kempuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan cepat dan baik.
c. Responsivitas / *Responsivity* yakni kemauan untuk membantu Pelanga / Masyarakat bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
d. Kompetensi / *Competence* yaitu pengetahuan daan keterampilan / skill yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada pelangan / masyarakat.
e. Kesopanan / *Courtessy* yakni berkaitan dengan sikap atau prilaku yang ramah, bersahabat, tanggap keluhan dan keinginan konsumen serta melakukan kontak atau hubungan secara pribadi .
f. Kreadibilitas / *Creadibility* yaitu sikap jujur dalam setiao upaya untuk menarik kepercayaan pelangan / masyarakat.

g. Keamanan / *Security* yaitu jaminan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelangan / masyarakat atas produk / layanan yang dihasilkan penyedia layanan / pemerintah.
h. Akses / *Acces* yaitu kemudahan pelangan / masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diperlukan dari pemerintah / penyedia layanan.
i. Komunikasi / *Communication* yaitu kemauan pemberi layanan / provide untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi Pelangan sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi perkembangan terbaru kepada masyarakat.
j. Pengertian / *Understanding* yaitu kemampuan untuk memberikan tanggapan penyedia layanan terhadap kebutuhan pelanggan.

Semua indikator pengukuran kinerja menurut Zeithaml pada dasarnya meupakan usaha peningkatan pelayanan publik berkualitas sering pula disebut *service quality* (SERVEQUAL) dimana seberapa jauh antara harapan dan kenyataan yang diterima pelangan atas pelayanan yang diperoleh menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas pelayanan dengan meminimalkan keluhan Pelanggan dengan perbaikan secara berkesinambungan. Menurut Koetler and Keller(2006) Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang disebabkan kinerja suatu produk yang dirasakan dibandingkan dengan yang diharapkan.

Berbagai upaya reformasi birokrasi yang telah dilakukan melalui kegiatan yang rasional dan realistis dirasakan kurang memadai dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Hal tersebut terkait dengan banyaknya permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Dari sisi internal, berbagai faktor seperti

demokrasi, desentralisasi dan internal birokrasi itu sendiri, masih berdampak pada tingkat kompleksitas permasalahan dan dalam upaya mencari solusi lima tahun ke depan. Sedangkan dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga akan kuat berpengaruh terhadap pencarian alternatif-alternatif kebijakan dalam bidang aparatur negara.

Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan, makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik; meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas dan kualitas kinerja publik serta taat pada hukum; meningkatnya tuntutan dalam penyerahan tanggung jawab, kewenangan dan pengambilan keputusan.Demikian pula, secara khusus dari sisi internal birokrasi itu sendiri, berbagai permasalahan masih banyak dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain adalah: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi; rendahnya kinerja sumber daya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

Sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi merupakan tantangan sendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan

cepat; makin derasnya arus informasi dari manca negara yang dapat menimbulkan infiltrasi budaya dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat (*digital divide*). Perubahan-perubahan ini, membutuhkan aparatur negara yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang handal untuk melakukan antisipasi, menggali potensi dan cara baru dalam menghadapi tuntutan perubahan. Di samping itu aparatur negara harus mampu meningkatkan daya saing, dengan melakukan aliansi strategis untuk menjaga keutuhan bangsa.

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini masih dirasakan kurang berjalan sesuai dengan tuntutan reformasi, hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas permasalahan dalam upaya mencari solusi perbaikan. Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktek KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Bidang Pertahanan Dan Keamanan

Sasaran Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah unuk menjamin suatu bangsa dan Negara dapat :

1. Menjamin integritas Bangsa dan Negara;
2. Menangkis serangan dari luar wilayah kekuasaannya;
3. Memadamkan pemberontakan yang mungkin timbul di dalam negeri;
4. Mematahkan usaha subversi dan infiltrasi yang mungkin

dipergunakan oleh musuh Negara yang berada di dalam negeri;

5. Yang kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup Negara sebagai satu Negara yang merdeka dan berdaulat.

Faktor-faktor social yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan dan membina suatu ketahanan nasional yang tangguh antara lain :

1. Faktor Geografis (termasuk factor Iklim)
2. Faktor Penduduk
3. Faktor Kekayaan Alam
4. Faktor Ideologi
5. Faktor Politik
6. Faktor Ekonomi
7. Faktor Sosial Budaya, dan
8. Faktor Kekuatan Militer.

Dengan letak Indonesia yang sedemikan strategis dan kondisi negara Indonesia yang selama ini dinilai sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya berdampak pada munculnya masalah, ancaman, dan gangguan dari luar, khususnya negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia yang dapat mempengaruhi pembangunan dan stabilitas Indonesia di dalam. Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini dan Timor Leste. Pulau-pulau itu tersebar di 9 provinsi yang sebagian besar terdapat di kepulauan Riau dan Maluku. Setengah dari

pulau-pulau tersebut berpenghuni dengan luas pulau antara 0,02-2000 km2. Pulau-pulau kecil terluar tersebut merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara Indonesia yang seharusnya pulau-pulau terluar ini mendapat perhatian khusus dalam pembangunan di Indonesia. Namun, kenyataannya pembangunan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang seharusnya menjadi simbol atau ikonik bagi Indonesia di mata dunia sangat memprihatinkan. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pulau-pulau terluar, diantaranya:

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia.
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

Masalah-masalah yang timbul di pulau-pulau terluar di Indonesia tersebut seharusnya dijadikan dasar untuk program pembangunan berkelanjutan untuk membenahi dan membangun pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pembangunan di pulau-pulau kecil terluar, memang bukanlah sesuatu yang mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia, selain secara geografis wilayahnya sulit dijangkau dan berjauhan dari pemeritah pusat, hadirnya

ancaman dari negara tetangga juga merupakan tantangan dalam pembangunan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Pembangunan yang berhasil dinilai dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan diiringi pembangunan yang berkesinambungan dalam artian tidak terjadi kerusakan sosial dan tidak terjadi kerusakan alam.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi Implementasi pembangunan abad ke XXI

Meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan non inflasi dan memastikan sumber daya yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Dalam kendala yang disebabkan oleh struktur ekonomi, sistem pajak dalam negeri dan pendapatan bukan pajak harus dirancang untuk meningkatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, sehingga menciptakan saldo fiskal yang berkelanjutan, dan mengurangi kebutuhan untuk mengandalkan pada peningkatan pinjaman publik atau penciptaan uang.

Transformasi yang sedang berlangsung dan berkembang adalah strategi pembangunan nasional dalam konteks globalisasi ekonomi internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dan dalam transisi mungkin harus menyesuaikan kebijakan pajak mereka, administrasi, dan undang-undang termasuk dimensi internasional dari sistem pajak nasional terhadap perubahan domestik, ekonomi, fiskal, dan keuangan lingkungan eksternal. Globalisasi, liberalisasi, perjanjian perdagangan internasional, dan upaya untuk menarik modal asing telah membujuk negara-negara berkembang, untuk sering mengistimewakan faktor penggerak keuangan dengan mengorbankan tenaga kerja dan menahan kebutuhan untuk membangun atau memperkuat sistem pajak

progresif.

Pengalaman masa lalu juga menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat atau menempatkan sistem pajak yang adil dan merata, yang meminimalkan disinsentif untuk efisiensi ekonomi yang sederhana (mudah dimengerti dan mengelola), yang menghilangkan penggelapan dan penghindaran, yang cukup fleksibel untuk mengamankan penerimaan pajak yang adil dari pendapatan disebabkan instrumen keuangan yang inovatif, dan yang memungkinkan untuk secara bertahap memperluas basis pajak dan mengintegrasikan sektor informal dalam arus utama perekonomian. Pemilihan pajak dan bea perlu memastikan bahwa mereka layak secara administratif dan mengakibatkan pengumpulan pendapatan yang realistis. Sistem ini harus melindungi pendapatan nasional dari *havens* pajak, dan tempat penampungan lainnya sehingga mencegah dari persaingan lokasi menjadi perlombaan ke bawah.

Sebuah proses anggaran yang transparan dan menghubungkan pendapatan untuk pengiriman meningkatkan akuntabilitas dan melegitimasi pengumpulan pendapatan, hasil yang sukses dari program publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebuah sistem administrasi perpajakan yang transparan, efisien, bebas dari korupsi, dapat memperluas pengumpulan pendapatan. Sementara mobilisasi sumber daya domestik dalam jangka panjang penting untuk pembangunan berkelanjutan, untuk sejumlah besar negara-negara maju, akan ada kebutuhan untuk sumber daya eksternal yang substansial untuk membuat langkah besar dalam pengentasan kemiskinan.

Pajak memainkan peran penting dalam strategi pengurangan kemiskinan. Fungsi yang paling penting adalah untuk

meningkatkan pendapatan untuk membiayai program-program pengeluaran pemerintah. Apakah pajak dapat membantu dalam mendistribusikan pendapatan atau memberikan bantuan yang ditargetkan adalah pertanyaan yang sulit, jawaban yang tergantung pada faktor-faktor tertentu. Namun, hingga pajak penghasilan pribadi memainkan peran yang lebih besar di negara berkembang, redistribusi melalui perpajakan akan sangat sulit. Bahkan kemudian, kompetisi pajak penghasilan dari negara lain dan keterbatasan administrasi pajak akan membatasi kemampuan untuk menggunakan sistem pajak untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan. Menangani masalah kemiskinan melalui desain instrumen pajak tertentu mungkin lebih menjanjikan. Meskipun setiap usulan khusus yang perlu dipertimbangkan dalam konteks sistem pajak secara menyeluruh, mengurangi jumlah individu yang dikenakan pajak penghasilan dan rating yang lebih rendah dari bahan makanan dasar tertentu dan manfaat bahan bakar sebagai pertimbangan serius.

Pembangunan yang dihadapi tidak hanya prospek terbatas pertumbuhan secara keseluruhan, tetapi juga pertumbuhan pro-poor.

Selama tahun 1980 ketika tingkat pertumbuhan secara keseluruhan agak rendah, pengurangan kemiskinan di India lebih spektakuler (dari 51 persen menjadi 36 persen), terutama disebabkan terobosan pertanian. Demikian pula, Bangladesh mengurangi kemiskinan secara substansial pada tahun 1980 (dari 70 persen menjadi 48 persen) dengan meningkatkan produksi pangan.

Prinsip umum yang dapat diturunkan dari contoh ini adalah bahwa pertumbuhan untuk segera mengurangi kemiskinan, harus

mengarahkan sumber daya secara tidak proporsional untuk: sektor di mana masyarakat miskin bekerja (seperti pertanian); daerah di mana mereka tinggal (seperti kita daerah tertinggal); dan output yang mereka konsumsi (seperti makanan). Ini berarti bahwa strategi pertumbuhan pro-poor terutama terdiri dari penciptaan lapangan kerja dikombinasikan dengan stabilitas harga relatif barang dan jasa penting, seperti makanan, dalam keranjang konsumsi masyarakat miskin.

Berdasarkan prinsip-prinsip umum, ada empat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan: kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro atau mikro sektor, kebijakan restrukturisasi, dan kebijakan redistributif.

Kebijakan ekonomi makro

Bahan makroekonomi utama pertumbuhan pro-miskin tingkat tinggi kerja dan rendahnya tingkat inflasi. Namun, dalam arti kurva phillips klasik, bisa ada trade-off antara dua tujuan tersebut. Artinya, mencapai stabilitas harga memerlukan membatasi tingkat agregat demand, dengan ini implikasi buruk pada tingkat output dan kesempatan kerja. Atau, meningkatkan tingkat kerja memerlukan merangsang permintaan, yang dapat meluas ke tekanan inflasi. Ini trade-off dapat dikurangi, namun, jika ada kelebihan kapasitas dalam perekonomian atau jika upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas faktor.

Konsensus Washington tradisional pada stabilisasi makroekonomi yang didukung oleh lembaga keuangan internasional overemphasizes inflasi yang rendah, sering dengan mengorbankan pertumbuhan dan perkembangan. Secara khusus, obsesi dengan menghilangkan defisit fiskal (dan, dengan demikian, defisit transaksi berjalan), jika dicapai melalui pengurangan dalam

pengeluaran publik pada kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Telah menghambat proses pertumbuhan dan menciptakan kemiskinan lebih. Bertentangan dengan pandangan bahwa defisit fiskal yang lebih tinggi mendesak keluar investasi swasta dengan menaikkan suku bunga, ada bukti empiris persuasif bahwa jika defisit fiskal yang lebih tinggi disebabkan oleh pengeluaran investasi publik yang lebih besar, dari ini mungkin benar-benar "berkokok di" investasi swasta secara bersih dengan menghapus kemacetan fisik infrastruktur dan dengan demikian meningkatkan produktivitas faktor investasi swasta. Selain itu, pengeluaran publik yang lebih besar untuk pendidikan dan kesehatan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan lebih baik membekali mereka untuk keluar dari perangkap kemiskinan.Oleh karena itu pertanyaannya adalah, adalah merupakan titik optimal dalam inflasi pengangguran trade-off dari sudut pandang pengentasan kemiskinan? Pengalaman tampaknya merangsang investasi dan pertumbuhan. Selama inflasi moderat, itu perlu untuk meredam pertumbuhan. Selain itu, pertumbuhan didorong oleh ekspansi fiskal dapat membantu defisit pemerintah keuangan selama mereka tidak berlebihan melalui pertumbuhan cepat pendapatan pajak. Tingkat yang lebih besar dari investasi publik, mengembangkan sumber daya manusia, dan mengurangi kemiskinan.

Kinerja ekonomi Pakistan dalam beberapa tahun terakhir adalah contoh utama dari proses stabilisasi pergi terlalu jauh, di bawah naungan program IMF yang sedang berlangsung, yang memiliki pertumbuhan substansial terbelakang dan menyebabkan peningkatan pesat dalam pengangguran dan kemiskinan (dari sekitar 20 persen pada awal 1990-an untuk lebih dari 33 persen saat ini). Selama tahun 1990, pengeluaran pembangunan sektor publik dipotong dari hampir 10 persen dari PDB menjadi kurang

dari 3 persen. Sekarang tingkat stabilisasi ada, defisit transaksi berjalan telah diubah menjadi surplus, dan cadangan devisa telah meningkat tajam. Perkembangan yang menguntungkan meliputi dimulainya kembali bantuan hibah oleh Amerika Serikat, utang penjadwalan ulang yang menguntungkan, dan arus masuk besar pengiriman uang rumah.

Namun untuk tingkat pertumbuhan turun drastis menjadi sekitar hanya 3 persen. investasi swasta telah menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagai kebijakan stabilisasi telah menyebabkan tingkat nyata bunga yang tinggi, biaya relatif lebih tinggi dari impor barang modal (karena depresiasi riil tukar riil yang tinggi). kelebihan kapasitas yang signifikan karena tingkat rendah atau permintaan agregat, dan tidak adanya investasi publik pelengkap dalam infrastruktur. stabilizations fiskal telah terbukti sulit dipahami dan defisit anggaran tetap tinggi (mendekati 7 persen dari PDB) terutama disebabkan kegagalan penerimaan pajak tumbuh di hadapan ekonomi stagnan.

Kebijakan Sektor ekonomi mikro atau Micro

Untuk pertumbuhan menjadi kemiskinan sangat mengurangi, itu harus berkontribusi untuk generasi pekerjaan lebih pada peningkatan angkatan kerja dan stabilitas harga barang-barang penting. Ini berarti bahwa pertumbuhan harus terkonsentrasi di sektor-sektor yang merupakan sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat miskin atau memproduksi dan jasa yang mereka konsumsi.

Sektor utama yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah pertanian. pembangunan pertanian di produksi pangan khususnya ditingkatkan dan lebih secara umum pembangunan pedesaan cenderung membuat kontribusi terbesar untuk mengentaskan

kemiskinan, terutama karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan. Tentu saja, sejauh mana dampaknya tergantung pada sifat dari nominal yang tidak sama distribusi awal tanah dan pada sifat dari strategi tertentu untuk mencapai pembangunan pertanian. Kenaikan kemiskinan pedesaan di Pakistan pada tahun 1990an selama periode pertumbuhan pertanian yang cepat (lebih dari 4 persen per tahun) dan pencapaian yang dihasilkan dari swasembada pangan menyoroti pentingnya faktor-faktor ini. Kenaikan kemiskinan pedesaan disebabkan baik untuk tingkat tinggi ketidaksetaraan di kepemilikan tanah pedesaan dan perubahan dalam sistem kepemilikan tanah dimana pangsa croppers telah diubah menjadi upah buruh.

Pengalaman dengan pertumbuhan pertanian pro-miskin adalah bahwa hal itu tergantung pada kemajuan teknis yang tepat, untuk contoh, penyebaran varietas unggul benih untuk meningkatkan makanan, seperti yang terjadi selama revolusi hijau di tahun 1960-an. Ini juga membutuhkan investasi yang lebih besar di infrastruktur pedesaan, misalnya, dalam jaringan irigasi sekunder dan tersier, jalan pertanian ke pasar, listrik, dan pelayanan sosial dasar. Menghapus harga pertanian represi telah membantu merangsang kerja pertanian dan produksi melalui peningkatan insentif. Namun, pemerintah harus berat ini terhadap konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat miskin pembeli sebagian besar makanan bersih perkotaan. Lebih besar mekanisasi pertanian, difasilitasi oleh pemberian diperluas kredit, telah memberikan kontribusi untuk distribusi yang lebih merata keuntungan output dan menyebabkan penggusuran tidak memiliki tanah kecil dan besar.

Sektor lain yang datang paling dekat untuk memenuhi kriteria tersebut adalah konstruksi, terutama jika itu berfokus pada

penampungan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pada penyediaan infrastruktur pro-miskin di daerah kumuh perkotaan dan pemukiman liar atau ke desa-desa di daerah yang lebih ke belakang. pesatnya pertumbuhan sektor konstruksi dapat menyerap proporsi yang signifikan dari tenaga kerja tidak terampil. Banyak negara telah memasukkan program pekerjaan umum sebagai komponen penting dari strategi pengurangan kemiskinan mereka untuk tujuan menyerap pekerja pertanian musiman pengangguran dan pekerja migran tidak terampil di daerah perkotaan.

Kebijakan restrukturisasi

Pada 1980-an dan 1990-an, kebijakan restrukturisasi ekonomi semakin berfokus pada mengurangi peran negara sebagai agen terkemuka pengembangan dan negara mengintegrasikan lebih dekat ke dalam ekonomi global. Ini telah melibatkan satu set standar langkah-langkah seperti privatisasi dan deregulasi, liberalisasi sektor keuangan, liberalisasi perdagangan, dan konvertibilitas neraca modal.

Pelajaran dari pengalaman baru-baru ini menyoroti kebutuhan untuk sequencing tepat dan laju reformasi. Krisis keuangan yang melanda negara-negara Asia Timur 1997 menunjukkan dengan jelas kebutuhan untuk regulasi lebih kuat dari pasar modal dalam negeri dan sektor perbankan. Krisis ini, yang juga memicu runtuhnya ekonomi riil, menyebabkan pembalikan dramatis pengurangan properti di negara-negara seperti Indonesia dan Thailand. Semalam, ini krisis keuangan menghapus keuntungan pengurangan kemiskinan.

Masalah sequencing yang salah yang terlihat di negara-negara seperti Pakistan di mana liberalisasi sektor keuangan, yang melibatkan pindah ke suku bunga berbasis pasar sebelum

reformasi fiskal, telah memperburuk masalah defisit fiskal yang besar karena pertumbuhan eksplosif yang dihasilkan dalam kewajiban utang-servis. Ini telah ramai keluar pengeluaran pembangunan dan menyebabkan kurangnya investasi substansial dalam pembangunan manusia.

Privatisasi telah memiliki dampak ambigu pada kemiskinan. Dimana dalam memberikan kontribusi untuk efisiensi yang lebih besar, itu diberikan manfaat konsumen dengan baik kenaikan harga mengurangi harga atau membatasi dalam utilitas dasar. Namun, di mana hal itu mengarah pada pembentukan kuasi-monopoli, itu membatasi akses bagi masyarakat miskin dengan menghapus subsidi silang dan pentahapan keluar layanan merugi. Selain itu, privatisasi yang melibatkan perampingan besar tenaga kerja telah menyebabkan lebih banyak pengangguran dan kemiskinan dalam ketiadaan, pertama, investasi swasta apung untuk menciptakan kesempatan kerja baru bagi tenaga kerja pengungsi dan, kedua, jaring pengaman sosial yang memadai untuk akses ke kredit dan pelatihan kembali mekanisme .

Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan kuratif telah menyebabkan struktur dual ketentuan. Orang kaya memperoleh akses ke layanan pribadi yang lebih berkualitas dan melihat miskin standar layanan jatuh. Mundur dari penyediaan layanan oleh sektor publik dialihkan tenaga terampil seperti dokter dan guru untuk fasilitas pribadi yang lebih menguntungkan. Meskipun kasus dapat dibuat untuk privatisasi industri dan perdagangan dengan alasan efisiensi, pemerintah tetap peran penting dalam menjaga akses masyarakat miskin terhadap utilitas dan pelayanan dasar.

Selama tahun 1990, liberalisasi perdagangan menjadi strategi

dasar dimana negara-negara berkembang bisa manfaat dari globalisasi dan mencapai pertumbuhan yang dipicu ekspor lebih cepat. Di negara-negara di mana tingkat awal represi perdagangan tinggi (dari contoh India dan Bangladesh) membuka pasar mereka tidak memberi keuntungan yang signifikan pada awal-ke pertengahan 1990-an. Sebagian besar negara terus menurunkan tarif impor mereka, phase out pembatasan kuantitatif mereka, dan bergerak ke arah rezim nilai tukar berbasis pasar dalam substitusi impor. Secara bersamaan, insentif fiskal yang menarik dibuka lebih sektor untuk FDI. Namun optimisme secara bertahap memudar dalam menghadapi resesi keseluruhan di pasar dunia dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara maju mengangkat hambatan untuk ekspor padat karya melalui kuota ekspor (seperti di tekstil) dan subsidi yang sangat besar (terutama untuk pertanian) kepada produsen dalam negeri. FDI sebagian besar masih terkonsentrasi di negara-negara berpenghasilan menengah.

Sementara penurunan tarif impor memiliki beberapa konsekuensi merugikan, terutama pada pengurangan kemiskinan. Banyak industri meninggal karena ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan impor lebih murah. Misalnya adat tukang dan kerajinan sektor India, mempekerjakan banyak orang di pondok dan industri rumahan, menghadapi kepunahan karena ketersediaan barang konsumen dasar yang diproduksi secara massal dari luar negeri. Sektor yang telah memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan dan investasi langsung asing di India, seperti sektor teknologi informasi, telah dasarnya muncul sebagai kantong-kantong ekspor dengan beberapa link mundur atau maju dengan ekonomi domestik.

Negara-negara berkembang harus berusaha untuk terlibat dengan ekonomi dunia, tapi hati-hati dan dengan cara mereka

sendiri. pembukaan dini dapat menyebabkan baik untuk perpindahan langsung dari kegiatan ekonomi dan hilangnya pertumbuhan atau distribusi yang tidak merata dari keuntungan. Hanya jika pemerintah tepat urutan liberalisasi perdagangan dan neraca modal dapat globalisasi mendukung miskin. strategi investasi dalam negeri harus mencari untuk memulai proses pertumbuhan adat sebelum membuka ke ekonomi global. Secara bersamaan, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan tingkat pembangunan manusia untuk menghadapi tekanan persaingan globalisasi dan untuk mengatasi kelembagaan kendala-seperti tidak adanya pengaturan yang memadai untuk pemasaran, kontrol kualitas, transfer teknologi, dan penelitian dan pengembangan-yang menghambat pembangunan sektor ekspor.

Salah satu implikasi dari liberalisasi perdagangan yang jarang diteliti adalah implikasi yang merugikan pembangunan manusia melalui dampak pada pendapatan masyarakat. Sebagian besar negara-negara berkembang sangat bergantung pada pajak perdagangan internasional untuk pendapatan karena mereka relatif mudah untuk mengumpulkan. Scaling down tarif impor sebagai bagian dari liberalisasi perdagangan telah menyebabkan kerugian pendapatan yang cukup besar karena ketidakmampuan untuk menggantikan tugas kustom dengan perpajakan yang lebih efektif dari pendapatan domestik, produksi, dan transaksi yang memerlukan administrasi perpajakan yang lebih canggih. Kekurangan pendapatan dapat menyebabkan pemotongan besar pada pembangunan manusia pada saat negara-negara berkembang membutuhkan lebih banyak pengeluaran di daerah-daerah.

Kebijakan redistributive

Sebuah studi terbaru oleh Institut Dunia Ekonomi Pembangunan

telah menunjukkan bahwa ketimpangan telah meningkat dalam dua-pertiga dari negara-negara yang datanya dapat diandalkan tersedia. Beberapa penjelasan yang ditawarkan untuk ini termasuk perubahan berbasis keterampilan teknologi, melemahnya serikat buruh, liberalisasi perdagangan, dan distribusi miring dari FDI. Globalisasi tidak hanya memberikan kontribusi untuk ketidaksetaraan lebih besar di antara negara-negara, tetapi juga untuk ketimpangan yang lebih besar dalam negara. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 1990-an itu, oleh karena itu, kurang pro-poor.

Pemerintah harus menemukan kebijakan ketimpangan-mengurangi yang juga dapat memberikan kontribusi untuk pertumbuhan atau setidaknya netral. Salah satu kunci dari reformasi adalah kebijakan redistributif yang mengubah alokasi sumber daya publik melalui mengubah pola pengeluaran yang menguntungkan orang kaya. Misalnya, Pakistan, subsidi jasa yang dikonsumsi oleh orang kaya menambahkan hingga sebanyak 4 persen dari PDB. Underpriced, layanan pro-kaya termasuk irigasi, listrik, dan pendidikan tinggi. kebijakan harga yang tepat untuk layanan ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan untuk subsidi silang layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Pengeluaran pajak, dalam bentuk pembebasan atau konsesi dalam penerapan hukum pajak (terutama yang berkaitan dengan pajak langsung), yang merajalela di banyak negara. Di Pakistan, mereka biaya hampir 4 persen dari PDB dalam hal pendapatan terdahulu dan termasuk perlakuan pajak disukai dari pendapatan diterima dimuka, termasuk penghasilan dari keuntungan modal atau bunga; tarif efektif yang rendah pajak atau real estate; hak bebas pajak untuk fungsionaris pemerintah tingkat tinggi; dan pembebasan pajak penghasilan pertanian. Salah satu cara yang efektif untuk memperluas basis pajak adalah untuk menarik

pengeluaran pajak ini bersama dengan secara bersamaan mengurangi tingkat pajak tidak langsung, yang umumnya regresif di alam dan efek buruk lebih buruk

Daerah lain besar atau reformasi dalam pengeluaran publik adalah untuk mengubah komposisi. Misalnya, pengeluaran pertahanan di banyak negara Asia Selatan secara substansial melebihi pengeluaran sosial. Upaya mencapai perdamaian dan stabilitas yang lebih besar di wilayah tersebut bisa menghasilkan dividen yang cukup besar dalam hal pengeluaran yang lebih besar pada kesehatan dan pendidikan.

Daerah lain di mana kebijakan redistributif bisa efektif dalam alokasi kredit perbankan. Hal ini akan melibatkan orientasi sektor perbankan terhadap kredit mikro bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah. Penekanannya harus o meningkatkan akses bukan pada kredit bersubsidi. Pengalaman lembaga keuangan seperti Grameen Bank di Bangladesh adalah bahwa penekanan ini dapat menjaga biaya intermediasi lebih rendah melalui pinjaman berbasis kelompok sementara mempertahankan kinerja pembayaran pada tingkat tertinggi, bahkan pada tingkat dekat-pasar yang menarik, melalui tekanan peer group dan prospek ulangi peminjaman. Sebaliknya, peminjam besar lebih mungkin untuk menjadi rentan terhadap kesalahan yang disengaja karena sistem patronase politik dan kroni kapitalisme, khususnya di bank-bank pemerintah. Selain itu, kredit yang tersedia untuk peminjam kecil dapat berkontribusi pendapatan dan pekerjaan untuk secara substansial lebih besar pengganda dan, dengan demikian, membantu mengurangi kemiskinan.

Akhirnya, kasus untuk reformasi tanah yang kuat di negara-negara di mana distribusi tanah sangat tidak merata. Misalnya, di

Pakistan dan Filipina, atas 2 sampai 3 persen petani memiliki lebih dari sepertiga dari tanah. Isu reformasi tanah, bagaimanapun, perdebatan dari sudut pandang dampak pada produktivitas pertanian. Namun demikian banyak bukti empiris menyoroti tidak adanya hubungan positif antara ukuran lahan dan produktivitas. Tampaknya bahwa sementara peternakan lebih besar dapat menggunakan modal dan faktor non masukan lebih intensif, pertanian kecil kemungkinan akan ditandai dengan penggunaan yang lebih tinggi tanah, tanam, dan intensitas tenaga kerja. Secara keseluruhan, lahan reformasi pasangan dengan kredit diperluas dan pengaturan pemasaran yang lebih baik fundamental dapat mengubah posisi kaum miskin pedesaan.

Politik Ekonomi Dari Kebijakan Pro-Poor. Apa kelayakan mengadopsi kebijakan pro-miskin dan dalam kondisi apa mereka cenderung adopter? Bahkan dalam masyarakat seharusnya demokratis kita melihat bukti kekuasaan negara oleh elit, dimana kebijakan publik dan alokasi sumber daya publik yang bias mendukung yang kaya dan berkuasa. kebijakan ekonomi yang pro-miskin tidak mungkin kecuali politik dan proses tata kelola yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Untuk kebijakan ekonomi untuk fokus pada pengentasan kemiskinan, struktur pemerintahan harus efektif dalam mencapai tujuan ini. Untuk membuat struktur tersebut efektif, koalisi pro-poor yang luas diperlukan.

Pilihan dan pelaksanaan kebijakan pro-poor jelas tergantung pada implikasi ekonomi politik dari proses. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan? Pertanyaan mendasar adalah apakah koalisi yang efektif dapat diatur untuk menggagalkan upaya oleh kelompok-kelompok vested interest yang kuat melihat perubahan sebagai zero sum game, dengan gainers didefinisikan dengan baik dan pecundang, maka mereka lebih cenderung

untuk menolak. Inilah sebabnya mengapa upaya sekaligus-dan-untuk-semua pengurangan ketidaksetaraan, seperti land reform yang progresif, sangat sulit untuk menerapkan. Oposisi terhadap reformasi ini sangat ketat bukan hanya karena kerugian ekonomi potensial, namun juga karena dampak yang mendasar pada struktur kekuasaan pedesaan. Oleh karena itu, reformasi tanah telah biasanya datang setelah terjadinya peristiwa bencana besar (misalnya, perang, seperti di Jepang atau mengikuti partisi dari India) atau ketika masalah kemiskinan dan kerusakan sosial yang dihasilkan telah menjadi begitu serius pemerintah radikal telah muncul dengan agenda yang melibatkan perubahan struktural utama. Pengalaman baru-baru Nepal mengungkapkan bahwa, dalam menghadapi pemberontakan Maois, pemerintah dipaksa untuk mengumumkan reformasi lahan utama, meskipun mereka telah sebagian besar tetap diimplementasikan sampai saat ini.

Kebijakan pro-miskin lebih mungkin jika kelompok vested interest melihat mereka sebagai sum game yang positif. Ini adalah kasus ketika pendapatan umumnya meningkat dengan cepat dan itu menjadi mungkin di margin untuk mendistribusikan bagian yang tidak proporsional dari keuntungan pendapatan dalam mendukung orang miskin, misalnya, Malaysia mampu mengejar program tindakan afirmatif yang kuat dalam mendukung Melayu asli yang lebih miskin dari penduduk Cina atau India, selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menunjukkan bahwa kebijakan pro-miskin juga pro-pertumbuhan dan strategi pembangunan berupaya mengatasi kemiskinan selama proses pertumbuhan.

Apa elemen kunci dari pemerintahan cenderung mendukung penerapan kebijakan pro-miskin? perubahan sistemik dan institusional yang memungkinkan masyarakat miskin untuk

memiliki suara kuat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang penting dan termasuk:

a. Peraturan penerbangan. Kepentingan orang miskin dapat ditumbangkan baik dengan kehadiran hukum-seperti inheren adil seperti yang berkaitan dengan hak milik atau perlakuan diskriminatif terhadap minoritas dan perempuan-atau dengan aplikasi adil dan penegakan hukum. Secara garis besar, sistem yang tepat dan peradilan diperlukan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi tetap menghormati hak milik, menjamin kesucian kontrak, dan menurunkan biaya transaksi.
b. Transparansi dan Akuntabilitas. masalah serius dengan tata kelola ekonomi meliputi lebih dari sentralisasi pengambilan keputusan dan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diukur dari adanya peningkatan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)* dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk.

Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang tinggi sekitar 6,1-6,3% tetapi apakah efek pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya bagaimana pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Hal inilah yang lantas menjadi masalah dalam indikator pertumbuhan ekonomi yang tidak lain hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di Ibukota. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akan menjadi sia-sia apabila tidak diiringi dengan kemakmuran dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan yang diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran hingga ke pelosok daerah di Indonesia seharusnya menjadi program utama pemerintah dalam

mencapai pembangunan yang berhasil.

Indonesia negara kepulauan, Indonesia selain dikenal sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman hayati *(biodiversity)*, Indonesia juga dikenal sebagai pusat keanekaragaman ikan laut, karena hampir 75% ikan laut di dunia dapat ditemukan di perairan Indonesia. Hal ini menyadarkan kita bahwa ada potensi yang besar bagi Indonesia di dalam sektor maritim dan pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, dalam artikel berjudul "Potensi Ekonomi: Kawasan Pulau-pulau Kecil Sebesar Rp. 22,5 Triliun Pertahun" yang dimuat oleh Prof. Dr.Dietriech G. Bengen, DEA. Bahwasannya, dijelaskan dalam artikel tersebut bahwa jika dilihat dari segi ekonomi, pulau-pulau kecil itu memiliki dua aktivitas yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan, yaitu perikanan dan pariwisata. Tidak ada sebuah negara atau wilayah di dunia ini yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dapat berkembang dan maju, selain dari sumber daya laut dan pariwisata yang mereka miliki, contohnya adalah pulau Maldives dan Hawaii. Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil dengan potensi yang luar biasa dan sangat penting untuk tidak hanya sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pulau-pulau kecil tersebut tetapi bahkan dapat mengangkat perekonomian nasional bangsa ini dengan berbasis pada sumber daya kelautan.

Potensi perikanan dan pariwisata di pulau-pulau kecil ini harus diangkat sebagai salah satu strategi pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia sekaligus dalam rangka membangun peningkatan pendapatan nasional di Indonesia. Disisi lain pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki posisi yang strategis sebagai garda

terdepan dan pintu gerbang dari NKRI yang dilalui oleh jalur internasional karena Indonesia memiliki garis pantai yang cukup panjang yang sangat strategis yaitu diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dimana kita bisa menjual belika jasa dan Kekayaan perikanan kita pada kapal-kapal yang melewati pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

Kenyataannya adalah Indonesia walaupun memiliki luas lautan sebesar 5,8 juta km2. Laut teritorial Indonesia seluas 3,1 juta km2 saja belum kita manfaatkan secara optimal, apalagi jika ditambah dengan 2,7 juta km2 ZEE. Sumber daya alam yang sedemikian besar tidak mungkin tidak bisa mengangkat ekonomi kita, kecuali jika kita tidak mengelolanya dengan baik. Kita ketahui bahwa 85% produksi maritim kita berasal dari perairan pesisir di sekitar pulau-pulau kecil yang membentuk ekosistem terumbu karang. Ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi di dunia seperti ikan kerapu dan Napoleon, semuanya berasal dari ekosistem terumbu karang tersebut. Jika dihitung secara ekonomi, potensi kawasan pulau-pulau kecil dibidang perikanan jika dikelola dengan baik berbasis konserbasi akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp 22,5 Triliun pertahun.

Jika Indonesai bisa mengembangkannya dengan baik, maka hasilnya akan luar biasa tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia tetapi juga keberhasilan dalam pengembangan nasional. Apalagi jika ditambah dengan pembangunan kawasan untuk wilayah kepentingan pariwisata maka pertumbuhan ekonomi nasional dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia akan jauh meningkat karena pulau-pulau kecil memiliki panorama yang sangat indah.

Pembangunan yang berkesinambungan dalam artian tidak

terjadi kerusakan alam

Masalah yang dihadapi dalam menciptakan pembangunan yang dianggap berhasil adalah bagaimana pembangunan yang tidak merusak alam. Pada dasarnya, mustahil rasanya untuk tidak merusak alam dalam segala aspek pembangunan. Karena ketika suatu wilayah, seperti apabila pulau-pulau kecil terluar di Indonesia mulai melakukan pembangunan di bidang maritim dan pariwisata dan berkembang terus sehingga wilayah tersebut maju dan berhasil mengikat investor-investor dan pengusaha untuk menanamkan modal ke wilayah tersebut maka kemungkinan masalah yang dihadapi seperti over eksploitasi, konflik penggusuran wilayah pemukiman, praktek *illegal fishing* akan meningkat. Apabila hal itu berlanjut maka pembangunan yang dilakukan akan sia-sia karena nantinya biaya yang dikeluarkan untuk melestarikan lingkungan wilayah tersebut akan lebih mahal, ditambah lagi bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan sangat dibutuhkan untuk itu perlu perhatian khusus untuk pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia untuk terus memantau bagaimana pembangunan yang berlangsung di wilayah tersebut, untuk pencegahan terjadinya kerusakan alam tersebut mungkin pemerintah dapat memberlakukan undang-undang yang lebih mengikat mempunyai sanksi yang tegas dalam perusakan lingkungan dan merancang program pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

Penerapan pembangunan (Rekontruksi) nilai-nilai dalam karakteristik budaya dengan kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal

dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat Indonesia melalui suatu proses transformasi budaya merupakan kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain merupakan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya alam harus terimplementasikan dalam kebijakan negara, dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang berasaskan gotongroyong dan kekeluargaan sebagai salah satu wujud kearifan lokal dalam sector, politik, ekonomi,social,budaya, dan pendidikan .Mulyaningsih,2017 (Journal Of Secretary & Business Administration Vol I NO I 2017) http://jurnal.asmtb.ac.id/index.php/jsab/index.

B. Periode Pembangunan Masa Pandemi

Pembangunan merupakan proses yang harus dilakukan oleh setiap negara utuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek yang harus dilaksanakan meliputi aspek;

1. Aspek politik
2. Aspek ekonomi
3. Aspek Sosial-Budaya
4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik
5. Aspek Institusionil

Aspek - Aspek Yang Saling Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

1. Aspek Politik

Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses

perkembangan politik, ekonomi, social dan lain-lain. Hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.

Beberapa aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah :

a. Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistim politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.
b. Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
c. Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.
d. Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan.
e. Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dan birokrasi.
f. Hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik diluar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

2. Aspek Ekonomi

Terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi.

Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten.

Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.

3. Aspek Sosial – Budaya

Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah :

a. Hambatan-hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan.
b. Motivasi apakah yang diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.
c. Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan.
d. Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Hambatan-hambatan kulturil dapat dikermukakan adanya tradisi-tradisi tertentu, termasuk tradisi religius (ini bukan berarti agama).

Dalam hal ini termasuk pula ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap

ciri, nilai manusia dan bahkan sikap-sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisional dan tidak menunjang pembangunan.

4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan terknologi. Administrasi pembangunan perlu membantu sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangasn sumber-sumber alam (*resources development*), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup.Kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

Masalah lingkungan hidup yang utama bagi Negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.

5. Aspek Institusionil

Aspek institusinil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang telah diuraikan diatas. Pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi

pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain.

Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi-institusi didalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi didalam masyarakat yang lama.Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan.

Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh dirasakan penting sekali peranannya organisasai-organisasi tertentu yang mampu mengintro, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan-pembaharuan sosial maupun budaya. Pada dasarnya administrasi yang meliputi aspek-aspek diatas di jawalantahkan kedalam beberapa program. Program-program tersebut , yaitu sebagai berikut :

Program penerapan pemerintahan yang baik, yaitu program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. membangun pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, kebertanggungjawaban atau akuntabilitas, dan ketaatan hukum, serta membuka partisipasi publik seluas-luasnya pada semua kegiatan pembangunan; dan
2. menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang

tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.

Teori pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu teori yang dianut oleh banyak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemberlakuannya di Indonesia

Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu teori modernisasi, tahap dependensi, teori sistem dunia. Pada tahap pertama, muncul teori modernisasi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Teori modern dibagi menjadi teori modern klasik dan teori modern baru.

Teori modern klasik memberikan pembenaran mengenai hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Teori ini menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara Barat dilihat sebagai negara modern. Teori ini memberikan saran bahwa negara-negara berkembang harus meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya agar dapat keluar dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan. Teori ini juga menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara Dunia Ketiga. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi klasik ini adalah, modernisasi lebih menekankan faktor internal sebagai akibat dari masalah dalam masyarakat itu sendiri.

Teori modern baru kemudian mengkritik seluruh jawaban dari teori modernisasi klasik. Hal ini dikarenakan teori modernisasi klasik terlalu berorientasi ke Barat, terlalu optimis, mensahkan dominasi Barat di dunia ketiga, dan menolak tradisi. Teori modern baru ini berasumsi bahwa tradisi dapat memberikan pengaruh

positif terhadap perkembangan ekonomi.

Karena pola pembangunan ini tidak memberi kepuasan, maka kemudian lahir teori ketergantungan/dependensi, yang memiliki sisi pandang dari negara- negara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju. Teori dependensi menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Teori ini mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan). Secara ekstrim, dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Hal ini dilihat dari kegagalan program dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (KEPBBAL) pada awal 1960-an. Program ini dimulai tahun 1950-an saat banyak negara Amerika Latin menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada proses industrialisasi melalui program Industrialisasi Substitusi Import (ISI). Strategi pembangunan tersebut diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan. Namun, yang muncul kemudian adalah terjadinya stagnasi ekonomi yang ditandai dengan adanya masalah pengangguran, inflasi, devaluasi, penurunan nilai perdagangan, dan lainnya. Kondisi ini menimbulkan gerakan perlawanan dari rakyat dan tumbangnya pemerintahan di beberapa negara. Secara filosofis, teori dependensi memiliki kehendak untuk meninjau kembali pengertian dari pembangunan. Pembangunan tidak tepat untuk diartikan sebagai sekedar proses industrialisasi, peningkatan output, dan peningkatan produktivitas. Bagi teori dependensi,

pembangunan lebih tepat diartikan sebagai peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara Dunia Ketiga. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar pelaksanaan program yang melayani kepentingan elit dan penduduk perkotaan, tetapi lebih merupakan program yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk pedesaan, para pencari kerja, dan kelas sosial lainnya yang membutuhkan bantuan.

Teori terakhir adalah teori sistem dunia. Teori ini memiliki pandangan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme. Di dalam teori ini, adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi pinggiran, dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya memiliki tujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan, dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran dalam melakukan perluasan pasar serta pengenalan teknologi modern. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar internasional melalui perang harga dan kualitas.

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan seringkali diarahkan pada pertumbuhan di bidang ekonomi atau kemajuan material. Namun

pada kenyataannya, pembangunan di bidang ekonomi saja belum cukup untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, karena malah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan akibat kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi sumber, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan di bidang sosial pun perlu dilaksanakan.

Dari penjelasan masing-masing teori pembangunan tersebut, teori modernisasi tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan masyarakat dengan teori modernisasi ini kurang mendasar pada masyarakat Indonesia. Modernisasi identik dengan pertumbuhan ekonomi, dan melupakan budaya yang membangun kehidupan masyarakat. Masyarakat menerima berbagai perubahan di dalam kehidupannya sebagai akibat dari modernisasi, seperti gaya hidup, fasilitas-fasilitas modern seperti mall, diskotik, cafe, dan lain sebagainya. Sementara di tengah-tengah perubahan yang terjadi, masyarakat belum mampu untuk meninggalkan bentuk-bentuk tradisi lamanya. Akibatnya, timbul ketimpangan sosial dalam masyarakat tersebut.

Menurut teori modernisasi, masyarakat Indonesia pada umumnya belum siap untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh. Proses pembangunan terhambat oleh nilai-nilai budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia, seperti nilai budaya yang tidak mementingkan mutu atau prestasi, tidak mampu meninggalkan otoritas tradisinya, menganggap hidup selaras dengan alam sehingga timbul konsep tentang nasib, tidak disiplin, kurang bertanggungjawab, tidak berani menanggung resiko, dan lain-lain. Inilah sebabnya negara Indonesia sebagai negara dunia

ketiga mengalami keterbelakangan. Di sini terlihat jelas bahwa teori modernisasi ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Teori selanjutnya adalah teori dependensi atau ketergantungan. Jika dikaitkan dengan teori ini, pembangunan di Indonesia bisa saja, yaitu dengan menggantungkan pembiayaannya dari batuan luar negeri, dinama negara pemberi bantuan tersebut dinamakan negara pusat, sebagai modal asing. Pemberian modal asing ini merupakan sesuatu yang diharuskan bagi negara pusat untuk membantu kemajuan Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pemberian bantuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal yang telah disepakati oleh negara-negara pusat. Pemberian modal asing ini dijadikan sebagai jalan bagi negara-negara maju untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besar dari negara yang mendapat bantuan, seperti Indonesia. Dampak dari konsekuensi dari pemberian bantuan, berupa eksploitasi sumberdaya alam dan pengambilan keuntungan lainnya dari proses pembangunan, menjadikan Indonesia secara perlahan semakin terpuruk kedalam jurang kemiskinan, dikarenakan utang yang membebani semakin banyak. Kekayaan alam yang melimpah di tanah air Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan posisi lemah sebagai negara yang memiliki hutang pada negara-negara maju. PT. Freeport di Papua, sebagai contoh, telah megeksploitasi hampir seluruh sumberdaya mineral berharga yang terdeposit di Papua untuk kepentingan negaranya. Ini contoh kerugian besar bagi bangsa Indonesia, akibat dependensi terhadap bantuan luar negeri. Di sini terlihat jelas pula, bahwa teori dependensi ini tidak menguntungkan Indonesia.

Teori yang terakhir adalah teori sistem dunia. Dalam teori ini negara di dunia dibagi atas tiga bentuk negara, yaitu: negara

sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Teori ini mengasumsikan hubungan harmonis secara ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat, yang memberikan kesempatan kepada dua kelompok negara, yaitu semi pinggiran dan pinggiran untuk dapat merubah statusnya menjadi negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju semi pinggian ditentukan oleh keberhasilan negara-negara tersebut melaksanakan strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, dan strategi lainnya dalam proses pembangunannya. Sementara itu, upaya yang harus dilakukan oleh negara semi pinggiran untuk dapat menuju negara sentral, adalah memperluas pasar dengan memperkenalkan teknologi modern, dan mampu mempersaingkan produknya dari segi harga dan kualitas.

Indonesia termasuk dalam kategori mana? Secara umum, Indonesia masih berada dalam kategori negara pinggiran. Karena dari segi kegiatan produksi, hampir 90% bahan bakunya bergantung pada import. Dengan demikian, kemampuan untuk berperang dari segi harga dan kualitas dengan produk luar negeri masih sangat rendah. Pertumbuhan jumlah dan jenis industri yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan nasional, namun yang terjadi malah sebalilknya. Sektor industri yang tumbuh di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing yang mengoperasikan produksinya di Indonesia, dikarenakan ketersediaan bahan dasar (raw materials) yang siap diolah menjadi bahan baku oleh perusahaan mereka sendiri dan rendahnya upah tenga kerja lokal.

Indonesia belum mampu secara mandiri mengolah sumberdaya alamnya menjadi produk antara (*intermediate products*) dan bahkan produk barang jadi. Konsekuensinya, hampir semua kegiatan

produksi masih bergantung pada supply produk luar negeri. Walaupun demikian, dengan teori sistem dunia, Indonesia masih punya harapan untuk mendapatkan peluang lebih baik, yaitu mandiri di sektor bahan baku industri dan tidak hanya bertindak sebagai pasar bagi bertubi-tubinya produk asing datang ke dalam negeri ini. Dengan memperkuat kemampuan pengolahan sumberdaya alam yang ada, melaksanakan regulasi yang kondusif bagi usaha dalam negeri, maka peluang Indonesia dari yang berkategori negara pinggiran dapat bangkit menjadi negara semi pinggiran bahkan menjadi negara sentral yang maju dan berdaulat secara ekonomi.

Dari ketiga teori yang telah dibahas diatas, teori sistem dunia merupakan harapan Indonesia untuk memperoleh peluang mendapatkan posisi yang lebih baik untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula.

Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Upaya-upaya itu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat perdesaan. Namun, masih banyak wilayah perdesaan yang belum berkembang secepat wilayah lainnya.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82% wilayah Indonesia adalah perdesaan) dan sekitar 50% penduduk Indonesia masih tinggal di kawasan perdesaan.

Pembangunan perdesaan bersifat multidimensional dan multisektor. Oleh karena itu,diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dalam pelaksanaannya. Secara administratif, jumlah

desa yang ada di Indonesia terus bertambah. Pada tahun 2008 terdapat 67.245 desa dan hanya 7.893 kelurahan (BPS, 2008) dibandingkan pada tahun 2005 yaitu 61.409 desa dan 7.365 kelurahan (Statistik Potensi Desa-BPS 2005). Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dan akan terus dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Perlu disadari bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di wilayah perdesaan.

Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap yaitu melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya berupa peningkatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana perdesaan yang masih terbatas dan ditambah dengan masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pasar merupakan kendala bagi percepatan pembangunan perdesaan terutama untuk pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan, pengembangan sarana prasarana produksi hasil-hasil perdesaan serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia perdesaan.

Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis berperan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan yang berkaitan erat dengan terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah terbuka dan meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan, yang tercermin pada peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Pembangunan perdesaan diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi perdesaan, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan berperannya lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN.Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur

kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;
3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;
6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;
7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi;
8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; serta
9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan ini bertujuan untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien dan efektif.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip *good governance*;
2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;
3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri;
4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar

lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; serta
5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Program pengeloaan sumber daya manusia aparatur ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas kepemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS;
2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;
4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS;
5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; serta
6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin lainnya.
7. Penyederhanaan Birokrasi.
8. Peningkatan kompetensi teknologi

Pada era pandemi covid-19, pelaksanaan program program tersebut di atas sebagain besar terhambat, mengingat kebijakan

akan penganggaran hampir seluruh dinas sebagian besar dananya di arahkan kepada penangan covid-19. Pandemi koronavirus 2019-20 adalah pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung 2019 (COVID-19), yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah dimulai di Wuhan, provinsi Hubei, Cina, pada awal November 2019.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah itu sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Kepedulian Internasional pada 30 Januari 2020 dan mengakuinya sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada 9 April 2020, sekitar 1,48 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di 209 negara dan wilayah , mengakibatkan sekitar 88.500 kematian . Sekitar 329.000 orang telah pulih. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan oleh tetesan kecil yang dihasilkan ketika mereka terinfeksi batuk, bersin atau berbicaraTetesan ini juga dapat dihasilkan saat bernafas; Namun, mereka dengan cepat jatuh ke tanah atau permukaan dan umumnya tidak menyebar melalui udara jarak jauh . Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Coronavirus paling menular selama tiga hari pertama setelah timbulnya gejala, meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul dan pada tahap selanjutnya penyakit.

Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak napas. Komplikasi mungkin termasuk pneumonia dan sindrom gangguan pernapasan akut. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala biasanya sekitar lima hari, tetapi dapat berkisar dari dua hingga 14 hari. Tidak ada vaksin yang diketahui atau pengobatan antivirus khusus . Pengobatan primer adalah terapi simtomatik dan suportif.

Langkah - langkah pencegahan yang direkomendasikan termasuk mencuci tangan, menutup mulut seseorang ketika batuk,

menjaga jarak dari orang lain , dan pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai mereka terinfeksi. Pihak berwenang di seluruh dunia merespons dengan menerapkan pembatasan perjalanan, karantina, jam malam, pengendalian bahaya di tempat kerja , dan penutupan fasilitas serta adanya lockdown wilayah dari lingkungan terkecil, RT, RW, kompleks Kota/Kabupaten dan negara.

Pandemi telah menyebabkan gangguan sosial ekonomi global yang parah, penundaan atau pembatalan acara olahraga, agama, politik dan budaya, dan kekhawatiran yang meluas tentang kekurangan pasokan yang mengakibatkan pembelian panik. Sekolah dan universitas telah ditutup baik secara nasional atau lokal di 193 negara, mempengaruhi sekitar 99,4 persen populasi siswa dunia. Informasi yang salah tentang virus telah menyebar secara online, dan telah terjadi insiden xenophobia dan diskriminasi terhadap orang-orang China, orang lain dari keturunan dan penampilan Asia Timur dan Tenggara, dan lainnya dari daerah dengan kasus virus yang signifikan. Dampak lain berkurangnya perjalanan dan penutupan industri berat, telah terjadi penurunan polusi udara dan emisi karbon, yang telah memberikan efek menguntungkan bagi lingkungan.

Pencegahan yang diajalankan oleh setiap negara termasuk di Indonesia memiliki berbagai Strategi untuk mencegah penularan penyakit ini termasuk menjaga kebersihan pribadi yang baik secara keseluruhan, mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci, dan batuk atau bersin ke dalam jaringan dan menempatkan jaringan langsung ke wadah limbah. Mereka yang mungkin sudah terkena infeksi disarankan untuk memakai masker bedah di tempat umum. Tindakan jarak fisik juga disarankan untuk mencegah penularan.

Banyak pemerintah telah membatasi atau menyarankan agar semua perjalanan yang tidak penting ke dan dari negara dan daerah yang terkena dampak wabah. Namun, virus telah mencapai tahap penyebaran komunitas di sebagian besar dunia. Ini berarti bahwa virus menyebar di dalam komunitas, dan beberapa anggota komunitas tidak tahu di mana atau bagaimana mereka terinfeksi. Penyedia layanan kesehatan yang merawat seseorang yang mungkin terinfeksi disarankan untuk menggunakan tindakan pencegahan standar , tindakan pencegahan kontak, dan pelindung mata.

Pelacakan kontak adalah metode penting bagi otoritas kesehatan untuk menentukan sumber infeksi dan mencegah penularan lebih lanjut. Aplikasi pelacakan COVID-19 Eropa menggunakan Bluetooth untuk mencatat kedekatan pengguna dengan ponsel lain. Pengguna kemudian menerima pesan jika mereka telah melakukan kontak dekat dengan seseorang yang telah dites positif COVID-19.

Kesalahpahaman beredar tentang bagaimana mencegah infeksi; misalnya, berkumur dan berkumur dengan obat kumur tidak efektif. Tidak ada vaksin COVID-19 meskipun banyak organisasi bekerja untuk mengembangkannya.

Mencuci tangan

Cuci tangan dianjurkan untuk mencegah penyebaran penyakit. CDC merekomendasikan agar orang sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya dua puluh detik, terutama setelah pergi ke toilet atau ketika tangan terlihat kotor; sebelum makan; dan setelah meniup hidung, batuk, atau bersin. Ini karena di luar tubuh manusia, virus ini dibunuh oleh sabun rumah tangga, yang menyemburkan gelembung pelindungnya.

CDC lebih lanjut merekomendasikan penggunaan pembersih tangan berbasis alkohol dengan setidaknya 60% volume alkohol ketika sabun dan air tidak tersedia. WHO menyarankan orang untuk tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci.

Membersihkan permukaan. Permukaan dapat didekontaminasi dengan sejumlah larutan (dalam satu menit paparan desinfektan untuk permukaan stainless steel), termasuk 62-71% etanol , 50-100% isopropanol , 0,1% natrium hipoklorit , hidrogen peroksida 0,5%, dan hidrogen peroksida 0,5%, dan 0,2 –7,5% povidone-iodine . Solusi lain, seperti benzalkonium klorida dan chrohexidine gluconate , kurang efektif. CDC merekomendasikan bahwa jika kasus COVID dicurigai atau dikonfirmasi di fasilitas seperti kantor atau tempat penitipan anak, semua area seperti kantor, kamar mandi, area umum, peralatan elektronik bersama seperti tablet, layar sentuh, keyboard, remote control, dan ATM mesin yang digunakan oleh orang sakit, harus didesinfeksi.

Masker wajah dan kebersihan pernafasan. Organisasi kesehatan merekomendasikan agar orang menutupi mulut dan hidung mereka dengan siku tertekuk atau tisu ketika batuk atau bersin, dan segera membuang tisu apa pun. Masker bedah direkomendasikan bagi mereka yang mungkin terinfeksi, karena memakai topeng dapat membatasi volume dan jarak tempuh tetesan ekspirasi yang tersebar saat berbicara, bersin, dan batuk. WHO telah mengeluarkan instruksi kapan dan bagaimana cara menggunakan masker. Menurut Stephen Griffin, seorang ahli virus di University of Leeds , “Mengenakan topeng dapat mengurangi kecenderungan orang untuk menyentuh wajah mereka, yang merupakan sumber utama infeksi tanpa kebersihan tangan yang layak.” Masker juga telah direkomendasikan untuk digunakan

oleh mereka yang merawat seseorang yang mungkin menderita penyakit tersebut. WHO telah merekomendasikan penggunaan masker oleh orang sehat hanya jika mereka berisiko tinggi, seperti mereka yang merawat seseorang dengan COVID-19, meskipun mereka juga mengakui bahwa memakai masker dapat membantu orang menghindari menyentuh wajah mereka. . Beberapa negara telah mulai mendorong penggunaan masker wajah oleh anggota masyarakat.

Beberapa negara diantaranya Cina secara khusus merekomendasikan penggunaan masker medis sekali pakai oleh anggota masyarakat yang sehat, terutama ketika melakukan kontak dekat (1 meter (3 kaki) atau kurang) dengan orang lain. Hong Kong merekomendasikan untuk mengenakan masker bedah saat menggunakan transportasi umum atau tinggal di tempat yang ramai. Pejabat kesehatan Thailand mendorong orang untuk membuat sungkup kain di rumah dan mencucinya setiap hari. Republik Ceko dan Slovakia dilarang keluar di depan umum tanpa mengenakan topeng atau menutupi hidung dan mulut seseorang.

Pada tanggal 16 Maret, Vietnam meminta semua orang untuk mengenakan masker saat pergi ke tempat umum untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Pemerintah Austria mengamanatkan bahwa setiap orang yang memasuki toko kelontong harus mengenakan masker. Israel telah meminta semua penduduk untuk mengenakan masker saat berada di depan umum. Taiwan, yang telah memproduksi sepuluh juta masker per hari sejak pertengahan Maret, mengharuskan penumpang kereta api dan bus antar kota memakai masker wajah pada 1 April. Panama telah mewajibkan mengenakan masker wajah setiap kali pergi ke luar, sementara juga merekomendasikan pembuatan masker wajah buatan sendiri untuk mereka yang tidak dapat membeli masker

wajah. Masker wajah juga telah banyak digunakan di Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Menjauhkan social meruapakan strategi Jarak sosial (juga dikenal sebagai jarak fisik) termasuk tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran penyakit dengan meminimalkan kontak erat antara individu. Metode termasuk karantina; pembatasan perjalanan; dan penutupan sekolah, tempat kerja, stadion, teater, atau pusat perbelanjaan. Individu dapat menerapkan metode jarak sosial dengan tinggal di rumah, membatasi perjalanan, menghindari daerah ramai, menggunakan salam tanpa kontak, dan secara fisik menjauhkan diri dari orang lain.

Banyak pemerintah sekarang mengamanatkan atau merekomendasikan jarak sosial di daerah-daerah yang terkena dampak wabah.Ukuran pengumpulan maksimum yang direkomendasikan oleh badan pemerintah AS dan organisasi kesehatan berkurang dengan cepat dari 250 orang (jika tidak ada COVID-19 yang diketahui menyebar di suatu wilayah) menjadi 50 orang, dan kemudian menjadi 10 orang. Pada 22 Maret 2020, Jerman melarang pertemuan publik lebih dari dua orang. Orang dewasa yang lebih tua dan mereka yang memiliki kondisi medis mendasar seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit pernapasan, hipertensi , dan sistem kekebalan tubuh yang dikompromikan menghadapi peningkatan risiko penyakit serius dan komplikasi dan telah disarankan oleh CDC untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin di area masyarakat kejadian luar biasa.

Pada akhir Maret 2020, WHO dan badan kesehatan lainnya mulai mengganti penggunaan istilah “jarak sosial” dengan “jarak fisik”, untuk mengklarifikasi bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi kontak fisik dengan tetap menjaga hubungan sosial,

baik secara virtual maupun jarak. . Penggunaan istilah "jarak sosial" telah menyebabkan implikasi bahwa orang harus terlibat dalam isolasi sosial yang lengkap, daripada mendorong mereka untuk tetap berhubungan dengan orang lain melalui cara alternatif.

Beberapa pihak berwenang telah mengeluarkan pedoman kesehatan seksual untuk digunakan selama pandemi. Ini termasuk rekomendasi untuk hanya berhubungan seks dengan seseorang yang tinggal bersama Anda, yang tidak memiliki virus atau gejala virus.

Strategi lain yaitu Isolasi diri.Isolasi diri di rumah telah direkomendasikan untuk mereka yang didiagnosis dengan COVID-19 dan mereka yang mencurigai mereka telah terinfeksi. Badan-badan kesehatan telah mengeluarkan instruksi terperinci untuk isolasi diri yang tepat.

Banyak pemerintah telah mengamanatkan atau merekomendasikan karantina mandiri untuk seluruh populasi yang tinggal di daerah yang terkena dampak. Instruksi karantina mandiri terkuat telah diberikan kepada mereka yang berada dalam kelompok berisiko tinggi. Mereka yang mungkin telah terpapar pada seseorang dengan COVID-19 dan mereka yang baru-baru ini bepergian ke suatu negara atau wilayah dengan penularan luas telah disarankan untuk melakukan karantina sendiri selama 14 hari dari waktu paparan terakhir yang mungkin.

Pada akhirnya strategi Penahanan dan mitigas dijalankan beritujuan mitigasi masyarakat: (1) menunda puncak wabah; (2) mengurangi beban puncak pada perawatan kesehatan, yang dikenal sebagai "perataan kurva"; (3) mengurangi keseluruhan kasus dan dampak kesehatan

Strategi dalam pengendalian wabah adalah penahanan atau penindasan, dan mitigasi. Penahanan dilakukan pada tahap

awal wabah dan bertujuan untuk melacak dan mengisolasi mereka yang terinfeksi serta memperkenalkan langkah-langkah lain pengendalian infeksi dan vaksinasi untuk menghentikan penyebaran penyakit ke seluruh populasi. Ketika tidak mungkin lagi menahan penyebaran penyakit, upaya kemudian beralih ke tahap mitigasi: langkah-langkah diambil untuk memperlambat penyebaran dan mengurangi dampaknya pada sistem perawatan kesehatan dan masyarakat.

Kombinasi tindakan penahanan dan mitigasi dapat dilakukan pada saat yang sama. Penindasan membutuhkan tindakan yang lebih ekstrem untuk membalikkan pandemi dengan mengurangi jumlah reproduksi dasar menjadi kurang dari 1. Bagian dari pengelolaan wabah penyakit menular adalah berusaha untuk menurunkan puncak epidemi, yang dikenal sebagai meratakan kurva epidemi. Ini mengurangi risiko kewalahan layanan kesehatan dan menyediakan lebih banyak waktu untuk pengembangan vaksin dan perawatan. Intervensi non-farmasi yang dapat menangani wabah ini meliputi tindakan pencegahan pribadi, seperti kebersihan tangan, memakai masker wajah, dan karantina sendiri; langkah-langkah komunitas yang ditujukan untuk menjaga jarak fisik seperti menutup sekolah dan membatalkan acara pengumpulan massal; pelibatan masyarakat untuk mendorong penerimaan dan partisipasi dalam intervensi semacam itu; serta langkah-langkah lingkungan seperti pembersihan permukaan.

Pengalaman dan kebijakan lain di asal wabah berada yaitu dengan tindakan yang lebih drastis yang bertujuan mengatasi wabah itu diambil di Tiongkok begitu keparahan wabah itu menjadi jelas, seperti mengkarantina seluruh kota dan memberlakukan larangan perjalanan yang ketat. Negara-negara lain juga mengadopsi berbagai langkah yang bertujuan membatasi penyebaran virus.

Korea Selatan memperkenalkan penapisan masal dan karantina setempat, dan mengeluarkan peringatan tentang pergerakan orang yang terinfeksi. Singapura memberikan dukungan keuangan bagi mereka yang terinfeksi yang mengkarantina diri mereka sendiri dan mengenakan denda besar bagi mereka yang gagal melakukannya. Taiwan meningkatkan produksi masker wajah dan menghukum penimbunan pasokan medis.

Simulasi untuk Inggris Raya dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa mitigasi (memperlambat tetapi tidak menghentikan penyebaran epidemi) dan penindasan (membalikkan pertumbuhan epidemi) memiliki tantangan besar.

Kebijakan mitigasi yang optimal dapat mengurangi permintaan layanan kesehatan puncak sebesar 2/3 dan kematian hingga setengahnya, tetapi masih mengakibatkan ratusan ribu kematian dan sistem kesehatan kewalahan. Penindasan dapat lebih disukai tetapi perlu dipertahankan selama virus tersebut beredar di populasi manusia (atau sampai vaksin tersedia, jika itu yang lebih dulu), karena penularan sebaliknya cepat melambung ketika langkah-langkah santai. Intervensi jangka panjang untuk menekan pandemi menyebabkan biaya sosial dan ekonomi.

Konsep teori new ekonomi .Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.Selain pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu Negara terutama peran swasta yaitu dengan

investasi dan membuka lapangan kerja. Anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat output. Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sektor swasta. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swasta dapat bersifat substitusi atau komplementer. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan swasta jika investasi pemerintah bersaing dengan investasi swasta. Anggaran pemerintah dapat bersifat komplementer dengan sektor swasta apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun nonfisik. Hal ini akan meninggkatkan *Ekonomies Of Scale* melalui perluasan pasar yang selanjutnya akan meningkatkan keuntungan sektor swasta.Investasi pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, sehingga sektor swasta akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan diperoleh akan meningkat sejalan dengan peningkatan pada pemerintah pada permintaan terhadap barang akhir.Jika konsep ini dilaksanakan di Indonesia, maka dengan investasi dan perluasan pasar akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Kondisi ini dapat dilakukan pada saat Indonesia tidak mengalami Pandemi Covid-19, namun Indonesia menjalankan hal ini di masa pandemi dengan berbagi strategi dan dikombinasi dengan kebijakan yang bersinggungan dengan kebijakan kesehatan.

Bagaimana sebaiknya pembangunan dipedesaan dilakukan, ketimpangan pertumbuhan kota dan desa yang semakin mencolok, kota memiliki visi modern dan dinamis,sedangkan desa karakternya lamban dan tradisional. Melihat kondisi pandemi saat ini sudah saatnya Pemerintah melakukan upaya-upaya terhadap kebijakannya dalam membangun masyarakat desa di era

otonomi daerah. Pemerintah perlu juga menelaah strategi dalam menciptakan keserasian pembangunan antara desa dan kota sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi tingkat Kabupaten melalui kearifan lokal. Pembangunan masyarakat (pedesaan) memerlukan suatu proses dan model tranformasi dari model lama menuju model baru (tujuan). Di sisi lain perlu pula untuk dipahami bahwa proses pembangunan merupakan suatu konsep yang optimistik dan memberikan pengharapan kepada mereka yang secara sukarela berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penyamaan adanya implemntasi kearifan lokal diterapkan di masa pandemi dengan tidak membedakan lokasi pembangunan kota dan desa sehingga perencanaan pembangunan baik sosial maupun budaya selalu perlu menyadari dan menemukan indikasi-indikasi perubahan tuntutan, agar pembangunan wilayah pedesaan menjadi terarah dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa, maka perencanaan mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan mulai dari bawah. Proses pembangunan yang dilaksanakan merupakan wujud keinginan dari masyarakat desa akan pentinganya informasi melalui media teknology.

Dalam hal ini koordinasi antara pemerintah desa dengan jajaran di atasnya (Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Kabupaten) harus terus menerus dilakukan dan di mantapkan secara gradial (cepat,besar dan dasyat) karena ini yang membedakan proses pembangunan di desa apalagi pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan pembangunan pun hendaknya tidak hanya menjadikan desa sebagai obyek pembangunan tetapi sekaligus menjadikan desa subyek pembangunan yang mantap dan berteknology tinggi karena potensi sangat besar dengan kearipan budaya lokalnya.Hal ini yang pada saat pandemi pembangunan

desa tidak terlalu tergoncang secara sektoral karena memiliki potensi di atas. Selanjutnya ini bisa dijadikan pembelajaran bahwa adanya pandemi Covid-19 yang sangat menghebohkan kondisi pedesaan sebagian besar di Indonesia tidak terlalu banyak yang tergincang bahkan ada yang mendeklarasikan desa bebas Covid-19 ,hal ini menggambarkan pada negara bahkan dunia bahwa di wilayah Desa Indonesia ada yang tidak menngetahui bahkan tidak berdampak dari persoalan covid-19.

Dengan menyimak kondisi tersebut bahwa desa memiliki potensi sebagai obyek pembangunan, artinya obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi potensi manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologinya, serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan yang ada di pedesaan. Desa memotivasi menjadikan desa memiliki klasifikasi desa swasembada,yaitu suatu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat dalam kondisi pandemi.Masyarakat pedesaan sebagian besar berada di sektor pertanian, maka sasaran yang ingin dicapai adalah membantu pemenuhan kebutuhan pangan dengan mengacu pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan peningkatan ketrampilan pada sektor pertanian, pertukangan kayu, dan kesejahteraan keluarga serta informasi teknology yang dapat membantu pembangunan desa secara cepat. Boleh jadi pemahaman terhadap hal-hal yang sangat penting tidak tertangkap dengan cepat oleh desa karena kurannya informasi yang dijalankan birokrat tidak sampai atau tidak dipahami ,tentu hal ini perlu kajian lebih dalam pada masa pandemi ini. Peranan Birokrasi sangat penting untuk membawa dan mengoptimalkan kondisi desa secara keseluruhan dalam memahami dan memposisikan sebagai obyek pembangunan, apalagi dengan adanya Kampung

global sebagai strategi dalam meningkatkan potensi desa dalam pembangunan. Perkembangan pembanguan abad XXI harusnya menitikberatkan pada tiga aspek yaitu, pertumbuhan, pemerataan dan berkelanjutan. Pembangunan abad ke XXI atau pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen negara-negara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunana pada masa lalu yang hanya menekankan tujuan kemajuan ekonomi telah berdampak kepada kerusakan lingkungan dan timbulnya masalah sosial. Pendekatan pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah kegiatan pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun dalam implementasinya konsep ini belum dilaksanakan terlihat dari adanya masalah yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan haruslah bersifat multi dimensi sehingga dalam implementasinya harus merupakan program terpadu lintas sektor dan multi disiplin pada tingkat pusat dan atau daerah.

Dengan demikian pembangunan abad XXI harusnya lebih memperhatikan aspek lingkungan berkelanjutan disamping pertumbuhan dan pemerataan ekonomi karena jika kita tidak memperhatikan aspek lingkungan berkelanjutan dampaknya akan sangat berbahaya.Aspek lingkungan harus menjadi bagian utama yang tidak boleh dilupakan dalam proses pembangunan.
Perkembangan pembangunan Abad XXI yang dijadikan tren di berbagai negara salah satunya bila dihubungkan menekankan bahwa pentingnya suatu wujud desentralisasi kewenangan.

Ringkasan tentang dampak pemerintahan yang terdesentralisasi terhadap pelayanan umum untuk rakyat miskin di sembilan negara telah didokumentasikan oleh Robertson Work. Robertson Work melaporkan bahwa desentralisasi membawa

dampak berupa peningkatan layanan kesehatan (di Belo Horizonte, Brazil), peningkatan layanan perkotaan (di Sinuapa, Honduras; keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek di Jamunia Tank Gram Panchayat, India), peningkatan layanan pendidikan (di Ma'n dan Irbid, Jordan), perbaikan kualitas pemukiman (di Pakistan), peningkatan layanan kesehatan (di 3 (tiga) kota Pilipina), menggerakkan pembangunan ekonomi lokal (di 3 (tiga) kota Polis), peningkatan pendapatan rumah tangga (di Ivory Park, South Africa) serta peningkatan jasa-jasa pasar melalui kemitraan dengan sektor swasta (di Jinja, Uganda).

Desentralisasi bukan tujuan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis, dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara Pemerintah dan daerah otonom. Masalah yang muncul adalah bagaimana membentuk karakteristik penduduk yang ada di pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang kreatif dan berjiwa kewirausahaan yang memiliki berbagai keterampilan di berbagai bidang untuk membangun wilayahnya tersebut. Jawaban yang paling logis dan tepat dari masalah tersebut adalah pendidikan. Banyak penduduk pulau-pulau kecil terluar di Indonesia yang minim pendidikan seperti daerah pulau terluar di Maluku, banyak anak-anak sekolah yang hanya bermain dan tidak belajar karena tidak ada guru, sehingga dengan mutu pendidikan yang terbelakang dan tertinggal jauh itu, tentunya akan berdampak pembangunan di daerah itu pun akan terbelakang.

Jangankan untuk membangun wilayahnya, dengan pendidikan yang terbelakang tersebut mungkin untuk menyambung hidup pun akan sulit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang pemerintah seharusnya mulai membenahi sistem pendidikan di pulau-pulau kecil terluar Indonesia dengan membangun sejumlah institusi-institusi pendidikan yang mendukung terjadinya pembangunan dan mengirim sumber daya manusia yang berkualitas dari pemerintah pusat seperti tim pengajar atau tim ahli yang bertujuan untuk membekali penduduk tersebut dengan keterampilan yang diperlukan dalam membangun pulau-pulau kecil terluar di Indonesia.

Langkah lain selain pemahaman terhadap kondisi desa, menangani dan mencegah penularan Pandemi Covid -19, juga pemerintah Indonesia melakukan Pemulihan Ekonomi secara nasional dan interasional/global dengan membuat regulasi atau berbagai kebijakan dalam pembatasan kegiatan sektor-sektor esensial dan non esesnsial sehingga secara keseluruhan tidak terjadinya pencegahan stagnasi perekonomian nasional dan terjadi pula pemulihan pandemi Covid -19 secara bertahap.

Adaanya Dukungan masyarakat di Indenesia yang menerapkan kearifan lokal seperti Berbagi (*sharing*),gotong royong dan saling memberikan informasi bahkan berbagi penegtahuan di masyarakat baik secara formal maupun non formal melalui berbagai media sosial Fb.Ig Tv dan media cetak sangat mendukung proses berjalannya penanganan pandemi covid-19 pemulihan ekonomi secara sektoral dan nasional sehingga di masa pandemi Indonesia masih tetap berjalan dan bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Partisapasi, kejsa sama dan berbagi (*sharing*) serta gotong royong secara langsung maupun melalui media dari masyarakat Indonesia dengan Pemerintah sebuah

kolaborasi merupakan modal pembangunan yang dijalankan masyarakat Indonesia dengan negara agar mampu bertahan (adaftif), efektif serta tetap melakukan sebuah perubahan secara bertahan di era pandemi. karakteristik budaya *sharing* sama-sama rukun, Iklim berupa dukungan, dan pemberdayaan sumber daya memiliki nilai korelasi tertinggi terhadap proses partisipasi dengan motivasi pencapaian tinggi sedangkan karakteristik budaya organisasi *sharing* sama-sama semangat juang, iklim konflik, dan pemberdayaan kesempatan memiliki nilai terendah terhadap bentuk motivasi partisipasi.Mulyaningsih, ISCoGI 2017, sebagai hasil penelitian di desa dengan judul Transformasi Karakteristik Budaya Organisasi *Sharing*, Iklim Organisasi, Dan Pemberdayaan Terhadap Motivasi Dalam Mewujudkan Partisipasi Masyarakat Pada Organisasi (Studi Kasus Desa Ciapus Kecamatan Banjaran.

C. Periode Model Komunikasi Digital Birokrat Masa Pandemi

Peranan penting aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan ialah bahwa pemerintah sebagai penentu dan pelaksana administrasi pembangunan, secara khusus di Indonesia. pemerintah merupakan pengemudi , bukan pengayuh kapal. Artinya pemerintah dianggap sebagai penentu arah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan, sedangkan rakyat menjadi penggeraknya.Pemerintah wajib mengarahkan, membimbing dan saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Namun dalam hal administrasi pembangunan, aparatur pemerintah memegang kendali dalam mengarahkan

pelaksanaannya. Peran aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan sesuai dengan falsafah kepemimpinan dan manajemen bangsa Indonesia, yaitu *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso,* dan *tut wuri Handayani.* Tugas penting aparatur pemerintah adalah mendorong setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat membangun. Selain itu, pemerintah harus mengupayakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat, tidak hanya memberi kemakmuran pada beberapa pihak saja. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan optimal. Pembangunan optimal dilakukan melalui perbaikan aparatur dan pelaksanaan dari pemerintah.

Pertama perlu diberikan penjelasan terhadap adanya kesalah fahaman umum bahwa birokrasi itu jelek yaitu birokrasi itu diartikan jika seseorang ingin mendapatkan informasi tertentu dikirim dari pejabat satu kepada pejabat yang lain tanpa mendapatkan informasi yang diinginkan.

Demikian pula keharusan pengisian formulir-formulir, sehingga birokrasi malahan dihubungkan dengan kemacetan-kemacetan administrasi atau tidak adanya efesiensi. Pada hal pengertian birokrasi yanmg sebenarnya bukan itu.

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang.

Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya menurut " Weber " sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi di dalam cara yang tertentu

sebagai tugas-tugas jabatan.

2. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarkhi, yaitu jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari pada jabatan yang lebih atas.
3. Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu.
4. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat " formalistic impersonality" (formil non pribadi), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati.
5. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kwalifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.
6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity)* dan perubahan *(change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro, 1996:7).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan negara terpadat keempat di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 1.919.440 km2 dengan dua pertiga wilayahnya berupa perairan, Indonesia mempunyai lebih dari 17.508 pulau dan setiap pulau memiliki

potensi yang berbeda-beda dan belum dioptimalkan seutuhnya oleh masyarakat Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6oLU-11oLS dan antara 95o BT-141oBT. Akibatnya Indonesia berada di posisi silang yang strategis. Berada di Asia Tenggara yang diimpit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu samudera Hindia dan samudera Pasifik, yang mana secara ekonomi Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional yang sering dilalui oleh negara-negara di dunia.

Pembangunan yang Berkesinambungan Dalam Artian Tidak Terjadi Kerusakan Sosial. Pembangunan yang berkesinambungan dalam artian tidak terjadi kerusakan sosial merupakan suatu konsep pembangunan yang menghubungkan manusia yang ada di dalamnya karena yang melakukan pembangunan adalah manusia. Pembangunan merupakan hal yang penting untuk negara berkembang seperti Indonesia untuk berubah ke dalam kondisi yang lebih baik lagi. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di posisi silang dunia yang strategis dengan sumber daya alamnya yang kaya, pengembangan terhadap pulau-pulau kecil terluar di Indonesia sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pulau-pulau kecil terluar di Indonesia merupakan wilayah terdepan dalam menjaga kedaulatan Indonesia yang seharusnya menjadi gambaran atau identitas Indonesia terhadap negara-negara dunia. Karena tidak hanya dibutuhkan kekuatan militer untuk menjaga pulau-pulau tersebut, tetapi dibutuhkan kepedulian yang tinggi sebagai rakyat Indonesia untuk peduli dan sadar bahwa ada nilai strategis dan potensi yang besar dari pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Potensi-potensi besar yang ada di dalam pulau-pulau tersebut harus dioptimalkan oleh masyarakat Indonesia sebagai syarat untuk menciptakan pembangunan yang berhasil

yang berkesinambungan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sumber daya manusia yang berkualitas dan kelestarian lingkungan.

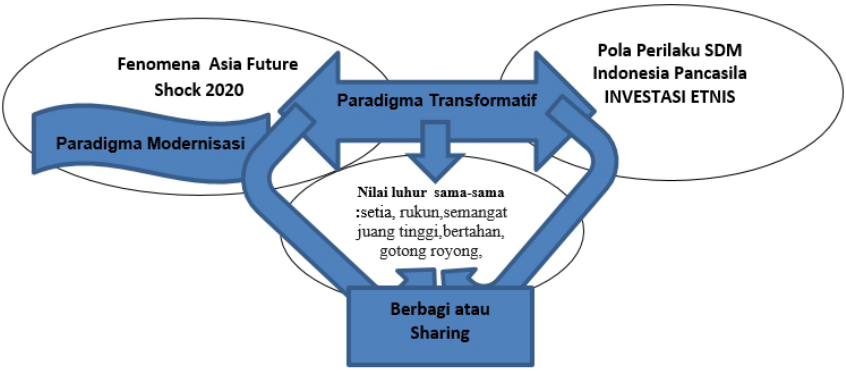
Secara sosiologis kondisi pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan. Perilaku masyarakat masih ada yang belum memahami pencegahan virus covid-19 dengan tidak taat prokes, menghindari untuk di vaksin, sikap menutup diri masyarakat yang terdampak pandemi serta masyarakat yang menjauh oleh karena kekhawatiran terkena wabah serta masih banyak persoalan lain dimana masyarakat sesungguhnya membutuhkan informasi melalui media komunikasi dari pelayanan publik pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dengan standar yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Strategi media komunikasi birokrasi pemerintahan dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik harus berkorelasi dengan emphati, partisipasi, motivasi berprestasi tinggi, budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia.

Sektor budaya yang terjalin dan berkembang hasil dari kolaborasi filosifis Pancasila, budaya local dan pelayanan publikyang dilakukan birokrasi yang berbasis pada karakteristik budaya local akan mampu menjadi pendokrak pola pikir dan bertindak serta bersikap yang baik dan benar serta professional

melalui sikap. Hal ini yang mendorong adanya upaya untuk meluruskan kembali nilai-nilai budaya organisasi yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk *Sharing* atau berbagi sebagai hasil dari pelurusan (*Rebounding*) yang masih dianut saat ini sebagai kolaborasi pemahan budaya local yang diterima di lingkungan internal dengan budaya yang diterima dari eksternal sebagai bagian dampak dari globalisasi yang kurang mendukung akan karanteristik budaya organisasi di Indonesia.

Dibawah ini adalah gambaran bagaimana hasil rekontruksi dari hasil penelitian budaya organisasi dan kajian dari pemikiran fundamental bangsa Indonesia dalam Pancasila dengan literatur investasi bisnis sebagai nilai fundamental dalam bisnis di belahan Eropa yang kemudian ditransformasikan ke dalam budaya budaya lokal Bangsa Indonesia berupa *Sharing* atau berbagi sebagai landasan berprilaku bangsa Indonesia dalam menghadapi Asian Future Shock di tahun 2010.

Kondisi Masyarakat Indonesia yang tidak mudah lagi untuk bersaing di abad 21 secara regional dan internasional perlu pendokrak dan didukung dengan dongkrak yang kuat serta apabila tidak ada transformasi nilai yang sudah sesuai dengan perubahan era globalisasi saat ini sehingga manakala tidak adanya penyesuaiain nilai-nilai yang pundamental sebagai akar berpikir dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia dengan nilai-nilai baru yang adopsi dari adanya pengaruh perubahan akibat globalilasi. Kondisi ini mengharuskan adanya pelurusan kembali (*rebounding*) karakteristik budaya organisasi "berbagi" atau *sharing* yaitu sebagai berikut;



Gambar 1.2
Model *Sharing* (Berbagi) 2017
Dari Rekontruksi Dan *Rebounding*
Karakteristik Budaya Organisasi "*Sharing*" Perilaku SDM di Indonesia

Pandemi virus corona atau COVID-19 merupakan pandemi yang dapat dikendalikan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian yang cepat dan tepat.Setiap negara harus mencapai keseimbangan antara melindungi kesehatan, mencegah gangguan ekonomi dan sosial, dan menghormati hak asasi manusia adalah berinovasi dan berimprovisasi. Virus bernama resmi SARS CoV 2 ini merupakan virus baru dengan kondisi yang baru. Dia meminta agar seluruh negara mempelajari virus ini, dan menemukan cara baru untuk mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa, dan meminimalkan dampak Hal ini ditegaskan oleh WHO Sebut COVID-19 Pandemi Yang Dapat Dikendalikan;Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jakarta, jurnalsumatra.com 10:03 2020/03/14 AM jurnal tiga .

Pada era pandemi semua dihadapkan pada kondisi ketidakpastian di berbagai bidang sebagai bagian dari dampak Covid 19 yang membuat masyarakat terganggu secara pihisik dan phisis berkelanjutan setelah mengalami dan sedang revolusi industri 4.0. Dampak dari kejadian yang berlanjutan dari revolusi industri 4.0 dan pandemi covid -19 masyarakat merasa terpuruk baik secara ekonomi,kesehatan bahkan pendidikan sebagai bagian sendi kehidupan dan kemajuan sebuah bangsa.

Perlu sebuah upaya tentang bagaimana meramu, menkolaborasi budaya organisasi yang berwawasan kearifan lokal dengan hal-hal baru sehingga dapat dijadikan sebuah pedoman berperilaku dan berproduksi dalam menghadapi persaingan hidup berbangsa dan bernegara.Dampak negatif globalisasi antara lain; informasi yang tidak tersaring, membuat tidak kreatif, karna perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, banyak meniru perilaku yang buruk serta mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara.Posisi serta jati diri yang membentuk kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dari dulu kala menjadi indikator dalam memilah dan memilih mana yang bisa dipakai bahkan sikap saling memberi (*Sharing*) atau berbagi merupakan sebuah kewajiban,esensi pemikiran masyarakat desa yang masih alami di Indonesia inilah kepribadian bangsa Indonesia yang dulu menjadi ciri khas bangsa ini yang cantik dengan adat ketimuran jika naluri ini digabungkan secara seimbang dengan pengetahuan, maka akan jadi wujud kepribadian. Mulyaningsih (2016)

Pandemi covid - !9 terjadi dibelahan dunia mengakibatkan ceos diberbagi bidang selain, sosial, pendidikan, ekonomi,budaya sehingga masyarakat mengalami berbagai masalah cukup lama dan berujung keterpurukan. Selain masyarakat organisasi pun

demikian mengalami berbagai kemunduransecara materi maupun materiil yang berkepanjangan walaupun covid 19 berjalan cukup singkat namun mampu memporakrankaan dunia.

Dampak covid -19 telah mengendurnya daya saing, kehidupan dan abruknya budaya organisasi institusi swasta maupun publik. Seringkali pemimpin kolaborasi tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, karena ketidak tahuan akan skill yang harus mereka kuasai,atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kemungkinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda denngan kepemimpinan pada organisasi secara umum.Arrozaq. Kearifan lokal mampu menjembatanani bagaimana kembalinya kehidupan bermasyarakat instansi negeri maupun publik yang sudah mengakar lama dan menjadi filosofis bangsa Indonesia dan suau negara. Budaya Organisasi berbasis *silih asah silih asih,silih asuh,sareundeuk saigeul sabobot sapihanean* dari filosofis di tataran sunda menjadi alat bagi birokrasi untuk menjadi sebuah tools untuk dapat di ramu dan dikolaborasikan dengan teknologi sehingga mampu mendongkrak akan terpurukan SDM yang berdaya saing Indonesia mampu tetap adaftif dalam berbagai bidang dan berdaya saing sebagai manusia yang unggul.

Model dan konsep dari karakteristi Budaya *sharing* atau berbagi (mulyaningsih) untuk diramu dan dikolaborasi dapat dijadikan sebuah andalan birokrasi dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintahan yang berkenaan dengan kemampuan lokal,sedikit konplik sangat mendukung SDM mampu menjadi SDM yang unggul dalam menghadapai kondisi revolusi industri 4,0 di era pandemi untuk tetap adaftif, efesien dan bangkit dari sebuah masalah pandemi covid -19 sehingga mampu membuat peradaban baru yang mampu mensejahterakan masyarakat.

secara epistimologi,kata kolaborasi berasal dari bahasa

inggis yaitu *co-labour* yang artinya bekerjasama.pada abad ke 19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industriaisasi mulai berkembang. Organisasi pada masa itu menjadi semakin komplek divisi-divisi dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi menjadi titik awal sering digunakannya kolaborasi dalam berbagai organisasi (Wanna,2008:3) secara filosofis,kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama

Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman,(2010:18) kolabortasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama.Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu mmaupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama. Ilmuwan lain mendefinisikan kolabaorasi sebagai instrumen yang digunakan untuk menyatukan berbagai perbedaan sudut pandang demi terciptanya solusi bersama.Menurut Fendt (2010;22) ada tiga alasan mengapa organisasi melakukan kolaborasi,yaitu

1) organisasi perlu berkolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain
2) Dengan berkolaborasi,keuntungan yang akan diperoleh organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri.
3) dengan berkolaborasi,organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi murah dan memiliki daya saing pasar

Bagi pemerintah saat ini banyak di terapkan bentuk *Collaborative governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi

suatu masalah. *Collabarative Governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonformtasi dengan masalah,sebab *Collaborate Governance* menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah tersebut.berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat sesuatu permasalahan bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepahaman diantara peran aktor tersebut. *Colllaborate Governance* berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepahaman yang sama terhadap suatu masalah (Ansel,2014:172)dengan proses yang tepat dari Emerson,Nabatchi dan Balogh 2012, karena melihat komponen yang komprehensip dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses *collaborative atau Collaborative Governance Regime* (CGR) menjelaskan secara rinci bagaiman proses collollaborate yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan tindakan dan dampak sementara,sebelum mengarah pada dampak utama,serta adaftasi terhadap dampak sementara.Untuk kolaborasi yang lebih besar,lebih kompleks ,dan berdurasi panjang,maka struktur insitusi kolaborasi harus jelas,dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajmen kegiatan kolaborasi diperlukan (Milward dan Propan dalam Emerson, dsb 2012)sedangkan kesepakatan institusi (institusional aragements) terdapat pada intra (organisasi) bagaimana aktor melakukan *Governing* dan manajemen organisasinya sendiri.

Dengan CGR sangat membutuhkan SDM yang unggul sebagai seorang pemimin. Kepemimpinan (leadreship) kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selaba proses kolaborasi adalah

1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi
2) penginisiasi pertemuan.
3) pasilitator dan mediator

4) representasi dari aktor,dan kolaborasi secara keseluruhan
5) pendistributor pengetahuan
6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi
7) melakukan advokasi pada publik.

Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konplik,dan bagaiman meningkatlkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolabaorasi berlangsung). Disamping peranan juga pemimpin harus memiliki pengetahuan dengan perkembangan oleh sebab itu manajmen pengetahuan merupakan landasan pimpinan berpikir untuk bertindak.

e. Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan merupakan fondasi bagi pembelajaran dalam organisasi. Manajemen pengetahuan dipandang sebagai keseluruhan aktivitas organisasi yang memfokuskan pada beberapa karakteristik yang menentukan pembelajaran dalam organisasi. (Sedarmayanti 2020)

Manusia sebagai titik sental mampu menjadi sebuah inovasi bagaimana menjadi manusia yang unggul sebagai modal SDM berkarakter, beradab dan berbudaya, berkualitas dan berkarakter sesuai jati diri Pancasila, lebih pandai, lebih baik, lebih cakap, lebih terampil, lebih beretika (unggul) memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk berprestasi dan bereputasi yang diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian peran manajemen pengetahuan ,yaitu :

1. Berperan mengelola pengetahuan, mengkonsentrasikan diri dalam kodifiasi pengetahuan dan menempatkan dalam reposisi pengetahuan yang dapat diakses karyawan sesuai

otoritasnya.

2. Diarahkan untuk mempertemukan antara orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang membutuhkan pengetahuan dengan identifikasi sesuai kebutuhannya.
3. Mengkombinasikan antara pilihan pertama dan kedua, menumbuhkan sumber daya lebih besar, jika sumber daya tidak cukup, maka pengelolaan pengetahuan bisa menjadi stagnan dan tidak fokus.

Aset pengetahuan perlu dikelola baik dan manajemen pengetahuan mengelola pengetahuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Organisasi perlu memberi muatan pengetahuan pada setiap unit kerja/fungsi kerja dalam organisasi dengan melihat alur Input- Proses – Output (I-P-O). Organisasi dengan langkah ini akan mempunyai peta potensi pengetahuan yang dimiliki secara strategis. Peran pimpinan dalam organisasi saat ini sudah sangat berubah. Posisi pimpinan dalam organisasi yang berbasis pengetahuan harus mengubah peranannya.Pimpinan dalam organisasi yang berbasis pengetahuan harus mengubah peranannya :

1. Bertindak sebagai pelatih
2. Menyediakan informasi dan mendorong penciptaan pengetahuan
3. Menyediakan sumber daya untuk menunjukkan komitmennya
4. Mengambil bagian dari pembelajaran organisasi
5. Membuang kultur yang menyalahkan
6. Menghargai dan mengakui usaha bawahan/ staff
7. Memfasilitasi individu dan tim untuk berkembang
8. Penyebaran visi dan melibatkan karyawan dalam formulasi strategi

9. Mendengarkan berbagai kemungkinan. (Kermally, 2002) dalam sedarmayanty 2020

Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer membantu dan memperkaiki kualitas individu dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya, merancang melakukan perubahan dalam organisasi. *Knowledge* sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk *tacit knowledge*, bukan di sistem informasi canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat kepada manusia, dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan.

Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge *sharing*/ knowledge transfer, karena melalui knowledge *sharing*, terjadi peningkatan value dari knowledge dimiliki perusahaan.

Seseorang yang melakukan knowledge *sharing* tidak akan habis knowledge yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari knowledge bila sudah dimiliki, dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya *sharing* merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Budaya *sharing* pengetahuan merupakan bagian dari budaya organisasi, dan inti dari budayamanajemen pengetahuan. Untuk suksesnya pembentukan budaya *sharing* sebagai inti dari manajemen pengetahuan, organisasi harus memenuhi berbagai persyaratan organisasional:

1. Peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi,

keterlibatan langsung, pemberian dukungan dan advokasi.

2. Budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan.
3. Adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge *sharing* dan kolaborasi.
4. Perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi.
5. Kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. (Tobing, 2007)

Peranan budaya *sharing* hubungannya dalam organisasi sangat strategis dalam menundukung kinerja oeganisasi terlihat dalam gambar sebagai berikuit ;



Sedarmayanti 2020

Meramu kearifan lokal dengan mengkolaborasi lingkungan (lingkungan bisnis, teknologi dan politik) akan menghasilkan budaya organisasi *sharing* yang dalam budaya yang berwawasan kearifan lokal yaitu lokal wisdom dari filosofis lokal,palsafah negara dan eksternal berbasis etnis yaitu budaya organisasi *sharing*

yang diambil dari filisofis sundanis silih asah silih asih silih asuh dengan silih simbeuh dan harus sareundeuk saigeul sabobot sapihanean dengan tidak dengan kondisi dampak cociv-19 yaitu dan teknologi informasi (internet) semua program diinfokan ke dalam media,, perlu kontrol dalam hal kebijakan yang relevan dengan kondisi dan jati diri bangsa

Pengetahuan *(knowledge)* merupakan mata uang atau dari kolaborasi. Pengetahuan adalah apa saja yang dibutuhkan dan berusaha untuk disediakan.menurut Groff and Jones (dalam emerson, Nabit dll2012:16) menjelaskan pengetahuan sebagai berikut; Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memeahami informasi itu dan menambah kapabilitas. pengetahuan membawa pada tindakan,namun pen getahuan juga dapat menginformasi atau membingungkan.yang lebih penting adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para aktor memanfaatkannya,sehingga berguna bagi proses kolaborasi sehingga Sumber daya Manusia dalam organisasi dapat melakukan berbagai inovasi.inovasi dan manajemen pengetahuan untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dengan sebuah pemikiran tentang perkembangan ilmu manajemen pengetahuan yang merupakan sebuah inovasi berfokus kepada kreatifitas manusia. Penyakit COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan.Infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau

bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia. Adanya berbagai strategi dan perjalanan covid-19 di berbagai negara dalam hal pengananan, pencegahan dan upayan mempersiapkan antisipasi mutasi virus covid-19 telah banyak melahirkan berbagai kebijakan, pendanaan bahkan tertunda serta murat marit administrasi pembangunan termasuk di Indonesia, mengngat covid -19 bukan lagi masalah salah satu negara atau Indonesia saja tapi sudah merubah wajah dunia.

Perubahan wajah dunia diantaranya tidak sedikit negara yang maju menjadi mundur bahkan terdapat negara-negara yang sudah tidak sanggup membiayai penyelesaian covid-19 bahkan mengancam terhadap keberadaan negara tersebut. Dampak dari kondisi pandemi banyak negara yang tidak sanggup unutk menjalankan pembangunan sehingga lambat laun telah menghancurkan perekonomian,kemunduran mental dan meningkatnya kejahatan .

Pandemi merupakan sebuah situasi yang banyak menimbulkan masalah bahkan banyak negara-negara di dunia bahkan di Indonesia menyatakan perang terhadap pandemi. Tidak sedikit negara negara yang tidak mampu menangani menurun dan pencegahan penularan pandemi virus Covid 19 telah mengalami kemiskinan bahkan kebangkrutan diantaranya beberapa negara

di Sfrika bahkan ada yang di Eropa. Ameraka Serikatpun banyak mengalami peningkatan Pengangguran di masa Pandemi.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan di Indonesia untuk mengatasi dampak dari Pandemi yang memiliki kurun waktu hampir 2 tahun mungkin lebih tidak terlepas dari dampak pendemi global, namun di Indonesua telah dilakukan berbagai kebijakan dengan sebagian besar dana dinas-dinas sebagain besar dialihkan kepada pembiayaan dampak pandemi COVID-19 secara bersama-sama dengan masyarakat melakukan penagnganan baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan kegiatan *Sharing* (berbagi) di berbagai sektor dan berbagai komunitas dalam hal yang mendukung dalam proses karantina mandiri dari unut terkecil keluarga, Rukun tetangga,dan Rukun warga serta kompleks atau lingkungan tertentu dari organisasi saling bahu mebahau mengatasi , menahan dan membantu pemulihan dari karantina Mandiri dengan berbagai makanan (menyediakan untuk yang sedang Isoman baik sendiri maupun keluaraga), memebantu pemebrian amsker bahakan alat kesehatan gratis pada komunitas dan masyarakat sangat dianjurkan oleh tokoh masyarakat, masyarakat dan pemerintah. Pemahaman terhadap sebuah persialan seperti Pandemi Covod-19 di era digital harus memiliki kemampuan dalam memahami pihak yang akan di baca, diajak bekerja sama dalam menagnai penaggulangannya.

Pihak yang ada pada saat kondisi pandemi ,yaitu pada umumnya masyarakat melinial sehingga perlu strategi yang dapat masuk untuk mengiusi dan menyampaikan kepada masyarakat melinial. Salah satu kajian yan telah dilakukan yaiut mengkolaborasikan bebrapa konsep kearifan lokal, kondisi dan konsep melinial yang harus di paham dan dilaksananakan oleh birokrat dalam menjalankan tugasnya. big data dengan tepat sesuai

dengan konten Undang-undang,falsafah RI, NKRI dan karakter bangsa Indonesia yang berbasis local wisdom atau kearipan lokal sehingga adanya penyimpangan sosial,budaya dapat terditeksi lebih awal preventif dan dapat dilakukan recovery terhadap perilaku, budaya yang merugikan dalam ranah konplik.

Perilaku birokrasin pada saat ini lebih menekankan dalam gaya komunikasi sebgai sebuah alat.yang mampu menjangkau berbagai kalangan etis agama dalam bidang sosial politik ekonomi budaya di masyarakata. Pola komunikasi birokrasi di revolusi 4.0 di warnai dengan teknologi dan informasi sebagai sebuah kompetemsi birokrat yang mampu dapat menjabarkan berbgai kebijakan program-program dan mengatasi permasalahan baik di linhkungan pemerintahan maupun masyarakat secara transparam melalui media sosial facebook, instagram, tv, yang mudah di akses oleh seluruh masyarakat dengan menguta,akan kearifan lokal sebagai bagian budaya yang mewarnai perilaku birokrat dalam model pola komunikasi.Pola perilaku Komunikasi birokrat yang meliputi lingkungan, ekonomi,lingkungan sosial,lingkungan politik dan lingkungan hukum sudah menjadi dasar program kebijakan karakteristik budaya organisasi *sharing* di era digital harus disampaikan kepada masyarakat luas penggunakan internet di Indonesia sebanyak : (data pengguna internet di Indonesia)

Tabel 1
Digital Aroun The Word-Indonesia
Jan 2019

		Dunia	Indonesia	Dunia	Indonesia	Dunia		Indonesia				
		Jan 2019		Anual Digital Grount ajan 2108-2019 Fb		Pengguna (Milion)				profil		
						youtube		Iq				
1	Total populasi	7 676 (Billion)	2.628 M	1,1%	1%							
	internet	4.388	150 M	9,1%	13%	2.271	81%	1.900	88%	1.000	80%	
	Aktiv sosial media	3.484	150M	9,0%	15%							
2	Profil audien paling tinggi											35-44 th
3	Indonesia											25-33 th (14%-19%)
Sumber :we are social,Hootsuite 2019												

Berdasarkan data di atas bahwa prngguna media sosai di Indonesia termasuk yang tertinggi di dominasi oleh comunity antara usia 35-44 tahun yang dianggap paham akan implemntasi atas program dan kebijakan pemerintah yang disamapaikan birokrat melaui penggunaan media sosial youtube,fb dan instagram. Dari di atas tentu bukan mudah bagi pemangku kebijakan untuk menyampaikan persoalan, program penangann dari pandemi Covid-19, selain bermaslaah dengan pandemi juga berhadapan dengan kaum melainian dan era digital.Hal ini terlihat dari pengguna instegram di Indonesia terhadap komunikasi yang disampaikan oleh beberapa kepala daerah atau birokrat di Indonesia khususnya di pulau jawa sebagai berikut lihat tabel 2 tentag jumlah pengikut instragram. dan terakses di Jawa barat utnuk Ridwan kamil kepala darah Jawa Barat

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENGIKUT		
			2019	2018	Naik
1	Ridwan Kamil	Gubernur Jawa Barat	12,1 JT	7,6 JT	
2	Anies Baswedan	Gubernur Jakarta	4,3 JT	1,6 JT	
3	Ganjar Pranowo	Gubernur Jawa Tengah	2,4 JT	-	
4	Khofifah Indar Parawansa	Gubernur Jawa Timur	701 RB		
5	Wahidin Halim	Gubernur Banten	47,5 RB		

Sumbner : : Instagram

Tabel 2 Jumlah pengikut instagram kepala daerah pulau jawa per tanggal 24 april 2020

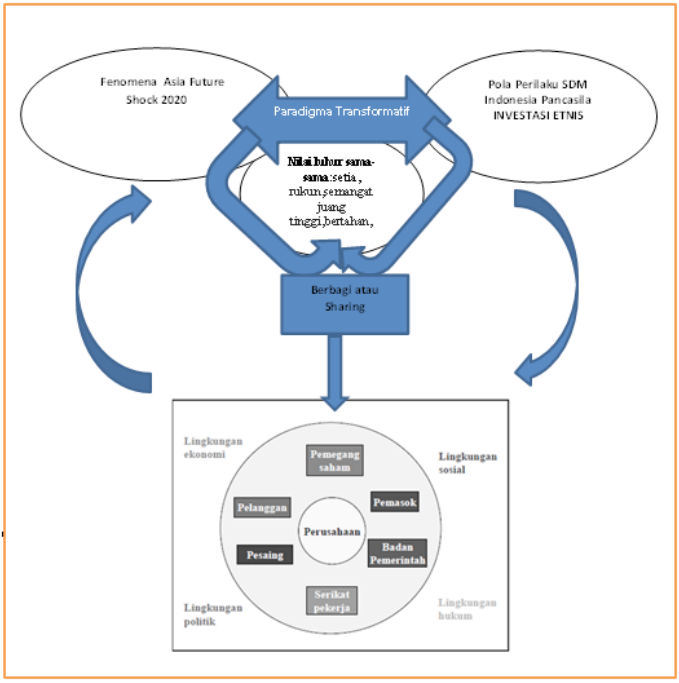
meningkat pengguna instagram dari tahun 2018 ke Tahun 2019 sebanyak 4,5 juta,dan Anes Bawesda (jakart) meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebanyak1,7 juta sedangkan yang sebelum tahun 2018 tidak terlihat semenjak jadi kepala daerah tahun 2019 Ganjar pranoto (jawa Tengah menduduki peringkat ke 3 dengan pengikut sebanyak 2,4 juta yang selanjutnya diikuti 0leh kepala daerah lainnya di tahun april 2020)Kondisi diatas sudah tentu diikuti oleh minimal pengikut pengguna media sosial yang produktif di atas usia 25 tahun sampai dengan 34 tahun (tabel 1) memperlihatkan bahwa pengikut media sosial adalah termasuk penduduk produktif yang mampu mengikitu,merespon trasformasi program,kebijakan yang disampaikan produktif.

Dengan demikian secara ekonomi cukup mapan sehingga mereka untuk mengikuti kondisi tersebut diasanya dilakukan di temapt tempat yang cukup populer di Mall/cafe yang memiliki WIFI sehingga mudah untuk mengakses. Tempat yang popluler yang biasa ditemui dan ditempati untuk membicarakan hal-hal tersebut dengan santai dan tidak membedakan perbedaan di jawa khususnya yaitu dengan budaya *ngopi* https://www.kompasiana.com/image/faiznur/5a170f9f63b24869b5256722/ngopi-budaya-yang-mengandung-banyak-makna.

Berdasarkan gambaran di atas maka perkembangan model komunikasi yang dijalankan para pejabat/agen kebijakan dalam satu wilayah telah menggunakan media sosial sebagai salah satu yang dijalankan untuk dapat mennyamapaikan berbagai program dan kebijakannya kepada masyarakat saat ini termasuk pada masa pandemi, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia sudah di dominasi oleh kaum melinial yang menggunaka media sosial sebagai literasi mereka. Demikian pula dengan model komunikasi yang dipergunakan harus dapat menjakau kaum melinial. Kaum

melinial dalam model komunikasi birokrasi di masa digital sampai dengan pama pandemi disebut CoI.

Model CoI ini terbentuk dapat dari kolaborasi: lingkungan, paradigma karakteristik organisasi *sharing* dan bentuk dari trasformasi perilaku karakteritik budaya organisasi *sharing* yang terbentuk dari kearifan lokal terlihat dalam gambar sebagai berikut:



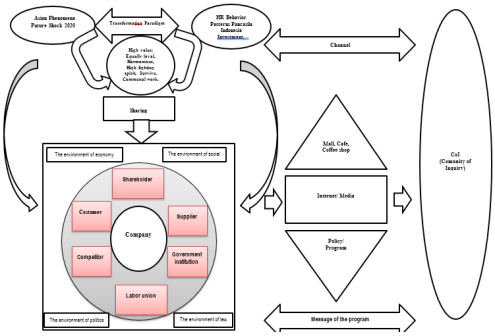
Gambar 2
Model COI dengan kontribusi dari karakteristik budaya organisasi institusi
Cultural Openness as Fundamental in Era Industrial Revolution 4.0
Mulyaningsih https://ssbrj.org/index.php/rbaos/article/view/71

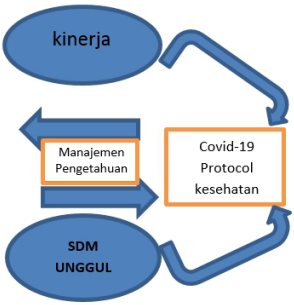
Model di atas merupakan bangunan sebagai model *Community of Inquiry* (CoI) dengan kombinasi dari karakteristik budaya organisasi *sharing* dengan lingkungan institusi yang mencakup lingkungan politik,ekonomi,sosial dan hukum yang mampu mengkontrol dan mengrecavery ketimpangan sosial budaya yang diakibatkan oleh globalisasi di era digital.Dengan demikian bentuk model ngopi silih simbeuh atau Ngopi Si2Mlibeuh merupakan komunikasi birokrasi yang berbasis kearifan lokal yang dapat dijalankan di era digital.,

Dengan inovasi dari kekuatan yang melekat pada dirinya untuk menciptakan nilai perusahaan melalui pengetahuan pribadi menjadi pengetahuan publik dan pengetahuan yang tersembuanyi menjadi pengetahuan eksplisit nampak (SDM yang Unggul) Perilaku birokrasin pada saat ini lebih menekankan dalam gaya komunikasi sebagai sebuah alat.yang mampu menjangkau berbagai kalangan etis agama,lintas generasi dalam bidang sosial politik ekonomi budaya di masyarakata. Pola komunikasi birokrasi di revolusi 4.0 di warnai dengan teknologi dan informasi sebagai sebuah kompetemsi birokrat yang mampu dapat menjabarkan berbagai kebijakan program2 dan mengatasi permasalahan covid -19 baik di linhkungan pemerintahan maupun masyarakat secara transparam melalui media sosial facebook, instagram, tv, yang mudah di akses oleh seluruh masyarajak dengan mengutamakan kearifan lokal sebagai bagian budaya yang mewarnai perilaku birokrat dalam model pola komunikasi. Kondisi demikian akan mampu meningkatkan kinerja individu dan sekaligus kinerja organisasi secara nasional maupun internasional

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang/ kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang

dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. (sedarmayanti,2020) bagaimana SDM yang unggul mampu memecahkan masalah pandemi dalam menjalankan kegiatannya dan informasi mudah untuk dipahami, tidak terlalu banyak menghasilkan konflik serta meningkatkan kemampuan pribadi yang berprestasi menjadi bereputasi nampa dimata masyarakat di berbagai bidang , dapat terlihat dalam bentuk gambar sebagai berikut :





kearifan lokal sangat mendukung SDM mampu menjadi SDM yang unggul dalam menghadapai kondisi revolusi industri 4,0 di era pandemi dengan membangun komunikasi birokrasi yang masuk ke berbagai etnis,agama,generasi dan berbagai bidang dengan meramu kearifan lokal dengan mengkolaborasi lingkunagan komunikasi serta peraturan,kebijakan baru berupa protokol kesehatan yang melalui manajemen penetahuan yang sebelumnya hanya dimiliki dan diketahui secara pribadi menjadi sebuah langkah yang bereputasi sebagai bagian dari kinerja individu menjadi kinerja publik.

Dalam pembahasan kali ini adanya ketimpangan Pembangunan

antar daerah itu adalah perbedaan pembangunan antar suatu daerah dengan daerah lainnya bai secara partikal maupun secara horizontal yang menyebabkan disparatis atau ketidak pemerataan pembangunan. itu di sebabkan oleh beberapa factor antara lain Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam, Perbedaan Kondisi Demografis, Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa, Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Daerah, dan Alokasi Dana Pembangunan Antar Daerah. Adapun solusi untuk permasalaan tersebut adalah dengan cara pemerintah harus melakukan Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan,informasi teknologi,Pengembangan Pusat Pertumbuhan, dan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Peranan aparatur dalam membangun *good governance* di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik, membuat atau merumuskan kebijakan publik, mempererat dan mempersatu bangsa. Dalam rangka menjalankan tugas yang diembannya tersebut, ASN perlu mempunyai suatu motivasi yang sangat tinggi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Perlu menghayati suatu peristiwa bersejarah penting terkait dengan perubahan untuk menjadi lebih baik.Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal yang

dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang.

Kemampuan organisasi untuk berkembang ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menciptakan perubahan. Kemampuan organisasi untuk berubah ditentukan oleh seberapa berdaya setiap individu melakukan perubahan. Konsep pemberdayaan pegawai (*employee empowerment*) menjadi syarat untuk membangun suatu organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, bahkan dengan cepat menciptakan perubahan untuk merespon perubahan lingkungan eksternal yang telah terjadi atau potensial yang akan terjadi..Individu-individu yang sudah berdaya dan kemudian menciptakan perubahan disebut Agen Perubahan.

Agen Perubahan adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau melakukan suatu inovasi berencana. Agen Perubahan dapat berlaku seperti katalisator (*a catalyst*) yang berkarakter mempercepat dalam penyelesaian tugas kerja, atau seperti pemberi solusi (*a solution giver*) yang selalu memberikan solusi untuk setiap kendala, atau seperti kontributor aktif (*a process helper*) yang selalu memberikan kontribusi maksimal pada setiap proses kerja, dan atau seperti penghubung informasi (*a resource linker*) yang mempunyai akses berharga atau mengetahui data dan informasi berguna yang membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas kerja. Terdapat tiga unsur utama penggerak perubahan yaitu:

1. Sponsor. Yaitu orang atau organisasi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan. Beberapa contoh kegiatan dari Sponsor antara lain:
    a. Memahami perubahan yang dibuat, seperti:
    b. Mengetahui keadaan masa datang yang dikehendaki;
    c. Menentukan batas-batas perubahan, fleksibilitas;

d. Gambaran proses perubahan: struktur, proses, orang, budaya;
e. Keahlian dan kemampuan yang perlu dimiliki.
f. Mengelola sumber daya, seperti:
    1) Menaksir kebutuhan biaya dan waktu untuk perubahan;
    2) Menyediakan biaya, waktu dan fasilitas atau sumber daya lain;
    3) Menyelenggarakan pelatihan dan imbalan.
g. Komunikasi dengan orang yang terlibat, seperti:
    1) Memahami perubahan pada orang yang terlibat;
    2) Menjelaskan perubahan yang akan dilakukan;
    3) Mendengarkan keluhan, mendorong, menasehati orang yang terlibat.

2. *Champion*. Yaitu orang atau organisasi yang membuat rencana dan pendukung utama perubahan. Beberapa contoh dari tindakan yang dilakukan *Champion* antara lain:
    a. Harus dapat mempengaruhi senior staf dan rekan sejawat;
    b. Menginisiasi perubahan dan mengambil tanggung jawab;
    c. Memimpin dan memotivasi Player bahwa program akan terlaksana;
    d. Menentukan kebutuhan apa yang perlu diubah dikaitkan dengan budaya, struktur dan proses dalam institusi;
    e. Menilai bidang mana yang akan ada hambatan;
    f. Mendengar orang, menasehati, melatih dan mengembangkan team;
    g. Memonitor kemajuan proses perubahan.

3. *Player*. Orang yang sehari-hari mengerjakan perubahan

Siapapun dapat menjadi Agen Perubahan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sampai saat ini karakter ASN yang mengutamakan pelayanan kepada publik (*public service*) masih jauh dari standar yang diharapkan. Pola pikir positif ASN semakin hari semakin tergerus dan pola pikir negative yang semakin lama semakin mengkristal menjadi kebiasaan. Dengan demikian perlu adanya sebuah formula baru dalam melakukan perubahan sosial di lingkungan kerja ASN. Perubahan yang dimulai dari tataran pola pikir hingga rencana aksi.

Perubahan yang diharapkan adalah perubahan menjadi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui semangat reformasi birokrasi. Upaya perubahan sistem dan struktur organisasi pemerintahan atau yang terkenal dengan nama reformasi birokrasi memang sedang dilakukan Pemerintah.

Upaya mengubah pola pikir negatif dan perilaku buruk PNS juga masuk dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 (Permenpan No 20 Th. 2010) yang dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Kemenpan & RB menyebutnya sebagai Program Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 Pada Tingkat Mikro yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

Kemenpan & RB mengharapkan pada tingkatan mikro terbentuk sebuah tim Manajemen Perubahan atau dikenal dengan nama tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di setiap instansi pemerintah. Tim tersebut bertugas untuk menyusun strategi

manajemen perubahan dan strategi komunikasi di instansinya serta membangun komitmen, partisipasi dan perubahan perilaku pada individu seperti yang diinginkan. Upaya untuk membentuk pribadi yang sesuai dengan reformasi birokrasi adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan ASN yang sudah digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Lembaga Administrasi Negara.Peranan aparatur Pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

1. *Catalytic Government: Steering rather than rowing*. Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan, tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
2. *Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than marely deliver service*. Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan sepeti koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagainya perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah dan lain-lain.
3. *Competitive government: promote and encourrage competition, rather than monopolies*. Aparatur dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam setiap pelayanan. Dengan adanya persaingan maka sektor usaha swasta dan pemerintah bersaing dan terpaksa bekerja secara lebih profesional dan efisien.

4. *Mission-driven government: be driven by mission rather than rules*. Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian apa yang merupakan "misinya" dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
5. *Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs*. Aparatur dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus diberi kesempatan yang lebih besar dibanding instansi yang kinerjanya kurang.
6. *Customer-driver government: meet the needs of the customer rather than the bureaucracy*. Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan mayarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
7. *Ente prising government: concretrate on earning money rather than just speding it*. Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisainya, disamping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.
8. *Anticipatory government: invest in preventing problems rather than curing crises*. Aparatur dan birokrasi yang antisipasif. Lebih baik mencegah dari pada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi "*mental swich*" dalam aparat daerah.
9. *Decentralilazed government: decentralized authority rahter than build hierarcy*. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipasif dengan pengembangan kerjasama tim. Dengan demikian

organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.

10. *Market-oriented government: solve problemby influencing market forces rather than by treating public programs*. Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar.

Secara umum, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di perdesaan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, (b) mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis dan partisipatif, (c) memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, (d) mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis, (e) mewujudkan produktivitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro perdesaan, dan (f) meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan. Secara khusus, melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), langkah kebijakan yang ditempuh adalah: (a) memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, (b) meningkatkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan (c) memberikan bantuan kepada masyarakat berupa dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM/*Block grant*) dan bantuan pendampingan berupa *technical assistance.*

Implementasi pembangunan abad ke XXI dengan menggunakam model komunikasi digital di masa pandemi. Meningkatkan pendapatan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan non inflasi dan memastikan sumber daya yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Dalam kendala yang disebabkan oleh struktur ekonomi, sistem pajak dalam negeri dan pendapatan bukan pajak harus dirancang untuk meningkatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran publik, sehingga menciptakan saldo fiskal yang berkelanjutan, dan mengurangi kebutuhan untuk mengandalkan pada peningkatan pinjaman publik atau penciptaan uang.

Pandemi Covid-19 telah membawa dunia modern dalam kepanikan yang dengan cepat mengubah tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah melakukan redefinisi terhadap perubahan dalam pola kerja kebijakan dan pelayanan publik. Perubahan yang dimaksud antara lain adanya mekanisme *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) dalam kondisi tertentu sesuai zona wilayah (Nihayaty, 2021). Cepatnya laju penambahan jumlah kasus COVID-19 di Kawasan Asia Tenggara menyebabkan pemerintah setempat memberlakukan kebijakan pembatasan sosial atau lockdown. Adanya pembatasan sosial tersebut menyebabkan lesunya perekonomian di Kawasan Asia Tenggara . Bagi Kawasan Asia Tenggara yang tingkat perekonomiannya menduduki posisi terbesar ketujuh di dunia dan terbesar ketiga di Asia (*World Economic Forum*, 2016), adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap perekonomian negara-negara di kawasan ini (Fauzi & Paiman, 2020). Oleh karena itu, upaya-upaya perlu dilakukan oleh pemerintah di

negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas perekonomian di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 termasuk negara Indonesia.

Kemampuan masing-masing negara beradaptasi dengan keadaan yang ada melalui pelaksanaan yang efektif dan antisipatif sangat bervariasi. Kebijakan merupakan landasan awal yang harus dilakukan agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan sukses. Pengambilan keputusan atas kebijakan antisipatif terkait dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, pengelolaan pasien yang terinfeksi, perlindungan tenaga kesehatan, dan pengendalian perhatian publik harus dipertimbangkan secara matang. Sejak awal pandemi beberapa kebijakan pemerintah untuk menangani, menvegah dan upaya pemulihan kondisi wabah tersebut telah dilakukan. Pemerintah melakukan evaluasi PPKM di Jawa-Bali tiap satu minggu sekali dan di luar Jawa-Bali setiap dua minggu sekali. Pada periode PPKM kemarin pemerintah melakukan pelonggaran di berbagai sektor kegiatan. Misalnya, bioskop dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota PPKM level 3 dan 2. Kemudian, perluasan pembukaan lokasi wisata di berbagai kota dengan penerapan protokol kesehatan, hingga penerapan ganjil-genap pada daerah-daerah wisata. Berbagai pelonggaran dilakukan pemerintah dengan menilai situasi Covid-19 (Kompas 2021).

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (1988), Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki struktur dan prosedur dalam

mencapai tujuannya. Hal ini mengindikasi bahwa birokrasi merupakan organisasi yang didesain untuk menyelesaikan tugas administrasi secara sistematis berdasarkan urutan pekerjaan individu. Struktur birokrasi banyak diwarnai oleh karakteristik dan kapabilitas individu atau aparat selaku abdi negara atau pemerintah dan pelayan masyarakat yang secara hirarki sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam tata administrasi. Dengan demikian, dihadapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai dengan peranannya selaku abdi negara.

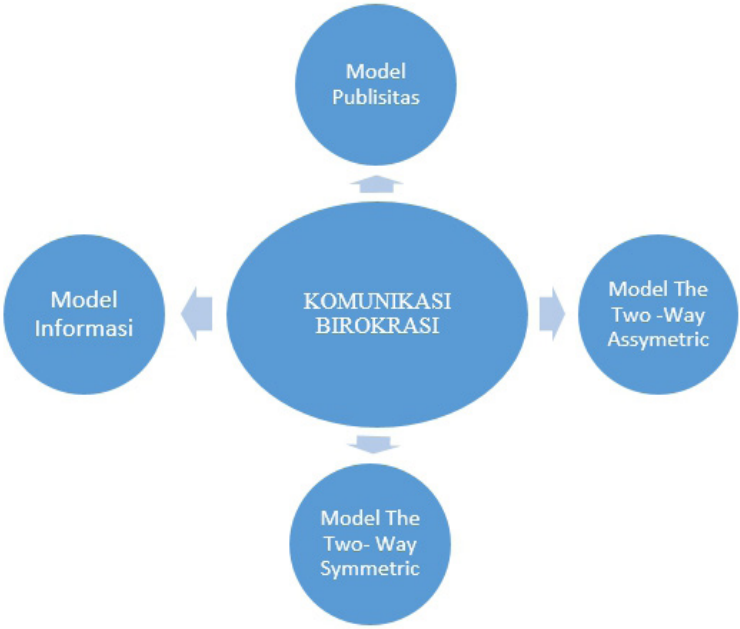
Perilaku birokrasi merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya (Thoha, 2005). Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi (*dysfunction of bureaucracy*). Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sosial. Pentingnya perilaku birokrasi dalam organisasi sebagai penentu aktivitas pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi, maka segala tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan harus sesuai dengan perilaku birokrasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menurut Dwiyanto (2006) memberikan indikasi bahwa pada umumnya para pejabat birokrasi belum mampu menempatkan para pengguna jasa birokrasi sebagai pelanggan yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki nasib diri dan birokrasinya. Pengguna jasa masih diperlakukan sebagai klien yang nasibnya ditentukan oleh tindakannya, akibatnya diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih mudah dijumpai dalam birokrasi pelayanan.

a. Secara sosiologis, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan sosial pada segala aspek kehidupan masyarakat diberbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, pariwisata termasuk pada aspek birokrasi pemerintahan
b. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan dimana menjadi ukuran yang diberlakukan dalam peyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan

Strategi media komunikasi dan perilaku birokrasi dalam pelayanan publik harus berkorelasi dengan empati, partisipasi, motivasi berprestasi tinggi, budaya organisasi gotong royong, semangat berbagi, iklim konflik, dan pemberdayaan manusia.. Mulyaningsih .Ojs Piani,2021

Peran birokrasi dan peluncuran model.Birokrasi Birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang (Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000). Dalam hal birokmrasi pemerintah, Haryanti & Rusfian (2018), mengembangkan 4 model kehumasan strategi komunikasi yaitu diantaranya adalah (1) Model Publisitas (press agentry). Model ini menempatkan humas sebagai agen press yang membuat berita untuk mempengaruhi publik, melalui promosi, publisitas, manipulasi, propaganda. Kebenaran tidak terlalu dibutuhkan. Model ini biasa digunakan dalam komunikasi bisnis; (2) Model Informasi Publik. Model ini mendasarkan pada proses komunikasi satu arah untuk menyampaikan informasi, bukan

membujuk atau mempengaruhi publik. Model ini diterapkan dalam komunikasi pemerintah. Komunikator berperan sebagai jurnalis untuk menyebarkan informasi; (3) Model The two-way asymmetric. Model ini mendasarkan pada proses komunikasi dua arah, feedback, persuasi dan perubahan perilaku publik. Digunakan dalam periklanan, pemerintahan, politik, kampanye dan edukasi publik. Komunikator menggunakan data ilmiah untuk meyakinkan atau mempengaruhi publik; (4) Model The twoway symmetric. Model ini bertujuan mengubah perilaku. Ada dialog, pertukaran ide, sikap dan perilaku untuk mengakomodir kebutuhan dan mencapai kesepahaman. Model tersebut secara sederhana digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Model Komunikasi Birokrasi adaptasi Haryanti, Rusfian (2018)

Pergeseran paradigma dalam mengelola organisasi di era *unpreditable* serta kompleks membuat organisasi perlu melakukan penyesuaian melalui sebuah proses perubahan. Perubahan organisasi adalah usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup agar tetap survive menghadapi permasalahan yang tidak pasti seperti Covid-19. Organisasi-organisasi yang cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan adalah organisasi yang survive. beberapa tuntutan pembaruan organisasi menurut teori perubahan organisasi dapat berasal dari kondisi internal dan eksternal yang tidak diharapkan, seperti munculnya ketidakwajaran, inovasi yang berdasarkan kebutuhan proses, perubahan struktur industri atau struktur pasar, demografi, perubahan persepsi, suasana dan maknaserta pengetahuan baru. Birokrasi dihadapkan pada kondisi kehidupan new normal di era pandemi Covid-19 sehingga diperlukan sebuah model perubahan birokrasi yang mampu menjawab tantangan. perubahan birokrasi memerlukan ide-ide kreatif yang dikembangkan melalui sebuah inovasi dalam pelayanan publik sehingga, pelayanan publik tetap berjalan dengan baik, tanpa kendala meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19. (T.Taufik, and H. Warsono, 2020).

Pelaksanaan grand design reformasi birokrasi, sampai dengan roadmap kedua, memang telah mencapai banyak hal. Demikian, tidak tercapainya indikator yang mencerminkan kapabilitas birokrasi, menunjukkan masih ada yang kurang dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Masih terdapat permasalahan kelembagaan, budaya organisasi, profesionalisme SDM aparatur, tata laksana dan etika dalam pelayanan publik (Mochamad Nurhestitungga, Muhlisin. 2020) begitu pula dalam hal pola komunikasi birokrasi pada masa pandemi covid-19 saat ini yang

menuntut banyak pelayanan publik dari perubahan kondisi kearah new normal serta kemunduran berbagai aspek dimana kuantitas pelayanan publik pada masyarakat intensitasya semakin meningkat untuk upaya recovery kondisi.

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan seharusnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, di sisi lain, kinerja birokrasi belum meningkat secara signifikan karena beragam permasalahan. Oleh karena itu, pembenahan birokrasi (reformasi birokrasi) sangat mendesak dilakukan di Indonesia

Permasalahan yang diuraikan sebelumnya, sangat erat kaitannya dengan kinerja birokrasi sehingga perlu langkah-langkah strategis dalam melakukan perubahan birokrasi di Indonesia. Rendahnya kualitas layanan publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh buruknya kinerja birokrasi. (Fikri Habibi, 2020)

Tabel 4.1. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Area	Hasil Yang Diharapkan
Organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Peraturan perundang-undangan Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan Kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan Masyarakat
Pola pikir (mindset) dan Budaya kerja (culture set) aparatur.	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010

Semester pertama di tahun 2021 telah terlewati. Berbagai capaian reformasi birokrasi pun telah ditorehkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama setengah tahun ini. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah (Kominfo, 2021).

Salah satu temuan evaluasi terhadap implementasi e-govt di Indonesia ialah rendahnya tingkat keterhubungan (connectivity) antar sistem e-govt, baik dalam satu kementerian, lembaga, daerah maupun--apalagi--antarkementerian, lembaga, dan daerah. Area perubahan peraturan perundangan dan pengawasan masih menjadi area perubahan yang paling memprihatinkan. Masalah

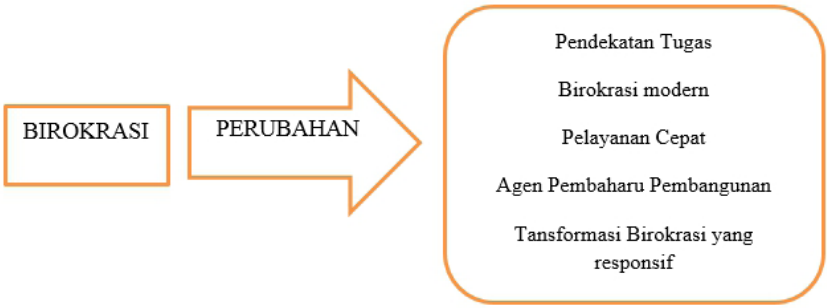
lain ialah soal *egoism sectoral* antar kementerian, lembaga, dan daerah. Bahkan, egoism sectoral terjadi dalam satu kementerian, satu lembaga pemerintah, dan satu organisasi perangkat daerah tertentu. Masalah ini sering dikenal dengan silo mentality.

Berdasarkan data yang ada, masih lebih dari 100 daerah di Indonesia yang sama sekali belum melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Laporan dari berbagai lembaga internasional juga menunjukkan kondisi birokrasi Indonesia yang masih memprihatinkan. Nilai *ease of doing business* (EoDB) Indonesia masih di bawah Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam pada 2016-2019. Hal ini mengakibatkan daya saing investasi Indonesia di kawasan ASEAN cukup terpuruk. Indikator lain yang juga masih memprihatinkan ialah indeks persepsi korupsi yang walaupun ada perubahan, tapi tidak signifikan. Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk menilai kualitas birokrasi Indonesia ialah *government effectiveness index* (GEI) yang masih kurang baik walaupun secara terus-menerus terjadi perbaikan. Indonesia menghadapi warga dunia yang semakin tinggi mobilitasnya, demikian pula pada pertambahan penduduknya yang signifikan dan menghadapi ketertinggalan dalam hal kesejahteraan masyarakatnya, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Sampai saat ini pemerintah belum mampu membuat regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah taksi daring (Media Indonesia, 2020). Tindakan yang terlihat di lapangan masih parsial, belum terbentuk sistem yang terhubung dari pusat hingga daerah. Dibutuhkan birokrasi yang solid untuk merespons persoalan masyarakat, penggunaaan media sosial dan digital justru kontraproduktif dengan situasi kekinian.

Guna merespons kesan buruk birokrasi, maka birokrasi

perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya (Benveniste, 2001) antara lain:

1. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayom dan pelayan masyarakat dan menghindari kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.
2. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat).
3. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya, yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern, yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efi siensi biaya dan ketepatan waktu.
4. Birokrasi harus memosisikan diri sebagai agen pembaharu pembangunan.
5. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid), menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih esentralisasi, inovatif, fleksibel dan responsif.



Gambar 4.1 Perubahan sikap dalam birokrasi adaptasi dari Benveniste (2001)

Kearifan berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek atau situasi. Sementara itu, lokal menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007).

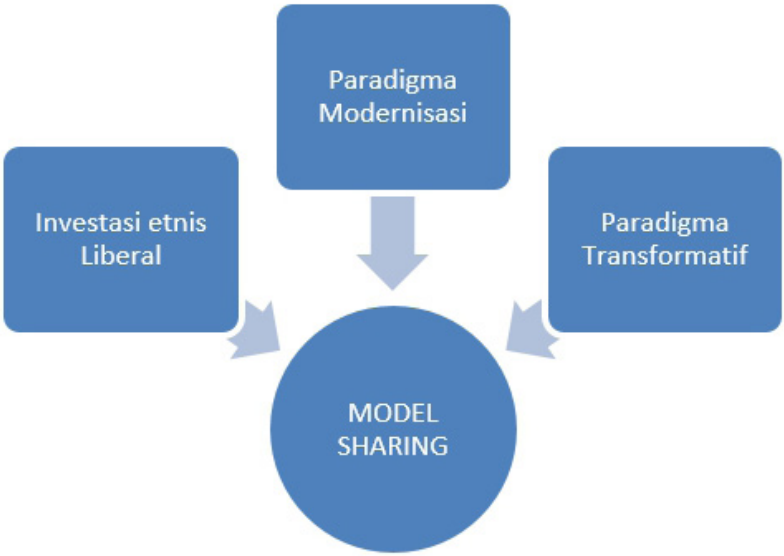
Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya. Kearifan lokal sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Gobyah, 2003). Kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan

akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010).). Dalam model adopsi nilai-nilai lokal dalam reformasi birokrasi pemerintah daerah pilihan pendekatan jalan damai (conciliative approach). Pendekatan tersebut dipilih karena memberikan arah kefektifan perubahan yang lebih baik, serta adanya pola legal formal yang diadopsi secara damai dapat meminimalisir pertentangan yang dapat menggagalkan perubahan budaya dan kebiasaan birokrasi (Yulianto, 2018).

Karakteristik budaya organisasi *sharing* berupa trasformasi adopsi nilai-nilai baru dengan penyesuaian nilai fundamental sehingga mampu menjadi modal sosial. Metodologi menggunakan deskriftif kualitatif dengan kajian pustaka tentang nilai kearipan lokal dikolaborasi di lingkungan internal dan eksternal serta temuannya direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak praktis dalam menyelesaikan masalah. Transformasi nilai karakteristik budaya organisasi *sharing* dari kearifan lokal silih simbeuh yang telah di reubonding yaitu; sama rukun dan gotong royong, sama setia dan bertahan-sama semangat juang tinggi, dengan sikap dan pola pikir; hubungan pelaku usaha dengan sumber modal dan pemasok bahan baku guna mengatasi berbagai

masalah di perbatasan dapat dijadikan modal sosial berupa pola berpikir dan berperilaku guna mengatasi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara.



Gambar 4.2 Paradigma Karakteristik Budaya Organisasi "*Sharing*" Perilaku SDM di Indonesia (Mulyaningsih, 2020)

Dalam konteks pelayanan publik, model komunikasi birokrasi yang ideal adalah yang interaktif atau bersifat dialogis. Model ini merupakan gambaran dari proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Proses komunikasi berjalan secara sirkuler dimana masing-masing pelaku dapat bertindak secara bergantian sebagai komunikator dan komunikan. Proses tersebut akan terus berlangsung dan bergantian satu sama lain selama feedback masih ada dan dapat mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat membentuk suatu pola sirkuler, yang kemudian disebut sebagai

suatu model komunikasi sirkuler. Hal mendasar dalam model ini adalah dalam setiap proses komunikasi harus ada feedback atau umpan balik, melalui model ini dapat diketahui efektif tidaknya suatu komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila terjadi umpan balik dari penerima pesan (Hilda Aulia Rahmia, Aurelius R.L. Telumab, dan Agus Purbathin Hadi, 2020).

1. Dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat Indonesia adalah bidang pelayanan publik yang menuntut perubahan dalam birokrasi pelayanan publik dalam dimensi organisasi dan sistem kerja.
2. Perubahan dan dinamika di masyarakat senantiasa terjadi melalui transformasi sebuah model komunikasi birokrasi diharapkan dapat memecah seluruh hambatan dan kelambanan dalam pelayanan publik.
3. Transformasi nilai karakteristik budaya organisasi melalui peluncuran model komunikasi birokrasi berbasis kearifan lokal, silih simbeuh yang telah di reubonding, gotong royong, saling setia dan bertahan-sama semangat juang tinggi, dengan sikap dan pola pikir dapat dijadikan modal sosial berupa pola berpikir dan berperilaku guna mengatasi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (1988), Perkembangan Hukum Modern dan Rasional: Sosiologi Hukum Max Weber dalam Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Ansell, Cristopher, 2014, pragmatist democracy, evolutionary learning as public philosophy, new york; oxford university press,inc

_____ & alison gash,2007 collaborative governance in theory and practise,journal of public administration research and theory,vol 18 no 4 him 543-571

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pendidikan-era-revolusi-industri-40-di-tengah-covid-19

Aksesibilitas Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid 19

ARTIKEL • Jum'at, 03/04/2020 • Upi Fitriyanti

Afriadi, Ferry. (2015). Effektivitas Komunikasi Interpersonal Antara Atasan Dan Bawahan Karyawan PT Borneo Enterpresindo Samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 1.

Alamsyah, Kamal. 2003. *Pengaruh Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Dinas-dinas di Kabupaten Lebak Propinsi Banten)***.** Bandung : Program Pascasarjana UNPAD

----------,Kamal. 2004. *Perilaku Organisasi dalam Birokrasi Pemerintahan***.** Yogyakarta :

Ambar, 2017. Model – Model Komunikasi. https:// pakarkomunikasi.com/model-model-komunikasi

Amrullah. Administrasi Pembangunan dan Pembangunan Administrasi (Memahami materi kuliah secara makro cara berfkir konsep adm pembangunan),*Edisi: 12 Jan 07 Halaman: OPINI* **,Partners Palembang International Law Office**

Arifin, M. 2006. Ilmu. Pendidikan Islam (Suatu Tujuan Teoritis Dan Praktis). CV Pustaka Setia

Artikel Pembangunan Indonesia Masa Kini dari Rochmat Aldy Purnomo

Benveniste, Guy. 2001. Birokrasi. Jakarta : Gramedia. 1997. BKN. Materi Sosialisasi Assessment Center

Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat. Modern, Prestasi Pustakaraya Jakarta

Budiman, A (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga,*

Jakarta:Gramedia

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.2007 .

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_di_ Indonesia

Burgon & Huffner. (2002). Human Communication. London: Sage Publication . In. California: SAGE

Cangara, Hafied. 2002. Pengantar Ilmu Komunikasi.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Clifford Geertz. 2007. Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Aswab Mahasin. PT Dunia Pustaka Jaya

Darmawan,Ivan (2020), Kebijakan dan Strategi Komunikasi Pemerintahan,Universitas Terbuka

Dampak Sosial Pandemi Covid 19 Pada Pekerjaan Sektor Publik

https://bkd.jabarprov.go.id/artikel/202-dampak-sosial-pandemi-covid-19-pada-pekerjaan-sektor-publik

Depdagri-LAN, Modul Kebijakan Pelayanan Publik,

Diklat Teknis Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu, Jakarta, 2007).

Dewi, Fitriana Utami 2011. Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik.Jurnal Ilmu Komunikasi. DOI: https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.109-124

Distro Kota Banjarmasin. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dukcapil, 2019. https://dukcapil.kemendagri.go.id

Dwiyanto Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Emerson,kirk,tina nabatchi&stepen balogh,2012,integrative framwork for collaborative governance;journal of administration reasearch Abidin, Yusuf Zainal, Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep dan Aplikasi: Pustaka Setia:Bandung: 2015

Fajrini. 2014. Strategi Public relations Grand Inna Muara Pasca Gempa 2009 (Studi Deskriptif Proses Rebranding Hotel Inna Muara

Ferrel, Linda & O.C. Ferrel, *Ethical Business* , Essential Managers,Dk, London, New York, Munich, Melbourne, Dehli, 2009

Fendt,thomas cristian,2010,introduction electronic supply chain collaboration in china; evidence from manufacturing industries.berlin;universitatsverlag der technishen universitat berlin

Fitriana Utami, Dewi, 2011. Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik.Jurnal Ilmu Komunikasi. DOI: https://doi.org/10.15642/jik.2011.1.1.109-124;

Artikel Teori Pembangunan Masyarakat dari http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0502/14/opini/1553516.htm;

Fritz Morstein Marx's article: "Control and Responsibility in

Administration: Comparative Aspects." ILO Regional Office for Asia and the Pacific. (2016). Employment-focused disaster risk management and reconstruction in Asia and the Pacific: A comparative

Gobyah. I Ketut. 2003. Berpijak pada Kearifan Lokal. Dalam . www.balipos.co.id

Habibi, Fikri. 2020 . Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi Di Indonesia . Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 199-230

Harris Munandar, Maman Suherman. 2016 ,Aktivitas Komunikasi Pemerintahan Ridwan Kamil di Media Sosial. Prosiding Hubungan Masyarakat Volume 2, No.1, Tahun 2016 ISSN: 2460-6510

Haryati, Sri. (2018). Hubungan Diri dan Interaksi Teman Sebaya dengan Kepercayaan Diri Remaja. repository.unpas. ac.id/36080/8/21

Henri Subagio dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009.

Heryanto & Zarkasy, 2012),Relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI : Studi ekonomi-politik media, 2003

http://disperkim.jabarprov.go.id/wp- content/uploads/2021/01/136453860_405911477178678_1794824954603991967_n-1024x1024.jpg

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/20/07332451/hari-terakhir-ppkm-ini-perkembangan-situasi-covid-19-di-

Indonesia.

https://www.antaranews.com/covid-19

http://disperkim.jabarprov.go.id/wp- content/uploads/2021/01/136453860_405911477178678_1794824954603991967_n-1024x1024.jpg

http://www.kanal-kesehatan.com/wp-content/uploads/2020/04/Gambar-2-Perkembangan-kasus-terkonfirmasi-covid19-di-Jawa-kecuali-Provinsi-DKI-Jakarta.jpg

https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/18/150000269/pandemi-ap

http://www.geomatika.its.ac.id/lang/id/archives/774

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_terluar_Indonesia

Ibrahim Indrawijaya,Adam, Teori, Perilaku, Dan Budaya Organisasi Diterbitkan & Dicetak Oleh Pt Refika Aditama Jl. Mengger Girang No.98, Bandung 40254 Cetakan Kedua, November 2014

Immanuel, Yaduhu. 2006. *Pengaruh Pengembangan Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Keorganisasian Lembaga Perkreditan Desa di Bali (Studi di Kabupaten Badung Propnsi Bali).* Bandung: Program Pascasarjana UNPAD

Joel Netshitenzhe, 2010. Government Communicators Handbook 2010/11 Author: GCIS

J. Strömbäck & S. Kiousis (2011). New York and London: Routledge. 340 pp. ISBN-13: 978-0415873819

Erliana Hasan, Komunikasi Pemerintahan, Refika Aditama,

Bandung, 2005.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2019, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung Penerbit Nuansa

Jurnal Fakultas Hukum Universitas, Batanghari Jambi 2018

Jurnal, ASPIKOM, Vol. 03, No. 02, Januari 2017, 326-339

Jurnal, Fisip Universitas Bina Widya, Vol.04, No. 01, Februari 2017

Jurnal, LISKI, Vol. 3, No. 2, 2017

Jurnal, Fisip Universitas Diponegoro 2017

Jurnal Ilmiah ; Focus Magister Administrasi.Program Pascasarjana UPMI (Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia) Medan;Sumatra Barat, Vol 5 No 2 Tahun 2016 ISSN 2089-4112

Khairil Anwar, 2019 . Gaya Komunikasi Dan Keterampilan Berbahasa Guru Bahasa Inggris Dalam Menciptakan Iklim Organisasi Di Smk Penerbangan Hasanuddin Makassar

228 Jurnal Idaarah, Vol. Iii, No. 2, Desember 2019

Kominfo, 2021. https://www.kominfo.go.id/content/detail/35496/inilah-capaian-reformasi-birokrasi-semester-pertama-2021/0/berita

Lewin, K. 1951. Field Theory in Social Science. New York: Harper.

María José Canel dan Karen Sanders dalam Government Communication: An Emerging Field in Political Communication Research (2011 : 85-86)

.com/opini/278422/tantangan-dan-strategi-reformasi-

birokrasi-2020

Mas'oed, Mohtar. 2008. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

McNair, Brian. (2003). An Introduction to Political Communication. New York-London: Routledge Taylor & Francis

Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.

Miftah Thoha, 2005, Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Media Indonesia, 2020. Tantangan dan strategi birokrasi https://mediaIndonesia Mordono, Don, 2009. Sumedang *Puseur Budaya Pasundan*, Sumedang, Pemda kab Sumedang

Muhammad. 2018. Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance). https://stianasional.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Birokrasi.pdf

Muhammad Firhansyah .Asisten Ombudsman RI Kalsel Muhammad FIrhansyah (dok Pribadi)

_____<Kepala Keasistenan PVL Ombudsman R.I Perwakilan Kalselhttps://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-di-tengah-badai-covid-19

Muhammad Ashraf Fauzi, Norazha Paiman, 2020.

COVID-19 pandemi in Southeast Asia: intervention and mitigation effortshttps://www.researchgate.net/publication/343427924

Mulyana. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.

Remaja

Mulyaningsih, 2005, Wawasan Tridharma Nomor 9 Tahun XVII April 2005

Judul Penelitian : Implikasi Silih Simbeuh Kehidupan Masyarukat Komplek dan Masyarakat Pedesaan

Mulyaningsih, (2016) Fundamental Paradigma Karakteristik Budaya Organisasi "Berbagi" *(Sharing)* Di Indonesia Dalam Menghadapi Damfak Globalisasi-Liberalisasi. 2016Jurnal Administrasi Negara-DIALEKTIKA-Vol 1-No 1-Desember 2016 Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

_____, 2016,*Proceeding;Joint Seminar* KOPRI Region IV, Wittenborg University ISBN 978-602- 71741-6-0) Amsterdam,Belanda,

_____,2017 Transformasi Perencanaan Budaya Organisasi Terhadap Manajemen

Pendidikan Untuk Mewujudkan Efektivitas Penggunaan Budaya *Sharing* Di Lingkungan Pendidikan (Survei Pada Smp Negeri Di Jawa Baratjurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis Jurnal homepage: http://jurnal.asmtb.ac.id/index.php/jsab

_____,2017.Organizational Culture *Sharing* Characteristic Transformation, Organizational Climate, and Empowerment on Motivation to Realize Society Participation in the Organization (A case study of Ciapus Village in Banjaran Mulyaningsih,*Proceeding;Joint Seminar* KOPRI Region IV, Tsukuba Univesity And Meijo University,ISBN 978-602-

71741-2-2 Jepang, 2015

_____,2017, (Journal Of Secretary & Business Administration Vol I NO I 2017) http://jurnal.asmtb.ac.id/index.php/jsab/index.

_____,**2017**,Rekonstruksi Dan (Rebounding) Karakteristik Budaya Organisasi Berbagi (*Sharing*) Sebagai Upaya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Pada Abad 21,

_____, 2017. Organizational Culture *Sharing* Characteristic Transformation, Organizational Climate, and Empowerment on Motivation to Realize Society Participation in the Organization (A case study of Ciapus Village in Banjaran District). https://www.atlantis-press.com/article/55916171.pdf

_____, 2018 The Transformation Of *Sharing* Culture Organization Characteristics As A Rebounding Result Of Local Wisdom Value In Improving Indonesia's Community Competence In The 21st Century, *Journal of Business & Finance in Emerging Markets Journal of Business & Finance in Emerging Markets,* http://www.ssbrj.org/index.php/jbfem/article/view/19

_____, 2020. Transformasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Dalam Mengatasi Persoalan Kehidupan Masyarakat Daerah Perbatasan Guna Menghadapi Asia Future Shock Tahun. Jsab Iv (2) (2020) 105-115. Jurnal Sekretaris Dan Journal homepage: http://jurnal.asmtb.ac.id Administrasi Bisnis

_____,2021, Media

_____,2021 peluncuran model komunikasi...

Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar.* Bandung: Rosdakarya

Mulyanto,Dede, Usaha Kecil Dan Persoalannya Di Indonesia, AKATIGA, Bandung, 2006

Menuju Pemerintahan ,Wirausaha. Terjemahan. Jakarta

Moenir, HAS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Ndraha, T., Amnuai. 2003. Teori Budaya Organisasi.Memangkas Birokrasi: Lima Strategi

Ndraha, Taliziduhu, 1986. Birokrasi Pembangunan : Dominasi atau Alat Demokratisasi, Jurnal Ilmu Politik 1, Jakarta, Gramedia.

Nelson Oly Ndubisi, *Small And Medium Enterprises : In The Pacific RIM,* KHL Printing Co.Sdn.Bhd. Malaysia, 2008

Nihayaty, A. I. (2021). Penyesuaian Birokrasi Di Masa Pandemi Covid-19 Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jurnal Khazanah Intelektual, 5(1), 1028-1046. https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i1.92

Nurhestitunggal, Mochamad, Muhlisin. 2020. Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis Dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon Iii Dan Iv. .Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.4, No.1, Juni 2020, Hal. 1 – 20 p-ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079

Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi,

Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta:Gramedia

Nawawi,Hadari dan Martini Hadari,1994, Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia

Ombudsman, 2019. https://www.ombudsman.go.id

Pelayanan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Covid-19

Publikasi Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Pengeluaran 2010-2014 dari Badan Pusat Statistik;

Pelayanan Publik di Tengah Badai Covid-19,ARTIKEL • Senin, 30/03/2020 •

Peter M. Blau dan Charles H. Page (2001),Bureaucracy in Modern Society. ISBN. 0075550334 ISBN13: 9780075550334

Peter dan Glyn Davis (2004), The Australian Policy Handbook

PERPRES N0. 81. Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.Pramulaso, Eigis Yani. 2020. Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen, Volume 18 No. 1 Maret 2020 P-ISSN 1411-8637 E-ISSN 2550-1178. http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah

Publikasi Statistik 70 tahun Indonesia Merdeka dari Badan Pusat

Statistik;

Publikasi Statistik Indonesia 2015 dari Badan Pusat Statistik;

Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2004-2009 dari Badan Pusat Statistik;

Publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2008-2013 dari Badan Pusat StatistikPurwanto, Erwan Agus. 2019. "Kebijakan Publik yang Agile dan Inovatif dalamMemenangkan Persaingan di Era VUCA", http:// fisipol.ugm.ac.id/wp-content/ uploads/sites/1056/2019/12/ Pidato-GB-Erwan-AgusPurwanto-23-Des-2019-Cetak.pdf, diakses 24 April 2020.

Rahmia, Hilda Aulia, Telumab, Aurelius R.L, Hadi, Agus Purbathin 2020. Implementasi Komunikasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Mataram Melalui Aplikasi LAPOR!

Rakhmat, Jalaluddin. 1985. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrsi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung

Ridwan, Nurma Ali. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. Puwokerto : STAIN.

Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004, "Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi", Gramedia, Jakarta.

Risnawan, Wawan, 2018, Manajemen Strategik Birokrasi Dalam Era Disruption, Jurnal Ilmu Rohman, Larasati, Dewi Citra 2020. Standart Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal. Reformasi. Volume 10 Nomor 2 . DOI: 10.33366/ rfr.v%vi%i.1952 ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index. Administarasi Publik (Dinamika) Vol. 5, No.4.

Routine, Technology, Social Structure, and Organizational Goals, *Administrative Science Quarterly 4.*

Rorong, Mega. 2020. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Politico. Vol 9, No 1

Robbins, (2008). Organizational Behavior (Perilaku Organisasi). Jakarta : Salemba Empat

Ruby, Mahlil. 2011. Eksistensi dan Peranan Puskesmas sebagai Penyelenggara Upaya Kesehatan.https://www. researchgate.net/publication/293809611

Sadu Wasistiono, 2001, Esensi UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bunga Rampai, Alqaprint, Jatinangor,

_____,, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan, Bandung: Fokusmedia.

Sanrego Nz, Yulizar D, Muhammad, Reza , 2016. Analisa Perbandingan Model Birokrasi Indonesia: Model Modern David Osborne, Ted Gaebler dan Pendekatan Konsep Islam Perspektif Umer Chapra. Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013

Sedarmayanti, Listiani Teni & Mulyaningsih.2020. *Inovasi dan Manajemen Pengetahuan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul*, Cetakan kesatu, Bandung: PT. Refika Aditama

Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1993. *Teori Komunikasi.* Jakarta: Universitas Terbuka

Shintya Gugah Asih Theffidy Rahardja,sam'un,jaja,2008,model colaborasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai citarum ,disertasi program doktor ilmu administrasi publik,depok:Universitas Indonesia

Siagian, Sondang P. 1995. *Filsafat Organisasi***.** Jakarta : Gunung Agung

Suharto,Edi, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaansocial Cetakan ke 5 Februari 2014

Simon, Smithburg, and Thompson's Public Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 1, Issue 1, 1 January 1991

Syani, Abdul. 2013. Falsafah Hidup Masyarakat Lampung Sebuah Wacana Terapan. Lampung. (http://staff .unila. ac.id/abdulsyani/2013/04/02/falsafah-hidup-masyarakatlampung-sebuah-wacana-terapan).

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: Alfabeta

Susanto, Eko Harry . 2020. Kelambanan Reformasi Birokrasi dan Pola Komunikasi Lembaga Pemerintah. Jurnal Aspikom Volume 1, Nomor 1, Juli 2010: 1-124.

Thoha Miftah. 2002. Perspektif Perilaku Birokrasi. Jakarta : PT. RadjaGrafindo Persada.

_____,2005. Perilaku Organisasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

T. Taufik, H. Warsono, Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19, Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, vol. 2, no. 1, pp. 1-18, Jun. 2020. https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8182

Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication e-ISSN 2721-0162

Thoha, Miftah, 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya***.** Jakarta : CV. RajaGrafindo Persada

_____, 1988 .*Pembangunan Administrasi di Indonesia Deregulasi, dan Debirokrasitisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat.* Jakarta

Undang- Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 gambaran pelayan public

UPI. 2014. file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR...tls.../LATIHAN_ASERTIF./pdf diunduh pada tanggal 9 maret 2014

Upi Fitriyanti, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampunghttps://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-pelayanan-publik-saat-pandemi-covid-19

Wanna,John,2008,Collabirative Government;meanings,dimensions drivers andoutcomes dalam o'Flynn Jannie &wanna John.

collaborative governance; a new era of public policy in australia?,canberra;australia national university e pressIndustri 4.0 Penulis: Yosi Winosa Editor: Kumairoh Foto: TechCrunch

https://www.wartaekonomi.co.id/read232908/ini-tantangan-administrasi-publik-di-era-40Wibowo, 2015. Pengaruh Suasana Toko, Promosi, dan Lokasi Terhadap Minat Beli di Planet

Wilbur Schramm, 1988, Wilbur Schramm and the Beginning of American Communication Theory : A History of Ideas, Dissertation Ph.D Iowa University

World Economic Forum Annual Meeting 2016. https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2016

Yulianto, 2018. Reformasi Birokrasi Dan Kearifan Lokal. Cv Andi Offset

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

www.ojk.go.id/.../pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx

https://bnpb.go.id

https://www.wartaekonomi.co.id/read276620/apa-itu-pandemi